LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya tuna, cakalang dan tongkol merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air, dan oleh sebab itu sudah seharusnya sumber daya tuna, cakalang dan tongkol tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus dapat memastikan kedaulatannya dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketersediaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol hendaknya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan Nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya. Hal ini merupakan cita-cita Nasional Indonesia dan merupakan tujuan bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan *stakeholder* lainnya.

Indonesia memegang peranan penting dalam perikanan tuna, cakalang dan tongkol dunia. Pada tahun 2016 produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia mencapai lebih dari 7,5 juta ton Rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia pada 2005-2016 sebesar 1.162.962 ton. Dengan demikian, Indonesia memasok lebih dari 15% produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia. Selanjutnya, pada tahun 2012-2017, volume ekspor tuna, cakalang, tongkol mencapai sekitar 203.444 ton dengan nilai USD$ 912,4 juta (BPS, 2017). Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara kontributor produksi terbesar diantara 32 negara anggota *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dengan rata-rata produksi tahun 2013-2017 sebesar 467.537/tahun (25,32%).

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Selanjutnya, produksi perikanan tuna, cakalang dan tongkol telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi perikanan Nasional Indonesia. Dengan total produksi tuna, cakalang dan tongkol tahun 2005-2016 rata-rata sebesar 1.162.962 ton/tahun, perikanan tuna, cakalang dan tongkol tersebut memberikan kontribusi produksi sekitar 19% dari total produksi perikanan tangkap Nasional.

Berkenaan dengan fakta tersebut, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memastikan terlaksananya praktek pengelolaan dan konservasi sumber daya tuna, cakalang dan tongkol secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995. Berdasarkan *Article* 6.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995 bahwa pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab *(responsible fisheries management)* harus menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup, untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, guna mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Nasional Indonesia sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati.

Mengingat tuna dan spesies seperti tuna termasuk kelompok sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks)* dan/atau sediaan ikan yang beruaya terbatas diantara atau berada baik di Zona Ekonomi Eksklusif dari satu atau lebih negara dan laut lepas *(straddling fish stocks)*, maka pengelolaan tuna harus dilakukan melalui kerjasama regional dan/atau Internasional. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan Internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan Internasional. Selanjutnya, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 december 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (*United Nation Implementing Agreement – UNIA* 1995). Pengesahan UNIA 1995 merupakan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan berbagai negara di dunia dalam rangka pengelolaan tuna secara berkelanjutan.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama regional dan/atau Internasional dalam praktek pengelolaan tuna, telah dilembagakan melalui pembentukan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), antara lain, yaitu:

a. *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Hindia;

b. *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) yang mengelola tuna sirip biru selatan *(southern bluefin tuna)*;

c. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Pasific Bagian Barat Tengah;

d. *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Pasific Bagian Timur;

e. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna* (ICCAT) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Atlantik.

Sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Indonesia telah berperan aktif menjadi anggota penuh pada:

a. *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007;

b. *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007;

c. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013.

Sedangkan status keanggotaan Indonesia pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC) yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Pasifik Bagian Timur adalah *Cooperating Non Member* (CNM), sejak tahun 2013 dan harus diperbaharui setiap tahun.

Menyadari besarnya tantangan dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol guna mewujudkan cita-cita Nasional Indonesia, sudah tiba waktunya bagi pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol membangun kolaborasi dan sinergi yang produktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencanangkan pelaksanaan pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol (TCT) secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus bersatu padu dan bekerjasama dengan pelaku industri penangkapan dan pengolahan tuna, cakalang dan tongkol di seluruh Indonesia. Hal ini penting, karena berdasarkan *article* 6.1 CCRF 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektifitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengingat Indonesia telah meratifikasi UNIA 1995 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, maka seluruh ketentuan dalam UNIA 1995 bersifat

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

mengikat *(legal binding)* bagi Indonesia. Dalam hal ini, terdapat beberapa artikel penting yang perlu dicermati antara lain Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa suatu negara yang bukan merupakan anggota pada suatu organisasi pengelolaan perikanan sub regional dan regional atau tidak menjadi peserta pada suatu pengaturan pengelolaan perikanan sub regional dan regional, dan yang tidak menyetujui untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan tersebut, tidak dibebaskan dari kewajiban untuk bekerjasama, sesuai dengan konvensi dan persetujuan ini, dalam konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh yang terkait.

Dalam Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa negara tersebut tidak harus memberikan izin kepada kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk melakukan operasi penangkapan ikan untuk sediaan ikan yang beruaya terbatas atau sediaan ikan yang beruaya jauh yang tunduk pada tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa suatu negara harus mengizinkan penggunaan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas hanya apabila dapat melakukan pengawasan secara efektif tanggungjawabnya berkaitan dengan kapal-kapal tersebut di bawah konvensi dan persetujuan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka melindungi kepentingan perikanan tuna, cakalang dan tongkol Nasional Indonesia, diperlukan penetapan strategi yang memenuhi kaidah pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang diadopsi oleh RFMO. Strategi tersebut setidak-tidaknya memuat isu, tujuan pengelolaan dan rencana aksi secara spesifik, yang dielaborasi dalam bentuk Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP-TCT) dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tuna, cakalang dan tongkol.

Sedangkan tujuan RPP-TCT yaitu sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol.

C. VISI PENGELOLAAN PERIKANAN

Visi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yaitu untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

D. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PENGELOLAAN

1. Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol meliputi:
   a. status perikanan tuna, cakalang, dan tongkol; dan
   b. rencana strategis pengelolaan tuna, cakalang, dan tongkol.
2. Wilayah Pengelolaan
   1. Lokasi pelaksanaan RPP-TCT untuk tuna dan cakalang mencakup:
      1) WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 termasuk Laut Lepas Samudera Hindia yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), dan khusus untuk jenis tuna sirip biru selatan *(southern bluefin tuna)* dikelola oleh *Commision for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).
      2) WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 termasuk Laut Lepas Samudera Pasifik yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan *Western and Central Pasific Fisheries Commission* (WCPFC).
      3) Perairan kepulauan Indonesia yakni WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715.
   2. Lokasi pelaksanaan RPP-TCT untuk tongkol, mencakup 11 (sebelas) WPPNRI di seluruh Indonesia yang dikelompokkan sebagai berikut:
      1) WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 termasuk Laut Lepas Samudera Hindia yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC),* dan khusus untuk jenis tuna sirip biru selatan *(southern bluefin tuna)* dikelola oleh *Commision for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).
      2) WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 termasuk Laut Lepas Samudera Pasifik yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan *Western Central Pasific Fisheries Commission* (WCPFC).
      3) WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, WPPNRI 718.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa WPPNRI terdiri dari 11 Wilayah Pengelolaan sebagaimana tersebut pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

BAB II

STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan

Sumberdaya ikan tuna, cakalang dan tongkol dikelompokkan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jenis Tuna, Cakalang dan Tongkol

Jenis	No	Nama Lokal	Nama Inggris	Nama Ilmiah
A. Tuna	1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*
	2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacares*
	3	Albakora	*Albacore*	*Thunnus alalunga*
	4	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*
	5	Tuna sirip biru selatan	*Southern bluefin tuna*	*Thunnus maccoyii*
B. Tuna Neritik				
a) Tongkol	1	Lisong	*Bullet tuna*	*Auxis rochei*
	2	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*
	3	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynnus affinis*
	4	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*
b) *Sheer-Fish*	5	Tenggiri papan	*Indo-pasific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*
	6	Tenggiri	*Narrow-barred spanish mackerel*	*Scomberomorus commerson*

1. Potensi

Potensi dan tingkat pemanfaatan tuna, cakalang dan tongkol ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan dan jenis ikan. Estimasi potensi ditetapkan berdasarkan data terbaik yang dapat diperoleh *(best available data)* dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.

a. Tuna dan Cakalang

1. Potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan IOTC

Berdasarkan laporan hasil penelitian komite Ilmiah IOTC (2018), kondisi stok (potensi) masing-masing jenis tuna dan cakalang di wilayah pengelolaan IOTC, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

a) Tuna mata besar (*bigeye tuna*)

Potensi tuna mata besar dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) diperkirakan sebesar 104.000 ton/tahun. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 90.050 ton dan produksi rata-rata (2013-2017) sebanyak 95.997 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tuna mata besar *(bigeye tuna)* sampai tahun 2018, disimpulkan tidak dalam keadaan *over fished* ($SB_{year}/SB_{MSY} \geq 1$), sebagaimana tersebut pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tingkat pemanfaatan tuna mata besar (*bigeye tuna*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018[2]
Samudera Hindia	Produksi 2017:	90.050 t	
	Produksi rata-rata 2013 - 2017:	95.997 t	
	MSY (1000 t)(80% CI)[3]:	104 (87-121)[3]	
	F_{MSY} (80% CI)[3]:	0,17 (0,14-0,20) [3]	
	SB_{MSY} (1.000 t)(80% CI)[3]:	525 (364-718) [3]	
	F_{2015}/F_{MSY} (80% CI)[3]:	0,76 (0,49-1,03)[3]	
	SB_{2015}/SB_{MSY} (80% CI)[3]:	1,29 (1,07-1,51)[3]	
	SB_{2015}/SB_0 :	0,38 (n.a – n.a)[3]	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC
[2] Tingkat pemanfaatan mengacu pada data terbaru yang digunakan dalam pengkajian stok
[3] Titik yang diperkirakan adalah nilah tengah dari model yang dikaji dalam pengkajian SS3 tahun 2016

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

b) Madidihang (*yellowfin tuna*)

Potensi madidihang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) diperkirakan sebesar 403.000 ton/tahun. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2018 sebanyak 409.101.282 ton serta produksi rata-rata (2013-2017) sebanyak 399.830 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan madidihang *(yellowfin tuna)* sampai tahun 2018, disimpulkan dalam keadaan *over fished* sebagaimana tersebut pada Tabel 3 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 3. Tingkat pemanfaatan madidihang (*yellowfin tuna*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018[2]
Samudera Hindia	Produksi 2017: Produksi rata-rata 2013-2017:	409.101.282 t 399.830 t	
	MSY (1000 t): F_{MSY}: SB_{MSY} (1000t): F_{2017}/F_{MSY}: SB_{2017}/SB_{MSY}:	403 t (339-436 t) 0,17 (0.13-0.17) 1069 (789-1387) 1,20 (1,00-1,71) 0,83 (0.74-0.97)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Tingkat pemanfaatan mengacu pada data terbaru yang digunakan dalam pengkajian stok

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

Penentuan status stok perikanan berdasarkan IOTC berubah pada tahun 2015, dimana jumlah stok berubah akibat dari penangkapan skala besar dan tidak lestari yang terjadi pada tiga tahun terakhir semenjak 2012.

c) Cakalang (*skipjack tuna*)

Potensi cakalang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) diperkirakan sebesar 564.000 ton. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 524.282 ton serta produksi rata-rata (2013-2017) sebanyak 454.103 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan cakalang (*skipjack tuna*) sampai tahun 2018, disimpulkan tidak dalam keadaan *over fished* ($SB_{year}/SB_{MSY} \geq 1$), sebagaimana tersebut pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat pemanfaatan cakalang (*skipjack tuna*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi 2017: Produksi rata-rata 2013 - 2017:	524.282 t 454.103 t	
	MSY (1000 t) : SB_{curr}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 (80% CI): SB_0 (80% CI) :	564 (480,4-697,8) 0,54 (0,36-0,77) 0,40 (0,35-0,47) 2.015.220 (1.651.230-	

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

		2.296.135)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

d) Albakora (*albacore*)

Potensi albakora dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) diperkirakan sebesar 38.800 ton. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2014 sebanyak 40.233 ton serta produksi rata-rata (2012-2016) sebanyak 36.855 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan albakora (*albacore*) sampai tahun 2016, tidak dalam keadaan *over fished* sebagaimana tersebut pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat pemanfaatan albakora (Albacore) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017[2]
Samudera Hindia	Produksi 2016:	35.996 t	
	Produksi rata-rata 2012 - 2016:	35.150 t	
	MSY (1000 t) (80% CI):	38,8 (33.9-43.6)	
	F_{2014}/F_{MSY} (80% CI):	0,85 (0,57-1,12)	
	SB_{MSY}(1000t)(80% CI):	30,0 (26,1-34,0)	
	SB_{curr}/SB_{MSY} (80% CI):	1,80 (1,38-2,23)	
	SB_{curr}/SB_{1950} (80% CI):	0,37 (0,28-0,46)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Mengacu pada data pengkajian stok terbaru untuk penentuan tahun 2016

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa estimasi stoks untuk jenis tuna mata besar, madidihang, cakalang, dan albakora di Samudera Hindia sebagaimana tersebut pada Tabel 6 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 6. Estimasi tingkat pemanfaatan di Samudera Hindia

No	Jenis Ikan			Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah	
A	Tuna			
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*	Belum *overfished*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacares*	*Overfished*
3	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*	Belum *overfished*
4	Albakora	*Albacore*	*Thunnus alalunga*	Belum *overfished*

e) Tuna sirip biru selatan *(southern bluefin tuna)*

Tuna sirip biru selatan *(southern bluefin tuna)* dapat ditangkap di WPPNRI 573, dan secara khusus jenis tuna ini dikelola oleh the *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (*CCSBT*). Dalam praktek pengelolaannya, CCSBT telah menerapkan pendekatan *output control* secara ketat melalui alokasi kuota produksi tahunan bagi setiap negara anggota. Pendekatan kuota produksi tahunan dimulai sejak tahun 2008, namun penerapannya secara ketat melalui persyaratan pasar (*market requirement*) dimulai tanggal 1 Januari 2010 yakni kewajiban pelaksanaan *Catch Documentation Scheme* (*CDS*). Adapun perkembangan *Global Total Allowable Catch* (*Global* TAC) tuna sirip biru selatan yang dipergunakan sebagai dasar penentuan kuota produksi untuk setiap negara anggota CCSBT, sebagaimana tersebut pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Global Total Allowable Catch (TAC) tuna sirip biru selatan

No	Tahun	*Global Total Allowable Catch*
1	2008	11.810
2	2009	11.810
3	2010	9.749
4	2011	9.749
5	2012	10.449
6	2013	10.449
7	2014	12.449
8	2015	14.647
9	2016	14.647
10	2017	14.647
11	2018	17.647
12	2019	17.647
13	2020	17.647

Sumber : CCSBT 2018

Dari Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa dengan pendekatan penetapan *Global* TAC, estimasi stok tuna sirip biru selatan sejak tahun

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

2012 dinilai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masing-masing negara anggota memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan tangkapan, dan meminimalisir adanya tingkat kematian Tuna Sirip Biru Selatan. Hal ini memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan stok tuna, sehingga negara-negara anggota berkomitmen untuk meningkatkan kuota alokasi tangkapan.

2. Potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap dan hasil analisis P4KSI, potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang di WPPNRI tersebut di atas, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a) Tuna mata besar *(bigeye tuna)*

Potensi tuna mata besar dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) hingga saat ini belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 23.131 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 6.888 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tuna mata besar sampai tahun 2016 disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Tingkat pemanfaatan tuna mata besar (bigeye tuna) di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan tahun 2016
Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	23.131 t 6.888 t	*uncertain*
	MSY (t): F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	unknown unknown unknown unknown	

[1] Perairan kepulauan Indonesia terdiri dari WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Jadikan

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Koservasi Sumber daya Ikan (P4KSI) di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 tahun 2012, menunjukkan bahwa ukuran panjang cagak/*Fork Length* (FL) tuna mata besar yang tertangkap pukat cincin secara berturut-turut adalah 24-62 cm (mode 42 cm), huhate 26 -65 cm (mode 45 cm), pancing ulur dalam 98-177 cm (modus 128 cm), rawai tuna 80-184 cm (modus 115-119 cm). Belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun hasil analisis terhadap ukuran ikan diketahui bahwa pada alat penangkapan ikan pukat cincin terbukti bahwa 100% ikan tuna mata besar yang tertangkap merupakan ikan yuwana dengan komposisi produksi mencapai 5% dari rata-rata total tangkapan 30,29 ton/kapal/bulan.

Pada alat penangkapan ikan huhate mayoritas juga berupa ikan yuwana, namun persentasenya relatif kecil yaitu sekitar 8% dari rata-rata total produksi sebanyak 4,79 ton/kapal/bulan. Sumber daya ikan tuna mata besar yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur permukaan/tonda pada umumnya juga merupakan ikan muda, namun persentasenya 2,0% dari laju tangkap alat penangkapan ikan sebesar 0,31 ton/kapal/bulan. Oleh karena itu alat penangkapan ikan pukat cincin direkomendasikan untuk dikendalikan jumlahnya, adapun alat penangkapan ikan alternatif dan perlu dikembangkan yaitu rawai tuna, huhate, pancing ulur dalam dan pancing ulur permukaan/tonda.

Berdasarkan hasil penelitian di WPPNRI 713, 714 dan 715 tahun 2015 dengan alat tangkap Handline yang berasosiasi dengan rumpon, Tuna Mata Besar memiliki kontribusi sebesar 5.4% atau total produksi rata-rata tahun 2013-2015 adalah 22.671 kg. Sementara rata-rata ukurang yang tertangkap adalah dibawah ukurang matang gonad (*Length Maturity*), dengan rentang panjang 102-105 cmFL. Penggunaan rumpon memiliki dampak negatif terhadap komposisi penangkapan tuna, hal ini mengakibatkan banyaknya ikan tuna juvenile/belum matang gonad yang tertangkap pada perikanan yang berasosiasi dengan rumpon, terutama perikanan Tuna Mata Besar.

b) Madidihang (*yellowfin tuna*)

Potensi madidihang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) hingga saat ini belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 130.184 ton serta produksi rata-rata (2005-2016) sebanyak 24.418 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan madidihang belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 9 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 9. Tingkat pemanfaatan madidihang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan tahun 2016
Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	130.184 t 24.418 t	*uncertain*
	MSY (t): F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown unknown unknown unknown	

[1] Perairan kepulauan Indonesia terdiri dari WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Berdasarkan hasil penelitian P4KSI di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 tahun 2012 menunjukkan bahwa sumber daya madidihang yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pukat cincin mempunyai ukuran FL 31,0-67,0 cm (modus 41,0 cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan huhate mempunyai FL 17,0-88,0 cm (modus 47,5 cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur permukaan permukaan/pancing tonda mempunyai FL 22,0-63,0 cm (modus 47,5 cm), yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur dalam berkisar 106,0-153,0 cm (modus 124,0 cm) dan yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan rawai tuna di laut Banda mempunyai FL 91,0–155.0 cm (modus 107,0 cm).

Berdasarkan hasil penelitian di WPPNRI 714 pada tahun 2013 menggunakan alat tangkap *longline* didominasi oleh ikan madidihang dengan panjang total (FL) 95-165cm dengan modus ukuran 105 cm. Sebagian besar ikan madidihang yang tertangkap sudah matang gonad.

Sementara berdasarkan hasil penelitian tahun 2015 di perairan WPPNRI 713, 714 dan 715 rata-rata madidihang yang tertangkap oleh perikanan tonda (*Handline*) di sekitar rumpon adalah 103 cmFL. Madidihang sendiri berkontribusi sebesar 26.7% dari total produksi di PPS Kendari pada tahun 2013-2015.

Belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun hasil analisis terhadap ukuran ikan diketahui bahwa pada alat penangkapan ikan pukat

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

cincin terbukti bahwa 100% madidihang yang tertangkap merupakan ikan yuwana dengan komposisi produksi mencapai 26% dari rata-rata total tangkapan 30,29 ton/kapal/bulan. Pada alat penangkapan ikan huhate mayoritas yang tertangkap juga berupa ikan madidihang, namun persentasenya relatif kecil yaitu sekitar 15% dari rata-rata total produksi sebanyak 4,79 ton/kapal/bulan. Sumber daya madidihang yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pancing ulur permukaan/tonda pada umumnya juga merupakan ikan muda, namun laju tangkap alat penangkapan ikan ini sangat kecil yaitu 0,31 ton/kapal/bulan. Adapun pada alat penangkapan ikan pancing ulur dalam dan rawai tuna $L_c > L_m$. Oleh karena itu alat penangkapan ikan pukat cincin direkomendasikan untuk dikendalikan jumlahnya, adapun rawai tuna, huhate, pancing ulur dalam dan pancing ulur permukaan/tonda masih punya peluang untuk dikembangkan.

c) Cakalang (*skipjack tuna*)

Potensi cakalang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) hingga saat ini belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 266.776 ton serta produksi rata-rata (2005-2016) sebanyak 67.368 ton. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan cakalang hingga saat ini belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Tingkat pemanfaatan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan tahun 2016
Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	266.776 t 67.368 t	*uncertain*
	MSY (t): F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown unknown unknown unknown	

[1] Perairan kepulauan Indonesia terdiri dari WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan

Berdasarkan hasil penelitian P4KSI di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 tahun 2012 menunjukkan bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan mengeksploitasi sumber daya ikan cakalang adalah pukat

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

cincin, huhate, pancing tonda, dan pancing ulur permukaan. Pada umumnya alat penangkapan ikan tersebut dioperasikan dengan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon atau payos (FADs). Belum diketahui tingkat eksploitasi alat penangkapan ikan tersebut di atas, namun diketahui bahwa ukuran FL ikan cakalang yang tertangkap oleh alat penangkapan ikan pukat cincin 18-65 cm (modus 42,5 cm), huhate 24-68 cm (modus 43,5 cm) dan gabungan pancing ulur permukaan dengan pancing tonda 24-62 cm (modus 45,5 cm). Hasil analisis diketahui bahwa $L_c > L_m$ pada huhate, pancing ulur/tonda, sedangkan pada alat penangkapan ikan pukat cincin diketahui bahwa $L_c < L_m$. Direkomendasikan agar pukat cincin untuk dikendalikan/dikurangi sedangkan alat penangkapan ikan huhate, pancing ulur permukaan/tonda tetap dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian di WPPNRI 714 yang dilakukan pada tahun 2014 menggunakan alat penangkapan alat pancing tonda yang dioperasikan dengan rumpon, ikan cakalang mendominasi hasil tangkapan sebesar 67%, dengan ukuran panjang rata-rata adalah 20-70 cm. Ikan cakalang pada ukuran ini dapat dikatakan cukup besar/dewasa. Karena ukuran cakalang pertama kali matang gonad di perairan WPPNRI 715 adalah 48 cm.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 perairan kepulauan Indonesia sebagaimana tersebut pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan di WPPNRI 713, WPPNRI 714, dan WPPNRI 715

No	Nama Ikan			Estimasi Potensi	Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah		
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*	*Uncertain*	*uncertain*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacares*	*Uncertain*	*uncertain*
3	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*	*Uncertain*	*uncertain*

3. Potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan WCPFC

Berdasarkan laporan hasil penelitian komite Ilmiah WCPFC (2018), estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

a) Tuna mata besar (*bigeye tuna*)

Berdasarkan laporan pertemuan ke-14 komite Ilmiah WCPFC dapat diketahui bahwa potensi tuna mata besar dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) di seluruh wilayah pengelolaan WCPFC sebesar 158.040 mt *base case* 2015. Komite Ilmiah ke-14 mengestimasi bahwa total tangkapan tuna mata besar di WCPO pada tahun 2017 adalah 126.929 ton. Hal ini menandakan adanya penurunan 17% dari 2016 dan 19% penurunan dari rata-rata tangkapan 2012-2016. Meski begitu, status perikanan tuna mata besar berdasarkan WCPFC tidak mengalami *over fishing* atau tidak dalam kondisi *over fished*.

Sesuai dengan hasil perhitungan nilai tengah dari model perhitungan yang diperoleh F_{recent} /F_{MSY} = 0,83 dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan tuna mata besar tidak dalam keadaaan *over fished,* sebagaimana tersebut pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Tingkat pemanfaatan tuna mata besar (*bigeye tuna*) di Samudera Pasifik

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Pasifik	Produksi 2017: MSY (t): F_{curr}/F_{MSY} : SB_{latest}/SB_{MSY} : $SB_{latest}/SB_{,\ F=0}$:	126,929t 158.040 mt (124.120-204.040) 0,83 (0,54-1,76) 1,45 (0,42-2,12) 0,32 (0,08-0,44)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Pasifik = area kompetensi WCPFC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

b) Madidihang (*yellowfin tuna*)

Berdasarkan laporan pertemuan ke-13 komite Ilmiah WCPFC dapat diketahui bahwa potensi madidihang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) di seluruh wilayah pengelolaan WCPFC diperkirakan sebesar 670.890 ton/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan $F_{current}$ /F_{MSY} = 0,74 (0,54-1,13), dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan madidihang tidak *over fishing* dan tidak dalam keadaan *over fished,* sebagaimana tersebut pada Tabel 13 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 13. Tingkat pemanfaatan madidihang (*yellowfin tuna*) di Samudera Pasifik

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Pasifik	Produksi 2017: MSY (t): F_{curr}/F_{MSY} : SB_{latest}/SB_{MSY} : $SB_{latest}/SB_{, F=0}$:	670.890 mt 670.800 mt (539.200-795.200) 0,74 (0,54-1,13) 1,39 (0,80-1,91) 0,33 (0.18–0.45)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Pasifik = area kompetensi WCPFC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

c) Cakalang (*skipjack tuna*)

Berdasarkan laporan pertemuan ke-12 komite Ilmiah WCPFC dapat diketahui bahwa potensi cakalang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) di seluruh wilayah pengelolaan WCPFC diperkirakan sebesar 1.891.600 mt. Berdasarkan hasil perhitungan $F_{current}$ /F_{MSY} = 0,48 dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan cakalang tidak *over fishing* dan tidak dalam keadaan *over fished,* sebagaimana tersebut pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Tingkat pemanfaatan cakalang (skipjack tuna) di Samudera Pasifik

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2015
Samudera Pasifik	Produksi 2017: MSY (t): F_{recent}/F_{MSY} : SB_{latest}/SB_{MSY} : $SB_{latest}/SB_{curr, F=0}$:	1.624.162 mt 1.891.600 mt 0,48 (0,38-0,64) 2,15 (1,6-3,08) 0,51 (0,39-0,67)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Pasifik = area kompetensi WCPFC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan tuna mata besar, madidihang dan cakalang yang dikelola WCPFC di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagaimana tersebut pada Tabel 15 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 15. Estimasi tingkat pemanfaatan yang dikelola WCPFC di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

No	Jenis Tuna			Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah	
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*	*not overfishing, not overfished*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacares*	*not over fishing, not overfished*
3	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*	*not over fishing, not overfished*

b. Tongkol (*Neritic Tuna*)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwa estimasi potensi ikan pelagis besar non tuna cakalang di 11 WPPNRI sebagaimana tersebut pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Estimasi potensi ikan pelagis besar di 11 WPPNRI

Jenis Ikan	WPPNRI	Potensi (ribu ton/Tahun)
Pelagis besar	571	64,4
	572	276,8
	573	588,1
	711	185,9
	712	72,8
	713	645,1
	714	304,3
	715	31,7
	716	181,5
	717	65,9
	718	818,9
Jumlah		3.235,4

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pelagis besar non-tuna dan cakalang terdiri dari tongkol (tongkol lisong, tongkol krai, tongkol komo, tongkol abu-abu dan tongkol kenyar). Dengan asumsi bahwa potensi ikan pelagis besar di atas termasuk 5 (lima) jenis tongkol yang dikelola dalam RPP-TCT ini, secara umum dapat diketahui perbandingan antara produksi dan potensi tongkol pada masing-masing WPPNRI sebagaimana tersebut pada Tabel 17 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 17. Perbandingan antara produksi dan potensi tongkol pada masing-masing WPPNRI

Jenis Ikan	WPPNRI/POTENSI (ribu ton/Tahun)											
Pelagis Besar	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	Jumlah
Potensi	64,4	276,8	588,1	185,9	72,8	645,1	304,3	31,7	181,5	65,9	818,9	3.235,4
Rata-rata Produksi 2005-2016	23,84	57,48	63,14	38,31	48,50	48,26	52,42	55,60	31,65	8,56	4,28	432,04
Tingkat Pemanfaatan (%)	37	21	11	21	67	7	17	175	17	13	1	13

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Produksi:												
2005	12636	37345	54145	63277	34664	36131	30768	33888	30593	3792	1128	286,0
2006	13250	47128	45819	45082	34250	44821	40559	38495	12378	4087	3644	689,7
2007	27535	48428	62972	41853	42260	63659	55044	48699	22686	4844	9179	757,7
2008	28273	63780	69304	46473	40260	61098	62907	55243	25587	5719	1629	459,7
2009	30029	55172	80805	46577	35630	45112	44392	38287	33420	11938	2485	582,0
2010	23779	57495	58690	31532	40977	45561	42807	41464	35478	10294	2518	579,1
2011	29561	54946	75599	34424	48675	39173	54884	43817	23127	8040	3085	629,1
2012	29717	63029	69744	37868	50150	41013	53024	48924	25518	8170	4981	667,2
2013	22305	68414	69295	34698	49389	55013	57728	53595	26326	8767	5518	379,9
2014	20390	57089	63008	44265	72098	58788	60025	79349	42808	10560	7211	102,8
2015	22969	71890	57902	26292	70058	42737	64766	82518	66162	14472	4624	51,4
2016	25605	64984	50424	7348	63635	45977	62170	102881	35769	12072	5368	286,0

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap 2016 (data diolah)

1) Potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol di 11 WPPNRI

Potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol pada 11 WPPNRI dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tongkol krai (*frigate tuna*)

Potensi tongkol krai dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 184.586 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 157.053 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol krai sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*), sebagaimana tersebut pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18. Tingkat pemanfaatan tongkol krai pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016:	184.586 t	*uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	157.053 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572,WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Berdasarkan hasil penelitian P4KSI di perairan WPPNRI 572 tahun 2013 menunjukkan bahwa sumber daya ikan tongkol krai atau *frigate tuna* (*auxis thazard)* yang tertangkap dengan pukat cincin (*purse seine*) mempunyai ukuran FL antara 24,0-43,0 cm. Nilai laju eksploitasi (E) belum diketahui, namun hasil analisis terhadap ukuran panjang ikan tongkol krai yang tertangkap pukat cincin menunjukkan bahwa nilai $L_c > L_m$. Oleh karena itu, pada kasus ini pengoperasian pukat cincin tidak membahayakan stok sumber daya tongkol krai. Di wilayah perairan WPPNRI 573 tahun 2013 menunjukkan bahwa sumber daya tongkol krai yang tertangkap payang mempunyai ukuran FL 24,0-50,0 cm. Belum diketahui tingkat eksploitasi payang terhadap sumber daya tongkol krai, namun diketahui bahwa nilai $L_c > L_m$ sehingga alat penangkapan ikan payang masih dapat direkomendasikan untuk menangkap tongkol krai.

Berdasarkan hasil penelitian di perairan WPPNRI 572 tahun 2016, ikan tongkol krai atau *frigate tuna* (*auxis thazard*) yang tertangkap dengan menggunakan pukat cincin memiliki panjang total (FL) 19-45 cm atau dengan panjang rata-rata 32,91 cm. Nilai mortalitas alami (M) sebesar 1,08 per tahun, dan nilai mortalitas akibat penangkapan (F) sebesar 0,63 per tahun. Laju eksploitasi ikan tongkol krai (E) relatif rendah yaitu 0,37 sehingga eksploitasinya berpeluan untuk ditingkatkan sekitar 30% dari tingkat eksploitasi aktual tangkapan sekarang untuk mencapai pemanfaatan optimum (E=0,5).

b) Tongkol komo (*kawakawa*)

Potensi tongkol komo dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 190.566 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 158.663 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol komo sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Tingkat pemanfaatan tongkol komo pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, perairan kepulauan dan Teritorial Indonesia	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	190.566 t 158.663 t	*uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572,WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY} \leq 1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan

Hasil penelitian dari IOTC pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kawakawa yang tertangkap di WPPNRI 572 ditangkap menggunakan pukat cincin dan rumpon (FAD), dengan rata-rata panjang ikan (FL) adalah 23,5 – 61,5 cm dengan nilai eksploitasi (E) sebesar 0,78 dimana nilai ini menunjukkan bahwa terjadi padat tangkap terhadap stok kawakawa. Sumber lain dari hasil penelitian IOTC tahun 2015 di WPPNRI 572 memiliki nilai eksploitasi (E) adalah 0,65/tahun.

Hal diatas menunjukkan bahwa stok perikanan sudah mengalami padat tangkap, karena upaya penangkapan yang wajar bagi stok Kawakawa di WPPNRI 572 harus memiliki nilai eksploitasi (E) sama dengan 0,5. Jika nilai (E) lebih dari 0,5 hal tersebut dapat membahayakan jumlah stok, sehingga diperlukan adanya penurunan upaya penangkapan.

Selain itu, hasil penelitian dari IOTC tahun 2015 di WPPNRI 572 memiliki nilai pertumbuhan (K) dan panjang tubuh (Loo) lebih kecil dari 1 yang menunjukkan bahwa tipe pertumbuhan kawakawa cenderung lambat. Oleh karena itu, perencanaan mengenai jumlah usaha yang diperbolehkan tiap tahun perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pengelolaan stok yang wajar.

c) Tongkol abu-abu (*longtail tuna*)

Potensi tongkol abu-abu dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 65.651 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 99.671 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20. Tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, perairan kepulauan dan Teritorial Indonesia	Produksi 2016:	65.651 t	*uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	99.671 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY} < 1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY} \geq 1$)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq 1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian P4KSI tentang ikan tongkol abu-abu di perairan WPPNRI 711 berbasis produksi alat penangkapan ikan jaring insang diperoleh nilai Lc>Lm. Mengacu pada nilai tersebut, maka jaring insang masih dapat dipertahankan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tongkol abu-abu, meskipun nilai tingkat pemanfaatannya belum diketahui. Penelitian di perairan WPPNRI 712 menunjukkan bahwa kisaran ukuran panjang tongkol abu-abu yang tertangkap pukat cincin adalah 10-89,0 cm, dengan nilai tingkat pemanfaatan (E) yang tinggi yaitu 0,82. Nilai E yang tinggi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kondisi lebih tangkap. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk menurunkan upaya pukat cincin dalam penangkapan tongkol abu-abu. Di perairan WPPNRI 716, penggunaan alat penangkapan ikan pukat cincin untuk penangkapan tongkol abu-abu memberikan nilai Lc>Lm, dengan kisaran ukuran panjang ikan yang tertangkap antara 14,5-86,5 cm. Nilai tersebut memberikan indikasi bahwa pengembangan perikanan pukat cincin masih dimungkinkan dengan disertai pemantauan yang intens terhadap produksi.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2015 di WPPNRI 571 dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin dan jaring insang, diperoleh nilai Lc=40,34cm > Lm=38,9 cm. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertama kali ikan tongkol yang tertangkap dengan pukat cincin lebih besar dari panjang pertama kali matang gonad. Laju pertumbuhan ikan tongkol abu-abu (K) adalah 1,5/tahun, dan laju kematian total (Z) sebesar 4,06/tahun. Laju eksploitasi pada saat ini sebesar 0,51 atau berada pada tingkat optimal.

d) Lisong (*bullet tuna*)

Potensi lisong dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2012 sebanyak 33.625 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 15.539 ton/tahun. Dalam hal ini tingkat pemanfaatan lisong sampai tahun 2016 disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 21 di bawah ini.

Tabel 21. Tingkat pemanfaatan lisong pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, perairan	Produksi 2016:	33.625 t	*uncertain*

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

kepulauan dan Teritorial Indonesia	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	15.539 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572,WPPNRI 573, WPPNRI 711,WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian P4KSI di perairan WPPNRI 572 tahun 2013 menunjukkan bahwa sumber daya ikan tongkol lisong yang tertangkap dengan pukat cincin (*purse seine*) mempunyai ukuran FL antara 11,0-42,0 cm. Hasil analisis menggunakan analitik model menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi ikan tongkol lisong masih tergolong kategori rendah dengan indikator nilai laju eksploitasi (E) = 0,49. Namun jika dianalisis ukuran panjang ikan tongkol lisong yang tertangkap pukat cincin menunjukkan bahwa nilai $L_c<L_m$. Oleh karena itu, terkait pemanfaatan sumber daya lisong, alat penangkapan ikan pukat cincin mini direkomendasikan untuk dikendalikan atau dikurangi. Hasil penelitian di perairan WPPNRI 573 tahun 2013 menunjukkan bahwa sumber daya ikan tongkol lisong yang tertangkap oleh payang dan pukat cincin mempunyai ukuran FL 13,0-34,0 cm. Tingkat eksploitasi oleh payang dan pukat cincin belum menunjukkan padat tangkap dengan indikasi nilai E=0,42 dan $L_c>L_m$ sehingga alat penangkapan ikan payang dan pukat cincin masih dapat direkomendasikan untuk dipertahankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 di WPPNRI 572, komposisi ikan tongkol lisong hasil alat tangkap pukat cincin, tonda, jaring insang, bagan dan payang terdiri dari ikan dewasa sebanyak 53% dan ikan belum dewasa 47%. Lisong dikatakan dewasa jika mempunyai panjang > 24cm FL. Sementara ikan yang tertangkap memiliki rata-rata panjang cagak (FL) 11-42 cm. Nilai eksploitasi (E) tongkol lisong pada WPPNRI 572 adalah 0,49/tahun atau berada pada tingkat eksploitasi moderat. Pola rekrutmen tongkol lisong terjadi dua kali dalam setahunnya, yaitu mencapai puncak pada Maret dan Juni.

e) Tenggiri (*narrow barred spanish mackerel*)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Potensi tenggiri dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 120.645 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 132.134 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tenggiri sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 22 di bawah ini.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 22. Tingkat pemanfaatan tenggiri pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	120.645 t 132.134 t	*uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572,WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian P4KSI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di perairan WPPNRI 716 tertangkap sumber daya ikan tenggiri (*scomberomorus commerson*) oleh alat penangkapan ikan pukat cincin mini (*mini purse seine*) dan pancing ulur (*handline*) dengan ukuran FL 25.0–138.0 cm. Hasil analisis menggunakan analitik model menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi ikan tenggiri (*S.commerson*) masih tergolong kategori rendah dengan indikator nilai laju eksploitasi (E) = 0,39. Namun jika dianalisis ukuran panjang ikan tenggiri yang tertangkap menghasilkan nilai $L_c<L_m$ untuk alat penangkapan ikan pukat cincin mini dan nilai $L_c>L_m$ untuk alat penangkapan ikan pancing ulur/*handline*.

Hal ini mengindikasikan bahwa alat penangkapan ikan pukat cincin mini direkomendasikan untuk dikendalikan/dikurangi, sedangkan untuk pancing ulur masih dapat dikembangkan. Hasil penelitian di perairan WPPNRI 573 tahun 2013 menunjukkan sumber daya ikan tenggiri papan atau *indo-pacific king mackerel* (*S.guttatus*) yang tertangkap jaring insang hanyut mempunyai ukuran FL 11,7-66,6 cm. Belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun diperoleh informasi bahwa nilai $L_c<L_m$, sehingga direkomendasikan untuk mengendalikan pengembangan jaring insang hanyut dalam mengekploitasi tenggiri papan di WPPNRI 573.

f) Tenggiri papan (*indo-pacific king mackerel*)

Potensi tenggiri papan dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 19.716 ton dan produksi tahun 2005-2016

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nasional

rata-rata sebanyak 22.912 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol tenggiri papan sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23. Tingkat pemanfaatan tenggiri papan pada 11 WPPNRI

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
ZEEI, Perairan Kepulauan dan teritorial Indonesia	Produksi 2016:	19.716 t	*uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	22.912 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

11 Wilayah pengelolaan terdiri dari WPPNRI 571, WPPNRI 572,WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Sumber : Pusat Penelitian, Pengelolaan, Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan tongkol pada 11 WPPNRI seperti Tabel 24 di bawah ini.

Tabel 24. Tingkat pemanfaatan tongkol pada 11 WPPNRI

No	Nama Ikan			Estimasi Stok
	Indonesia	Inggris	Ilmiah	
1	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*	*Uncertain*
2	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynunus affinis*	*Uncertain*
3	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*	*Uncertain*
4	Lisong	*Bullet Tuna*	*Auxis rochei*	*Uncertain*
5	Tenggiri	*Narrow-barred spanish macherel*	*Scomberomorus commerson*	*Uncertain*
6	Tenggiri papan	*Indo-pacific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*	*Uncertain*

2) Potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol yang dikelola IOTC

Mengingat spesies yang dikelola IOTC juga mencakup 4 (empat) jenis tongkol dan 2 (dua) jenis tenggiri, maka potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol juga ditentukan berdasarkan WPPNRI sebagai berikut:

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Berdasarkan laporan hasil penelitian komite Ilmiah IOTC (2018), potensi dan tingkat pemanfaatan masing-masing jenis tongkol di seluruh wilayah pengelolaan IOTC termasuk WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Tongkol krai (*frigate tuna*)

Potensi tongkol krai dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2018 sebanyak 74.686 ton dan produksi Tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 86.117 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol krai sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain)*, sebagaimana tersebut pada Tabel 25 di bawah ini.

Tabel 25. Tingkat pemanfaatan tongkol krai di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017:	74.686 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	86.117 t	
	MSY :	Unknown	
	$F_{current}/F_{MSY}$:	Unknown	
	$SB_{current}/SB_{MSY}$:	Unknown	
	$SB_{current}/SB_0$:	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

b. Tongkol komo (*kawakawa*)

Potensi tongkol komo dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 159.752 ton dan produksi Tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 157.300 ton/tahun. Meski kondisi stok dikatakan tidak mengalami *over fished* atau tidak

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

mengarah kepada *over fished* (Tabel 26), model yang dikembangkan pada 2015 menunjukkan bahwa 96% kemungkinan bahwa jumlah biomasa stok perikanan berada dibawah produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan 100% kemungkinan bahwa $F>F_{MSY}$ hingga 2016 dan 2023 jika tangkapan diatur pada tingkat tangkapan tahun 2013.

Tabel 26. Tingkat pemanfaatan tongkol komo di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017: Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	159.752 t 157.300 t	
	MSY (1000t): F_{2013}/F_{MSY} : SB_{2013}/SB_{MSY} : SB_{2013}/SB_0 :	152 (125-188) 0,98 (0,85-1,11) 1,15 (0,97-1,38) 0,58 (0,33-0,86)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

c. Tongkol abu-abu (*longtail tuna*)

Potensi tongkol abu-abu dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 135.006 ton dan produksi Tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 139.856 ton/tahun. Dalam hal ini tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu sampai tahun 2017, disimpulkan dalam keadaan *over fished* sebagaimana tersebut pada Tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27. Tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Penentuan tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017: Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	135.006 t 139.856 t	

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	MSY : F_{2015}/F_{MSY} : SB_{2015}/SB_{MSY} : SB_{2015}/SB_0 :	140 (103-184) 1,04 (0,84-1,46) 10,94 (0,68-1,16) 0,48 (0,34-0,59)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

d. Lisong (*bullet tuna*)

Potensi Lisong dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 11.094 ton dan produksi Tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 9.959 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan lisong sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28. Tingkat pemanfaatan lisong di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017: Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	11.094 t 9.959 t	*Uncertain*
	MSY : $F_{current}/F_{MSY}$: $SB_{current}/SB_{MSY}$: $SB_{current}/SB_0$:	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih		

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nasskah

(*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq 1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

e. Tenggiri (*narrow-barred spanish mackerel*)

Potensi tenggiri dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 159.370 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 160.812 ton/tahun. Ada resiko tinggi terus-menerus dari nilai eksploitasi yang melebihi batas MSY hingga 2025 nanti. Meskipun jumlah tangkapan dikurangi 80% hingga pada angka tahun 2015 (73% resiko nilai $SB_{2025}<SB_{MSY}$ dan 99% resiko bahwa $F_{2025}>F_{MSY}$), sehingga dapat dikatakan over exploited seperti ditunjukkan pada Tabel 29 di bawah ini.

Tabel 29. Tingkat pemanfaatan tenggiri di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017:	159.370 t	
	Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	160.812 t	
	MSY (1000 t) :	131 (96-180)	
	F_{2015}/F_{MSY} :	1,28 (1,03-1,69)	
	SB_{2015}/SB_{MSY} :	0,89 (0,63-1,15)	
	SB_{2015}/SB_0 :	0,44 (0,31-0,57)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

f. Tenggiri papan (*indo-pacific king mackerel*)

Potensi tenggiri papan dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 49.905 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 46.814 ton/tahun. Dalam hal ini tingkat pemanfaatan tenggiri papan sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain)* sebagaimana tersebut pada Tabel 30 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Publikasi

Tabel 30. Tingkat pemanfaatan tenggiri papan di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi[2] 2017:	49.905 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata[2] 2013 - 2017:	46.814 t	
	MSY (1000 t) :	Unknown	
	F_{MSY} :	Unknown	
	$SB_{current}/SB_{MSY}$:	Unknown	
	$SB_{current}/SB_0$:	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Nominal tangkapan mewakili jumlah yang diperkirakan oleh Sekretariat IOTC. Jika data tersebut tidak dilaporkan oleh CPC, Sekretariat IOTC memperkirakan jumlah tangkapan total dari beragam sumber termasuk data upaya tangkap sebagian; data dalam FAO FishStat; perkiraan tangkapan IOTC melalui pengambilan contoh di pelabuhan; data yang ditampilkan dalam halaman web; data yang dilaporkan oleh pihak lain dalam aktivitas penangkapan, dan data yang diperoleh melalui pengambilan contoh pada tempat pendaratan ikan maupun data dari pemantau ilmiah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan tongkol yang dikelola IOTC di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31. Tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

No	Jenis Ikan			Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah	
1	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*	*Uncertain*
2	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynnus affinis*	Tidak mengalami *over fished*
3	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*	*Over fished*
4	Lisong	*Bullet tuna*	*Auxis rochei*	*Uncertain*
5	Tenggiri	*Narrow-barred soanish mackerel*	*Scomberomorus commerson*	*Over fished*
6	Tenggiri papan	*Indo-pasific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*	*Uncertain*

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

3) Potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

a. Tongkol krai (*frigate tuna*)

Potensi tongkol krai dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 21.370 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 5.572 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol krai sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 32 di bawah ini.

Tabel 32. Tingkat pemanfaatan tongkol krai di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2016:	21.370 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	5.572 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

b. Tongkol Komo (*kawakawa*)

Potensi tongkol komo dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 21.478 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 7.522 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol komo sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 33 di bawah ini.

Tabel 33. Tingkat pemanfaatan tongkol komo di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2012:	21.478 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	7.522 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

c. Tongkol abu-abu (*longtail tuna*)

Potensi tongkol abu-abu dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 2.424 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 7.176 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 34 di bawah ini.

Tabel 34. Tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	2.424 t 7.176 t	*Uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

d. Lisong (*bullet tuna*)

Potensi Lisong dalam bentuk produksi maksimum lestari/Maximum Sustainable Yield (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 2.359 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 850 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan lisong sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan (uncertain), sebagaimana tersebut pada Tabel 35 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 35. Tingkat pemanfaatan lisong di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2016:	2.359 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	850 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

e. Tenggiri (*narrow-barred spanish mackerel*)

Potensi tenggiri dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 10.337 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 4.402 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tenggiri sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 36 di bawah ini.

Tabel 36. Tingkat pemanfaatan tenggiri di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2016:	10.337 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	4.402 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Wasnah

f. Tenggiri papan (*indo-pacific king mackerel*)

Potensi tenggiri papan dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 2.260 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 637 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tenggiri papan sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain)* sebagaimana tersebut pada Tabel 37 di bawah ini.

Tabel 37. Tingkat pemanfaatan tenggiri papan di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Produksi 2016:	1.374 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	637 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan tongkol yang berkaitan dengan wilayah pengelolaan WCPFC di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagaimana tersebut pada Tabel 38 di bawah ini.

Tabel 38. Estimasi tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

No	Jenis Ikan			Estimasi Potensi (MSY)	Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah		
1	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*	*Uncertain*	*Uncertain*
2	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynnus affinis*	*Uncertain*	*Uncertain*
3	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*	*Uncertain*	*Uncertain*
4	Lisong	*Bullet tuna*	*Auxis rochei*	*Uncertain*	*Uncertain*
5	Tenggiri	*Narrow-barred soanish mackerel*	*Scomberomorus commerson*	*Uncertain*	*Uncertain*

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Lajakah

6	Tenggiri papan	*Indo-pasific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*	*Uncertain*	*Uncertain*

4) Potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

a. Tongkol krai (*frigate tuna*)

Potensi tongkol krai dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 86.010 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 88.443 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol krai sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 39 di bawah ini.

Tabel 39. Tingkat pemanfaatan tongkol krai di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	86.010 t 88.443 t	*Uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

b) Tongkol komo (*kawakawa*)

Potensi tongkol komo dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 134.577 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 91.488 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol komo sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 40 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Lelang

Tabel 40. Tingkat pemanfaatan tongkol komo di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2016:	134.577 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	91.488 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

C. Tongkol abu-abu (*longtail tuna*)

Potensi tongkol abu-abu dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 41.776 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 59.403 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 41 di bawah ini.

Tabel 41. Tingkat pemanfaatan tongkol abu-abu di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2016:	41.776 t	*Uncertain*
	Produksi rata-rata 2005 - 2016:	59.403 t	
	MSY :	Unknown	
	F_{2016}/F_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_{MSY} :	Unknown	
	SB_{2016}/SB_0 :	Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nilai

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

D. Lisong (*bullet tuna*)

Potensi lisong dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 24.542 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 8.253 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan lisong sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*), sebagaimana tersebut pada Tabel 42 di bawah ini.

Tabel 42. Tingkat pemanfaatan lisong di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	24.542 t 8.253 t	*Uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

E. Tenggiri (narrow-barred spanish macherel)

Potensi tenggiri dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 78.147 ton dan produksi Tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 96.259 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tenggiri sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain),* sebagaimana tersebut pada Tabel 43 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 43. Tingkat pemanfaatan tenggiri di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2012: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	78.147 t 96.259 t	*Uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

F. Tenggiri Papan (indo-pacific king mackerel)

Potensi tenggiri papan dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi tahun 2016 sebanyak 8.248 ton dan produksi tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 11.667 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan tenggiri papan sampai tahun 2016, disimpulkan belum dapat ditentukan *(uncertain)* sebagaimana tersebut pada Tabel 44 di bawah ini.

Tabel 44. Tingkat pemanfaatan tenggiri papan di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPP 718

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2016
WPPNRI 711, 712, 713, 714, 715 dan 718	Produksi 2016: Produksi rata-rata 2005 - 2016:	8.248 t 11.667 t	*Uncertain*
	MSY : F_{2016}/F_{MSY} : SB_{2016}/SB_{MSY} : SB_{2016}/SB_0 :	Unknown Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nasional

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada tabel 45 di bawah ini.

Tabel 45. Tingkat pemanfaatan tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718

No	Jenis Ikan			Estimasi Potensi (MSY)	Estimasi Tingkat Pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah		
1	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*	*Uncertain*	*Uncertain*
2	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynnus affinis*	*Uncertain*	*Uncertain*
3	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*	*Uncertain*	*Uncertain*
4	Lisong	*Bullet tuna*	*Auxis rochei*	*Uncertain*	*Uncertain*
5	Tenggiri	*Narrow-barred spanish mackerel*	*Scomberomorus commerson*	*Uncertain*	*Uncertain*
6	Tenggiri papan	*Indo-pasific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*	*Uncertain*	*Uncertain*

2. Komposisi

Komposisi produksi ditentukan berdasarkan berdasarkan jumlah produksi Tahun 2005-2016. Komposisi produksi diuraikan secara nasional dan berdasarkan WPPNRI baik untuk tuna dan cakalang maupun untuk tongkol *(neritic tuna).*

a. Komposisi produksi untuk tuna dan cakalang

1) Komposisi produksi tuna dan cakalang secara Nasional

Komposisi produksi tuna dan cakalang secara Nasional sebagaimana tersebut pada Tabel 46 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 46. Komposisi produksi tuna dan cakalang secara Nasional

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)										Total
	Cakalang	%	Madidihang	%	Tuna mata Besar	%	Albakor	%	SBT	%	
2005	223.267	58,58	119.121	31,26	27.622	7,25	9.825	2,58	1.831	0,48	381126
2006	279.143	70,43	79502	20,06	29.003	7,32	7.950	2,01	747	0,19	396345
2007	301.531	67,59	97.696	21,9	36.441	8,17	9.367	2,1	1.079	0,24	446114
2008	281.476	68,67	83.553	20,39	35.493	8,66	8.460	2,06	891	0,22	409873
2009	355.624	68,44	106.932	20,58	42.321	8,15	14.073	2,71	641	0,12	519591
2010	348.895	67,73	112.803	21,9	40.427	7,85	12.504	2,43	474	0,09	515103
2011	372.211	60,66	176.754	28,81	52.427	8,54	11.483	1,87	700	0,11	613575
2012	429.024	60,8	191.047	27,08	73.603	10,43	11.028	1,56	910	0,13	705612
2013	481.014	61,15	219.816	27,94	78.142	9,93	6.295	0,8	1.382	0,18	786649
2014	496.682	61,28	217.839	26,88	88.037	10,86	6.973	0,86	1.015	0,13	810546
2015	415.061	62,36	189.931	28,54	52.659	7,91	7304	1,1	593	0,09	665548
2016	440.812	61,85	209.227	29,36	54.848	7,7	7180	1,01	601	0,08	712668
Rata-rata	368728	64,13	150352	25,39	50919	8,56	9.370	1,76	905,33	0,17	580229

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 46 di atas, dapat diketahui bahwa secara nasional hasil komposisi produksi berturut-turut didominasi oleh cakalang (64,13%), madidihang (25,39%), tuna mata besar (8,56%), tuna albakora (1,76%) dan tuna sirip biru selatan (0.17%).

2) Komposisi produksi tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI

a) Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Tabel 47 di bawah ini.

Tabel 47. Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)										Total
	Madidihang	%	Cakalang	%	Tuna mata Besar	%	Albakora	%	SBT	%	
2005	59374	44,81	48671	36,73	13337	10,07	9285	7,01	1831	1,38	132498
2006	25486	25,76	50518	51,06	14247	14,40	7950	8,03	747	0,75	98948

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nasional

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)										Total
	Madidihang	%	Cakalang	%	Tuna mata Besar	%	Albakora	%	SBT	%	
2007	34188	29,08	52252	44,44	20697	17,60	9367	7,97	1079	0,92	117583
2008	24092	24,48	48100	48,88	16860	17,13	8460	8,60	891	0,91	98403
2009	25559	19,12	69806	52,21	23619	17,67	14073	10,53	641	0,48	133698
2010	47926	30,99	68466	44,27	25296	16,36	12504	8,08	474	0,31	154666
2011	38511	23,75	84601	52,17	26859	16,56	11483	7,08	700	0,43	162154
2012	38533	22,62	87333	51,27	32540	19,10	11028	6,47	910	0,53	170344
2013	61380	30,84	94437	47,46	35505	17,84	6295	3,16	1382	0,69	198999
2014	45122	28,63	72088	45,74	32412	20,56	6973	4,42	1015	0,64	157610
2015	40571	27,40	80938	54,66	18665	12,61	7301	4,93	593	0,40	148068
2016	36799	26,49	72206	51,98	22135	15,93	7177	5,17	601	0,43	138918
Rata-rata	36.709	25,73	63.718	44,67	21.462	15,04	9.325	6,54	947	0,66	142.657

Sumber :Statistik Perikanan Tangkap 2016

Dari Tabel 47 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 berturut-turut didominasi oleh cakalang (44,67%), madidihang (25.73%), tuna mata besar (15,04%), albakora (6,54%) dan tuna sirip biru selatan (0,66%).

b) Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 sebagaimana tersebut pada Tabel 48 di bawah ini.

Tabel 48. Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)										Total
	Cakalang	%	Madidihang	%	Tuna mata Besar	%	Albakora	%	SBT	%	
2005	120.920	73,42	35.111	21,32	8.660	5,26					164.691
2006	141.592	75,55	35.632	19,01	10.183	5,43					187.407
2007	172.110	77,03	43.971	19,68	7.350	3,29					223.431
2008	158.221	74,89	42.857	20,29	10.191	4,82					211.269
2009	207.704	76,80	49.997	18,49	12.735	4,71					270.436
2010	202.821	78,72	42.536	16,51	12.281	4,77					257.638
2011	214.112	64,61	101.666	30,68	15.623	4,71					331.401
2012	256.342	65,01	107.109	27,16	30.869	7,83					394.320
2013	265.189	65,26	111.622	27,47	29.566	7,28					406.377
2014	220.335	65,62	91.232	27,17	24.208	7,21					335.775
2015	199.118	63,91	87.109	27,96	25.356	8,14					311.583

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)										Total
	Cakalang	%	Madidihang	%	Tuna mata Besar	%	Albakora	%	SBT	%	
2016	266.776	63,50	130.184	30,99	23.131	5,51					420.091
Rata-rata	202.103	70,36	73.252	23,89	17.513	5,75					292.868

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 48 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 berturut-turut didominasi oleh cakalang (75,00%), madidihang (21,59%), tuna mata besar (3,41%).

c) Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagaimana tersebut pada Tabel 49 di bawah ini.

Tabel 49. Komposisi Produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)										Total
	Cakalang	%	Madidihang	%	Tuna mata Besar	%	Albakora	%	SBT	%	
2005	52.283	65,26	24.339	30,38	3.487	4,35					80.109
2006	75.718	79,15	15.408	16,11	4.533	4,74					95.659
2007	71.008	73,92	18.870	19,64	6.183	6,44					96.061
2008	72.344	76,32	16.336	17,23	6.116	6,45					94.796
2009	72.281	66,76	30.673	28,33	5.318	4,91					108.272
2010	70.814	75,64	21.620	23,09	1.191	1,27					93.625
2011	64.491	59,67	35.360	32,72	8.228	7,61					108.079
2012	70.637	59,73	39.579	33,47	8.045	6,80					118.261
2013	108.370	68,09	40.242	25,28	10.545	6,63					159.157
2014	125.763	65,78	51.644	27,01	13.768	7,20					191.175
2015	90.276	60,99	50.972	34,44	6.760	4,57					148.008
2016	74.878	65,22	33.731	29,38	6.194	5,40					114.803
Rata-Rata	79.072	68,04	31.565	26,42	6.697	5,53					117.334

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap 2016 (data diolah)

Dari Tabel 49 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 berturut-turut didominasi oleh cakalang (68,04%), madidihang (26,42%), dan tuna mata besar (5,53%).

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

b. Komposisi produksi tongkol (*Neritic tuna*)

1) Komposisi produksi tongkol di 11 WPPNRI

Komposisi produksi tongkol secara Nasional di 11 WPPNRI sebagaimana tersebut pada Tabel 50 di bawah ini.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 50. Komposisi produksi tongkol di 11 WPPNRI

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)												Jumlah
	Lisong	%	Tongkol krai	%	Tongkol komo	%	Tongkol abu-abu	%	Tenggiri	%	Tenggiri papan	%	
2005	17	0,00	130.181	26,43	86.459	17,55	121.792	24,73	131.225	26,64	22.903	4,65	492.577
2006	553	0,12	115.111	24,66	118.470	25,38	95.327	20,42	114.214	24,47	23.081	4,94	466.756
2007	3.712	0,65	134.593	23,56	143.101	25,05	145.587	25,48	115.424	20,20	28.928	5,06	571.345
2008	3.604	0,63	123.882	21,53	159.450	27,72	135.801	23,61	128.147	22,28	24.379	4,24	575.263
2009	5.369	0,94	148.663	26,12	154.487	27,15	114.863	20,18	120.997	21,26	24.721	4,34	569.100
2010	3.696	0,67	132.733	23,94	141.190	25,47	112.556	20,30	140.277	25,30	23.927	4,32	554.379
2011	7.434	1,31	145.541	25,62	145.838	25,67	117.783	20,74	132.705	23,36	18.731	3,30	568.032
2012	14.722	2,50	158.001	26,87	172.740	29,37	84.022	14,29	141.557	24,07	17.018	2,89	588.060
2013	32.491	5,25	192.943	31,20	153.193	24,77	70.842	11,46	151.648	24,52	17.259	2,79	618.376
2014	45.005	6,29	204.491	28,57	208.522	29,13	55.589	7,77	165.808	23,16	36.417	5,09	715.832
2015	36.243	5,47	205.051	30,92	201.427	30,38	78.483	11,84	124.137	18,72	17.736	2,67	663.077
2016	33.625	5,53	184.586	30,36	190.566	31,34	65.651	10,80	113.839	18,72	19.716	3,24	607.983
Rata-rata	15.539	2,45	156.315	26,65	156.287	26,58	99.858	17,63	131.665	22,73	22.901	3,96	582.565

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 50 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara Nasional hasil komposisi produksi berturut-turut didominasi oleh tongkol krai (26,65%), tongkol komo (26,58%), tenggiri (22,73%), tongkol abu-abu (17,63%), tenggiri papan (3,96%) dan lisong (2,45%).

2) Komposisi produksi tongkol berdasarkan WPPNRI

a) Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Tabel 51 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 51. Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)												Jumlah
	Lisong	%	Tongkol krai	%	Tongkol komo	%	Tongkol abu-abu	%	Tenggiri	%	Tenggiri papan	%	
2005	9	0,01	43.003	30,62	30.335	21,60	30.779	21,91	26.879	19,14	9.454	6,73	140.459
2006	539	0,38	34.271	24,04	38.576	27,06	32.806	23,01	26.794	18,80	9.560	6,71	142.546
2007	3.351	1,88	43.490	24,36	54.081	30,29	37.915	21,24	23.627	13,23	16.083	9,01	178.547
2008	3.022	1,56	54.981	28,45	79.436	41,11	18.743	9,70	23.798	12,32	13.254	6,86	193.234
2009	4.909	2,46	50.963	25,52	75.638	37,88	34.379	17,22	21.730	10,88	12.066	6,04	199.685
2010	3.505	2,01	51.889	29,81	60.385	34,69	24.088	13,84	22.577	12,97	11.632	6,68	174.076
2011	6.203	3,19	64.066	32,95	50.791	26,12	38.585	19,84	25.936	13,34	8.853	4,55	194.434
2012	12.131	6,12	71.118	35,85	50.510	25,46	26.658	13,44	30.553	15,40	7.389	3,73	198.359
2013	23.386	11,76	73.044	36,73	38.747	19,48	23.645	11,89	34.061	17,13	6.004	3,02	198.887
2014	27.934	15,58	46.690	26,05	43.511	24,27	20.901	11,66	32.016	17,86	8.205	4,58	179.257
2015	13.429	7,12	70.705	37,50	40.547	21,50	25.757	13,66	30.297	16,07	7.833	4,15	188.568
2016	6.724	3,85	77.206	44,26	34.511	19,78	21.451	12,30	25.355	14,53	9.208	5,28	174.455
Rata-rata	8.762	4,66	56.786	31,34	49.756	27,44	27.976	15,81	26.969	15,14	9.962	5,61	180.209

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 51 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 berturut-turut didominasi oleh tongkol komo (31,2%), tongkol krai (31,34%), tongkol abu-abu (15,81 %), tenggiri (15,14 %), tenggiri papan (5,61%) dan lisong (4,66 %).

b) Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Tabel 52 di bawah ini.

Tabel 52. Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)												Jumlah
	Lisong	%	Tongkol krai	%	Tongkol komo	%	Tongkol abu-abu	%	Tenggiri	%	Tenggiri papan	%	
2005	8	0,00	81.959	26,16	51.750	16,52	66.221	21,14	100.763	32,16	12.593	4,02	313.294
2006	14	0,00	73.837	24,31	74.816	24,64	58.137	19,14	84.172	27,72	12.694	4,18	303.670
2007	361	0,10	82.043	22,79	84.523	23,48	93.699	26,03	87.700	24,36	11.657	3,24	359.983
2008	582	0,17	63.795	18,55	72.518	21,09	98.354	28,60	98.422	28,62	10.253	2,98	343.924
2009	442	0,14	90.299	28,71	67.475	21,46	53.974	17,16	91.017	28,94	11.272	3,58	314.479
2010	174	0,05	71.711	22,43	72.037	22,53	60.665	18,97	103.744	32,45	11.393	3,56	319.724

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)												Jumlah
	Lisong	%	Tongkol krai	%	Tongkol komo	%	Tongkol abu-abu	%	Tenggiri	%	Tenggiri papan	%	
2011	1.211	0,37	71.269	21,53	86.363	26,09	65.004	19,64	98.219	29,67	8.944	2,70	331.010
2012	2.587	0,76	80.530	23,56	108.888	31,86	43.705	12,79	97.856	28,63	8.255	2,42	341.821
2013	7.613	2,06	107.845	29,20	99.012	26,81	41.151	11,14	103.814	28,11	9.862	2,67	369.297
2014	15.560	3,33	142.309	30,41	129.921	27,76	33.413	7,14	120.115	25,67	26.637	5,69	467.955
2015	14.816	3,84	109.024	28,29	115.970	30,09	50.639	13,14	86.749	22,51	8.190	2,13	385.388
2016	24.542	6,57	86.010	23,04	134.577	36,05	41.776	11,19	78.147	20,93	8.248	2,21	373.300
Rata-rata	5.659	1,45	88.386	24,92	91.488	25,70	58.895	17,17	95.893	27,48	11.667	3,28	351.987

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 52 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa komposisi produksi tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718 berturut-turut didominasi oleh tenggiri (27,48%) tongkol komo (25,70%), tongkol krai (24,92%), tongkol abu-abu (17,17%), tenggiri papan (3,28%) dan lisong (1,45%).

c) Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagaimana tersebut pada Tabel 53 di bawah ini.

Tabel 53. Komposisi produksi tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)												Jumlah
	Lisong	%	Tongkol krai	%	Tongkol komo	%	Tongkol abu-abu	%	Tenggiri	%	Tenggiri papan	%	
2005	-	-	5.219	13,44	4.374	11,27	24.792	63,86	3.583	9,23	856	2,20	38.824
2006	-	-	7.003	34,09	5.078	24,72	4.384	21,34	3.248	15,81	827	4,03	20.540
2007	-	-	9.060	27,61	4.497	13,70	13.973	42,58	4.097	12,49	1.188	3,62	32.815
2008	-	-	5.106	13,40	7.496	19,67	18.704	49,09	5.927	15,55	872	2,29	38.105
2009	18	0,03	7.401	13,47	11.374	20,70	26.510	48,26	8.250	15,02	1.383	2,52	54.936
2010	17	0,03	9.133	15,08	8.768	14,47	27.803	45,90	13.956	23,04	902	1,49	60.579
2011	20	0,05	10.206	23,96	8.684	20,39	14.194	33,33	8.550	20,08	934	2,19	42.588
2012	4	0,01	6.353	13,27	13.342	27,87	13.659	28,53	13.148	27,46	1.374	2,87	47.880
2013	1.492	2,97	12.054	24,02	15.434	30,75	6.046	12,05	13.773	27,44	1.393	2,78	50.192
2014	1.511	2,20	15.492	22,58	35.090	51,14	1.275	1,86	13.677	19,93	1.575	2,30	68.620
2015	7.998	8,97	25.322	28,41	44.910	50,39	2.087	2,34	7.091	7,96	1.713	1,92	89.121
2016	2.359	3,92	21.370	35,48	21.478	35,66	2.424	4,02	10.337	17,16	2.260	3,75	60.228
Rata-rata	1.677	2,27	11.143	22,07	15.044	26,73	12.988	29,43	8.803	17,60	1.273	2,66	50.369

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 53 di atas, dapat diketahui bahwa komposisi produksi tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 berturut-turut didominasi oleh tongkol abu-abu (29,43%), tongkol komo (26,73%), tongkol krai (22,07%),

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

tenggiri (17,60%), tenggiri papan (2,66%) dan lisong (1,67%).

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

3. Distribusi

Tuna merupakan jenis ikan beruaya jauh (*highly migratory species*) sebagaimana dikemukakan Rothschild (1965), Fink and Bayliff (1970), Bayliff (1984), Williams (1972), Forsbergh (1988), Blunt and Messersmith (1960), Schaefer *et al.* (1961), Bayliff (1970), Joseph *et al.* (1964), Bayliff (1984), Miyabe and Bayliff (1987), Kawasaki (1958; 1960), Kume and Morita (1967), Kume (1967), Honma and Kamimura (1955), Kamimura and Honma (1953). Peta migrasi tuna merupakan:

a. Hasil kerjasama penelitian melalui penandaan tuna (*tuna tagging*) P4KSI-SPC-WCPFC (2009-2010) yang menunjukkan bahwa tuna beruaya timbal balik antar perairan WPPNRI Pasifik dan juga antara WPPNRI Pasifik dengan perairan di luar WPPNRI (perairan PNG, Palau dll);

b. Hasil program observer LPPT-P4KSI;

c. Dokumen RFMO-WCPFC; dan

d. Hasil penelitian lainnya sebagaimana terdapat pada Lee *et al.* (http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc99/proceed/papers/pap564/p564.htm)

Berdasarkan hasil penelitian oleh P4KSI, dapat diuraikan informasi mengenai migrasi dan distribusi tuna di perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta migrasi tongkol di WPPNRI, sebagai berikut:

a. Tuna dan Cakalang

1) WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 (Samudera Hindia)

Berdasarkan hasil observer program pada Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT)-P4KSI menunjukkan bahwa penyebaran tuna berdasarkan operasi armada rawai tuna yang berbasis di Benoa tahun 2005-2013 adalah sebagaimana tersebut pada Gambar 2.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

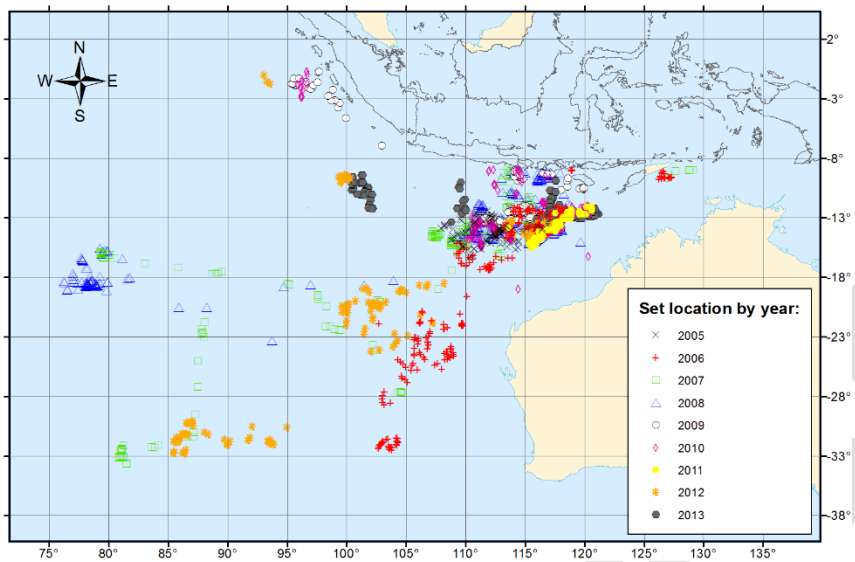

Gambar 2. Posisi setting armada rawai tuna yang berbasis di Benoa periode 2005-2013

Program *scientific observer* telah dilaksanakan dari tahun 2005 sampai saat ini. Area yang dicover oleh program *scientific observer* mulai dari 0°LU - 34°LS dan 75°BT - 132°BT, dengan konsentrasi wilayah di 10° - 20°LS dan 110° - 120°BT. Jarak terjauh dari observasi ini terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2012. Area terkecil yang diobservasi terjadi pada tahun 2011.

Berikut ini disampaikan distribusi tuna di WPPNRI 571, WPPNRI 572, dan WPPNRI 573.

a) Madidihang

Hasil penelitian LPPT-P4KSI menunjukkan bahwa distribusi madidihang berdasarkan produksi rawai tuna yang berbasis di Benoa tahun 2005-2013 adalah sebagaimana tersebut pada Gambar 3. Sumber daya madidihang cukup banyak terdapat di perairan WPPNRI 572 khususnya sebelah barat Bungus dan Sibolga dengan indikasi bahwa laju pancing rawai tuna di perairan tersebut mencapai kisaran 0,12 – 0,22 ekor ikan per 100 mata pancing per tawur. Di perairan sebelah selatan Jawa, khususnya Jawa Timur serta selatan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menunjukkan situasi yang sama.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

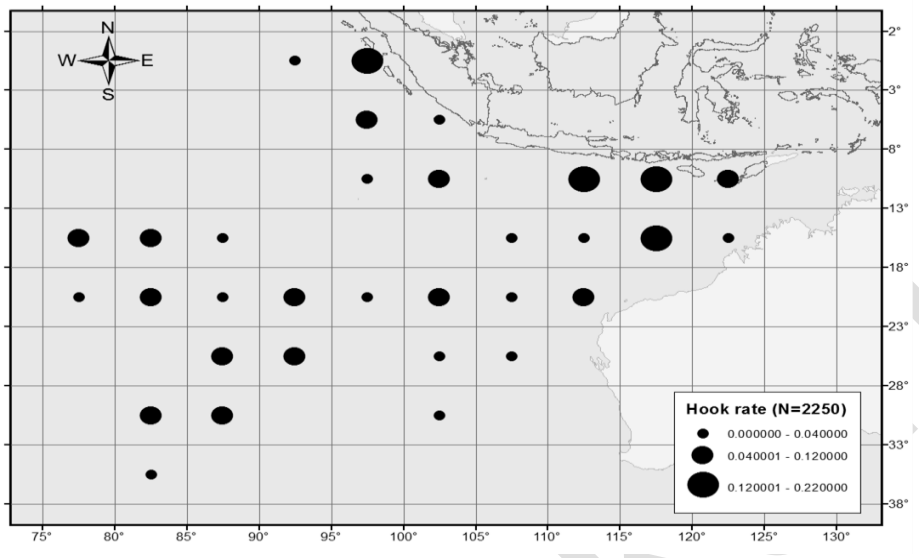

Gambar 3. Sebaran laju pancing (per 100 mata pancing) madidihang di Samudera Hindia Bagian Timur periode 2005-2013

Berdasarkan produksi rawai tuna tipe Taiwan menunjukkan bahwa distribusi madidihang di perairan barat Sumatera pada Januari cukup banyak, khususnya perairan barat Aceh, Sibolga dan Bungus, namun tidak banyak tertangkap madidihang di sebelah Barat Bengkulu. Pada Januari, daerah tangkapan madidihang di perairan sebelah selatan Jawa cenderung ke arah lintang tinggi (selatan), namun di perairan selatan Bali, NTB dan NTT distribusi madidihang banyak ditemukan di lintang rendah (dekat daratan). Pada bulan April distibusi madidihang banyak dijumpai diseluruh perairan barat Sumatera, namun di perairan sebelah selatan Jawa, Bali, NTB dan NTT distribusi madidihang cenderung ke arah selatan.

Distribusi madidihang pada bulan Juli di perairan barat Sumatera cenderung seperti yang terjadi pada bulan Januari, namun di perairan sebelah selatan Jawa, Bali, NTB dan NTT distribusinya masih seperti yang terjadi pada bulan April. Pada Bulan Oktober, madidihang ditemukan di hampir seluruh perairan barat dan selatan Jawa, namun tidak banyak di selatan Bali, NTB dan NTT. Distribusi produksi tuna madidihang di samudera Hindia berbasis rawai tuna tipe Taiwan sebagaimana tersebut pada gambar 4 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

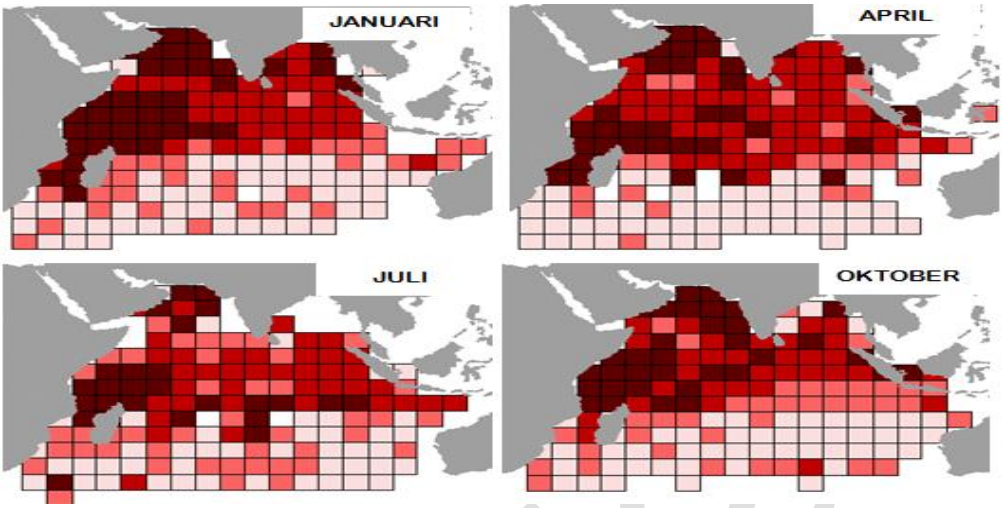

Gambar 4. Distribusi produksi tuna madidihang di Samudera Hindia berbasis rawai tuna tipe Taiwan

b) Tuna mata besar

Tuna mata besar menyebar di seluruh perairan Samudera Hindia WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Gambar 5 dengan tingkat kepadatan yang diindikasikan dengan laju pancing rawai tuna antara 0,2-0,5 ekor ikan per 100 mata pancing per tawur.

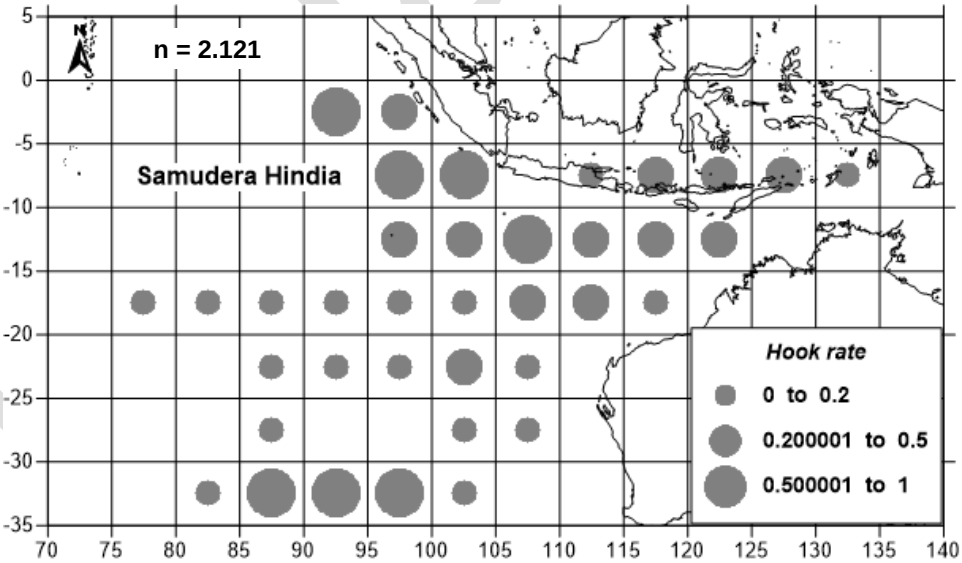

Gambar 5. Sebaran laju pancing (per 100 mata pancing) tuna mata besar di Samudera Hindia Bagian Timur periode 2005-2013

Penyebaran tuna mata besar berdasarkan produksi rawai tuna yang berbasis di Benoa tahun 2005-2013, merujuk informasi produksi rawai tuna tipe Taiwan yang dioperasikan di perairan Samudera Hindia maka penyebaran tuna mata besar bulan Januari adalah banyak terdapat di perairan barat Aceh dan Sibolga. Pada bulan tersebut, rawai tuna Taiwan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

tidak menangkap tuna mata besar di perairan barat Bungus dan Bengkulu serta di perairan selatan Jawa. Pada bulan April, Juli dan Oktober rawai tuna Taiwan banyak menangkap tuna mata besar di perairan barat Sumatera. Sedangkan bulan-bulan tersebut di perairan sebelah selatan Bali, NTB dan NTT rawai tuna tipe Taiwan tidak menangkap albakora. Distribusi produksi rawa tuna tipe Taiwan sebagaimana tersebut pada gambar 6 di bawah ini.

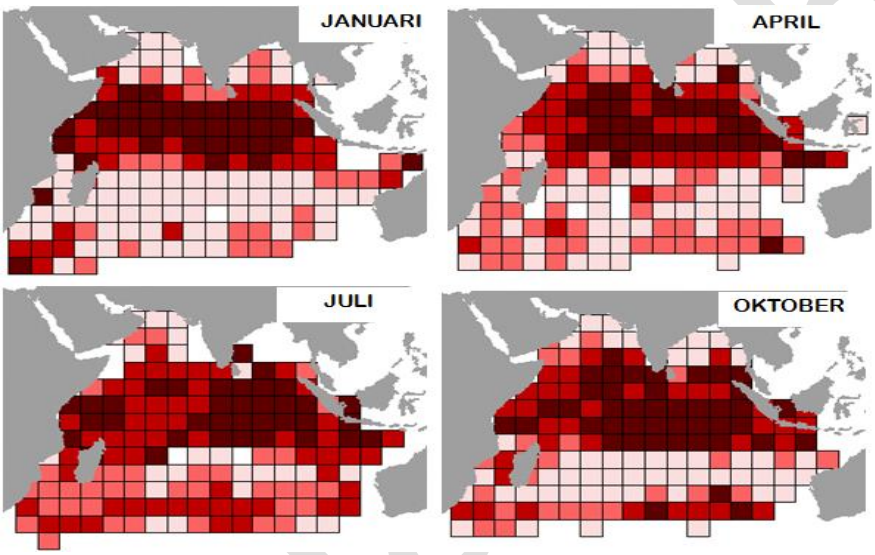

Gambar 6. Distribusi produksi tuna mata besar di Samudera Hindia berbasis rawai tuna tipe Taiwan

c) Albakora

Di perairan Samudera selatan NTB dan NTT (WPPNRI 573) sebagaimana tersebut pada Gambar 7, menunjukkan bahwa sebaran sumber daya tuna albakora cukup tinggi dengan indikasi bahwa laju pancing (jumlah/ekor ikan yang tertangkap per 100 mata pancing per tawur) berkisar 0,5-0,7.

Penyebaran albakora berdasarkan produksi rawai tuna yang berbasis di Benoa tahun 2005-2013 adalah sebagaimana tersebut pada Gambar 8. Penyebaran albakora terindikasi selain banyak terdapat di perairan samudera Hindia selatan Bali, NTB dan NTT juga banyak terdapat di perairan samudera Hindia barat Sumatera dengan nilai laju pancing rawai tuna mencapai 10-20 ekor ikan per 1000 mata pancing per tawur.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

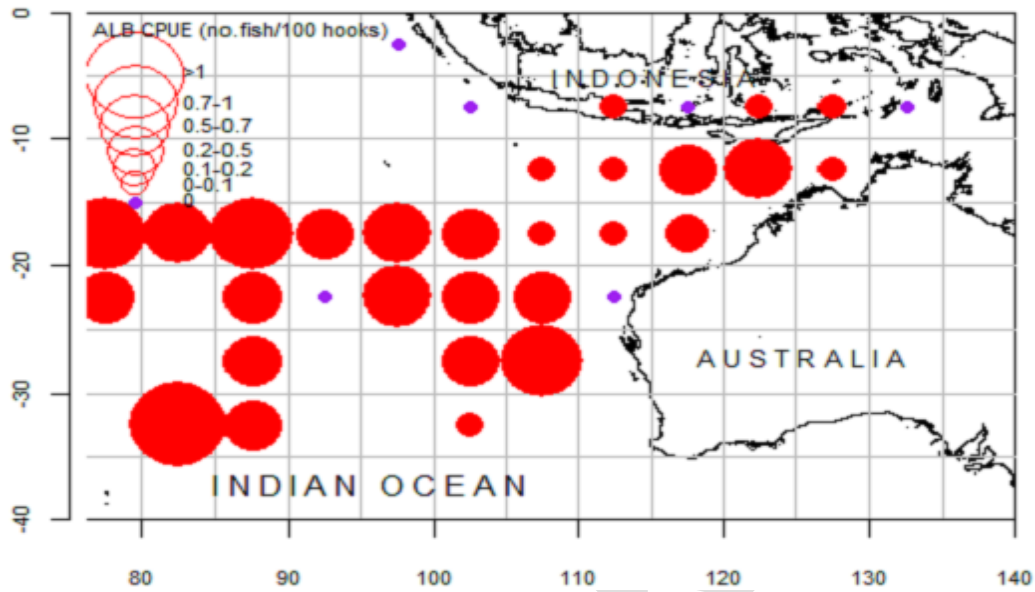

Gambar 7. Sebaran spasial laju pancing (per 100 mata pancing) tuna albakora yang tertangkap rawai tuna periode 2005-2010

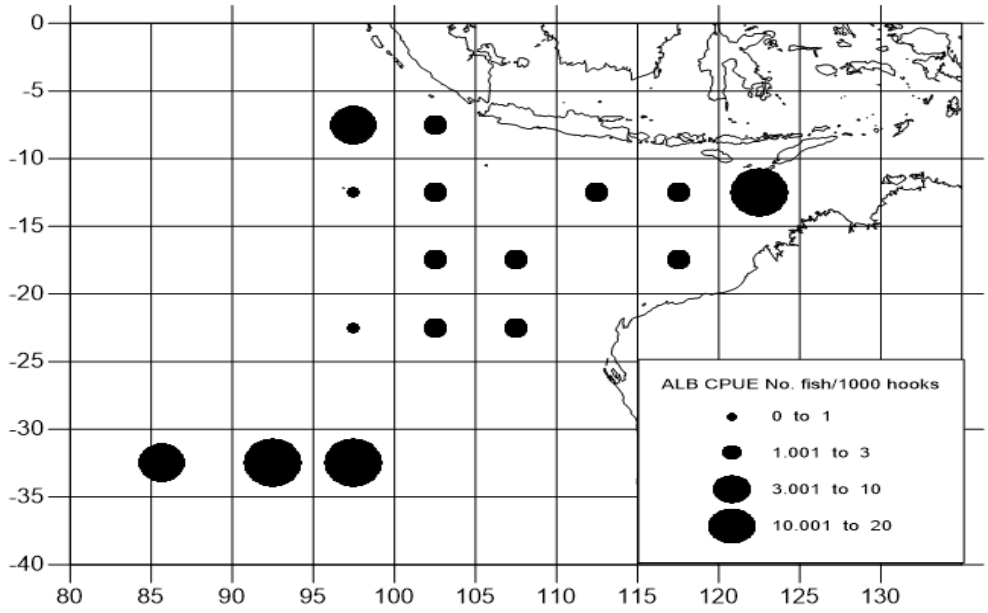

Gambar 8. Distribusi spasial laju tangkap (per 1000 mata pancing) tuna albakora di Samudera Hindia periode 2010-2013

Berdasarkan data penangkapan ikan yang mengggunakan alat penangkapan ikan rawai tuna tipe Taiwan sebagaimana tersebut pada Gambar 9, terindikasi bahwa pada bulan Januari albakora cukup banyak terdapat di perairan samudera Barat Sumatera khususnya sebelah barat Bengkulu, sedangkan di perairan sebelah selatan Jawa, Bali, NTB dan NTT tidak tertangkap albakora. Pada bulan April penyebaran albakora cukup

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

banyak di perairan sebelah barat Bungus dan Bengkulu dan juga di selatan Jawa khususnya selatan Jawa Barat. Pada bulan Juli, albakora banyak terdapat perairan sebelah barat Padang dan Bengkulu, sedangkan di perairan sebelah selatan Jawa, Bali NTB dan NTT tidak tertangkap albakora. Situasi pada bulan Oktober di perairan samudera sebelah barat Bungus dan Bengkulu juga banyak tertangkap albakora, namun di sebelah selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT rawai tuna tidak menangkap albakora.

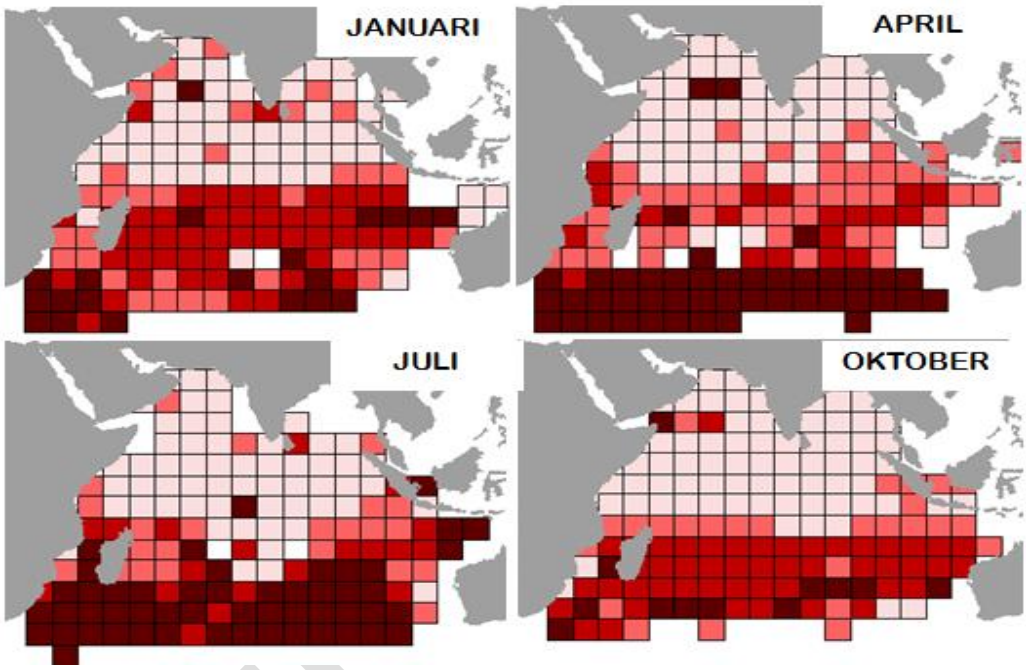

Gambar 9. Distribusi produksi albakora di Samudera Hindia berbasis rawai tuna Taiwan

d) Tuna sirip biru selatan

Distribusi sumber daya tuna sirip biru selatan di perairan samudera Hindia WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Gambar 10, cenderung menyebar kearah selatan dan di sebalah selatan Jawa, NTB dan NTT terindikasi sebagai *spawning ground*.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

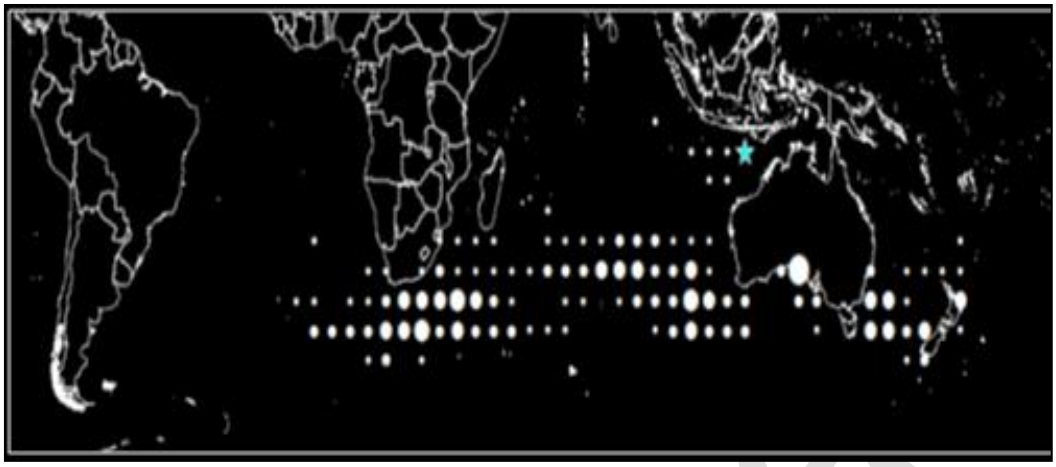

Gambar 10. Distribusi geografikal tangkapan tuna sirip biru selatan

Keterangan: titik-titik putih merupakan distribusi geografikal tangkapan tuna sirip biru selatan di Samudera Hindia tahun 2006-2012 yang dipetakan CCSBT per area 5°x5°, gambar bintang biru menunjukkan 'spawning ground'

2) WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 (Samudera Pasifik)

a) Madidihang

Distribusi Madidihang tahun 2012-2016 di wilayah WCPFC. Tangkapan pukat cincin mendominasi pada wilayah equator, dengan tangkapan lebih tinggi pada perairan tropis WCPO. Tangkapan di Indonesia sendiri didominasi oleh hasil tangkapan dengan alat tangkap lain (other), huhate dan rawai tuna.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

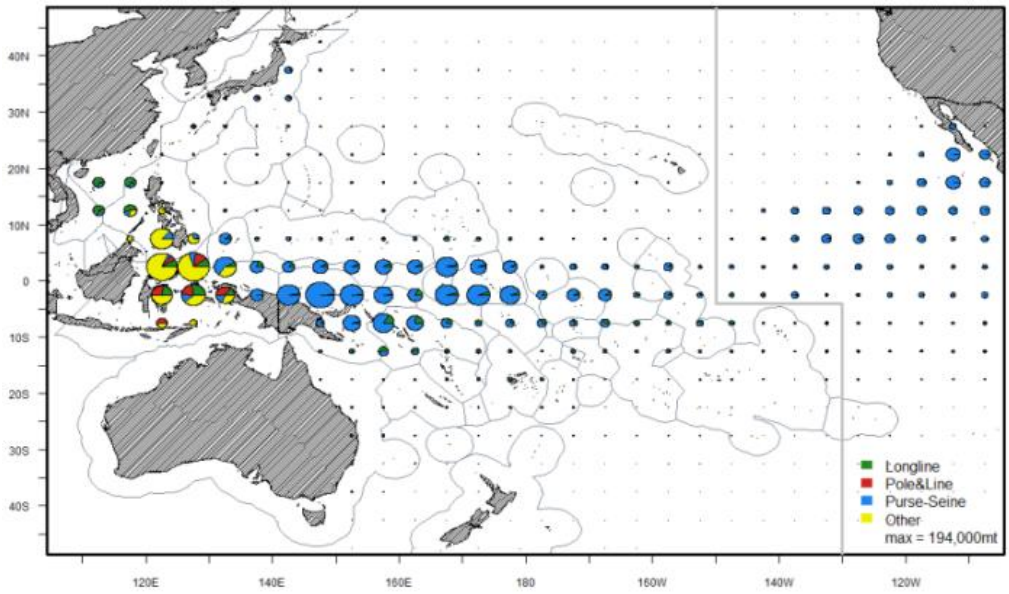

Gambar 11. Distribusi Madidihang tahun 2012-2016 di wilayah WCPFC berdasarkan alat tangkap, Pukat Cincin (biru), Huhate (merah), rawai tuna (hijau), dan lain-lain (kuning)

b) Tuna mata besar

Distribusi produksi tuna mata besar di perairan WPPNRI wilayah statistik WCPFC dan sekitarnya tahun 2012–2016 adalah sebagaimana dipetakan oleh WCPFC, sebagaimana tersebut pada Gambar 12.

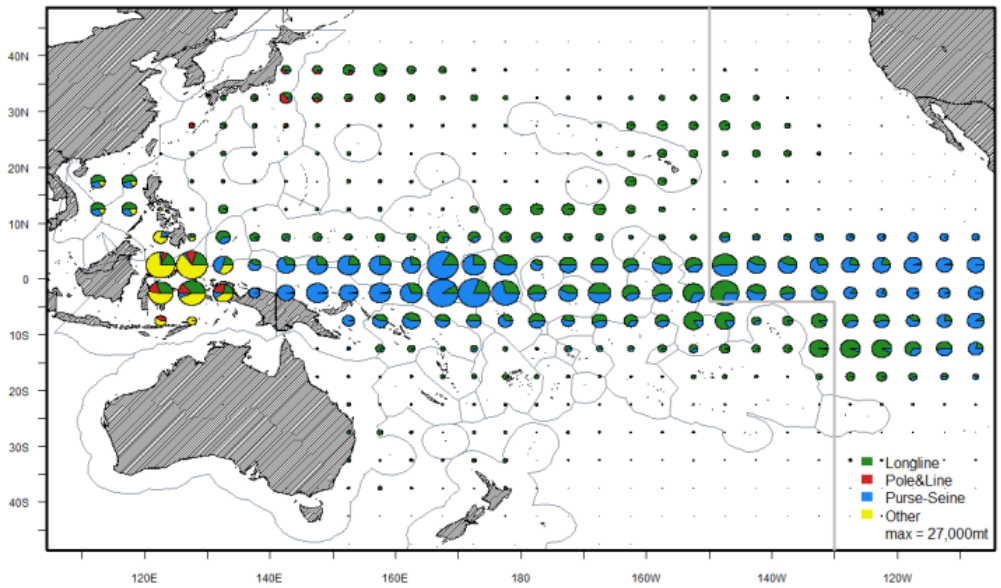

Gambar 12. Distribusi produksi tuna mata besar tahun 2012-2016 oleh rawai tuna (hijau), pukat cincin (biru), huhate (merah), lainnya (kuning)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Berdasarkan Gambar 12 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa daerah penangkapan rawai tuna, pukat cincin, huhate, dan alat penangkapan ikan lainnya menunjukkan bahwa distribusi sumber daya tuna mata besar di perairan Pasifik Indonesia menyebar di WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716 dan WPPNRI 717. Distribusi produksi tuna mata besar tertinggi di wilayah timur Samudera Pasifik dan menyebar ke arah barat hingga di perairan kepulauan Indonesia. Jenis alat penangkapan ikan yang dominan menangkap tuna mata besar di perairan kepulauan berturut-turut adalah alat penangkapan ikan lainnya (other), rawai tuna, dan huhate.

c) Albakora

Tidak ada bukti distribusi albakora di perairan WPPNRI wilayah statistik WCPFC sebagaimana dipetakan oleh WCPFC, sebagaimana tersebut pada Gambar 13.

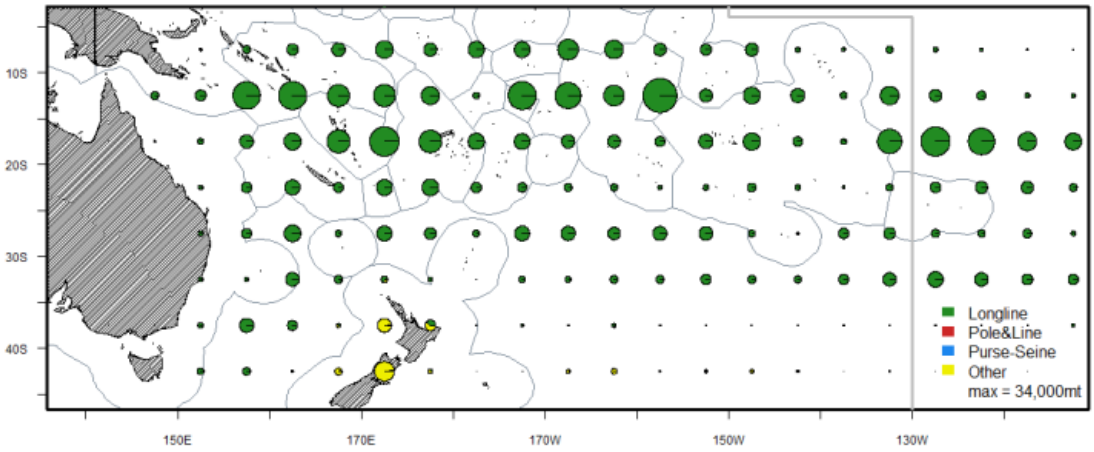

Gambar 13. Distribusi produksi albakora di luar WPPNRI tahun 2012-2016 oleh rawai tuna (hijau), huhate (merah), pukat cincin (biru), dan lainnya (kuning)

Berdasarkan Gambar 13 sebagaimana tersebut di atas, daerah penangkapan tangkapan rawai tuna, jaring insang hanyut dan pancing tonda mengindikasikan bahwa sumber daya tuna albakora beruaya diluar perairan Indonesia. Hal ini dapat dipahami, karena tuna albakora menyukai perairan bersuhu dingin, adapun perairan Indonesia bersuhu relatif panas karena termasuk tropis.

d) Cakalang

Distribusi sumber daya cakalang di perairan WPPNRI wilayah statistik WCPFC dan sekitarnya tahun 2012-2016 adalah sebagaimana dipetakan oleh WCPFC, sebagaimana tersebut pada Gambar 14.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

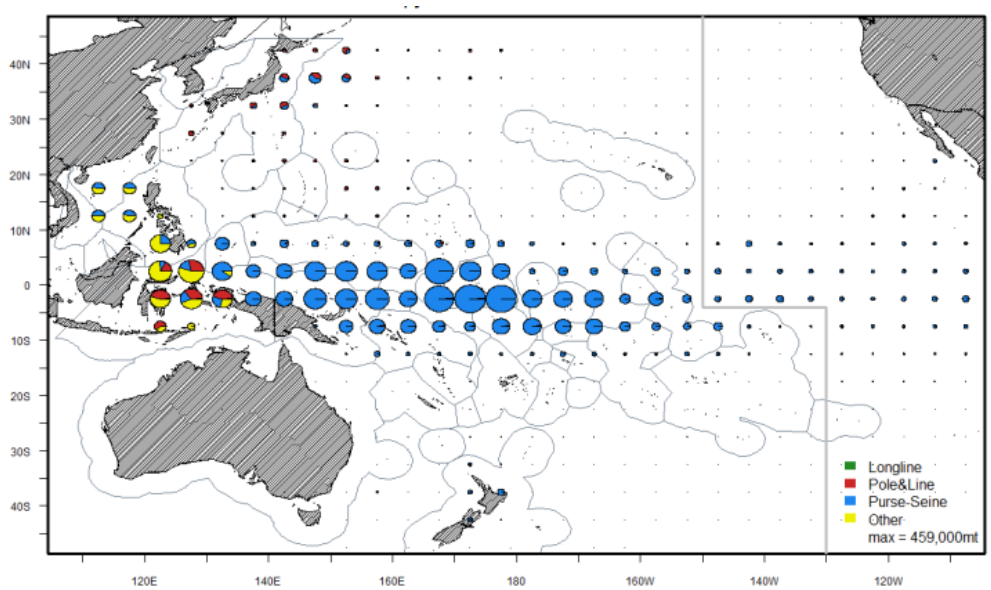

Gambar 14. Distribusi produksi cakalang tahun 2012-2016 oleh huhate (hijau), pukat cincin (oranye), pancing ulur-tonda (hitam)

Berdasarkan Gambar 14 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi cakalang terkonsentrasi di wilayah equator barat Pasifik sampai ke dalam perairan kepulauan Indonesia. Jenis alat penangkapan ikan yang menangkap cakalang adalah pukat cincin, huhate dan pancing tonda/pancing ulur.

Selanjutnya, pergerakan tuna (cakalang, madidihang dan tuna mata besar) di Samudera Pasifik berdasarkan *tuna tagging program* WCPFC adalah sebagaimana tersebut pada Gambar 15.

Pra-Nasi

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

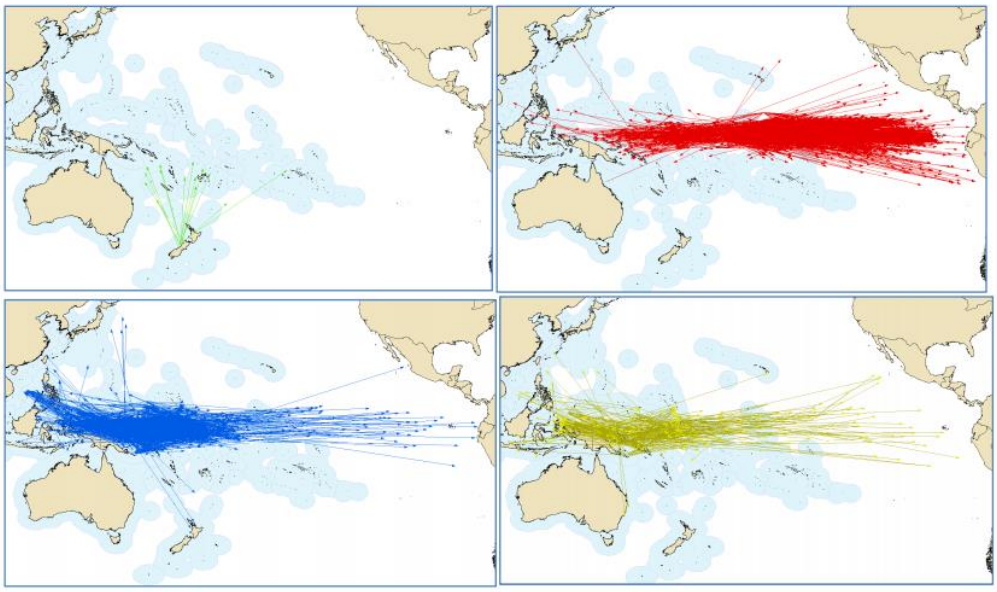

Gambar 15. Ruaya tuna hasil program tagging WCPFC yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2018; Albakora (hijau), Tuna Mata Besar (Merah), Cakalang (Biru), dan Madidihang (kuning)

Hasil tagging memiliki nilai yang penting bagi tuna tropis, namun terdapat gap data bagi albakora. Hasil tagging dengan data terbanyak dan menjadi acuan adalah untuk tuna mata besar yang berada di Pasifik Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis (Tuna Mata Besar, Cakalang dan Madidihang) memiliki distribusi di Samudera Pasifik ke wilayah kepulauan Indonesia WPPNRI 713, 714, 715, 716 dan 717.

e) Tongkol

Distribusi sumber daya tongkol (tongkol krai dan tongkol lisong) diduga kuat menyebar di seluruh perairan Indonesia (11 WPPNRI). Hal tersebut adalah merujuk pada laporan statistik perikanan Indonesia yang mencantumkan produksi tongkol pada setiap provinsi.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nasi

4. Produksi

a. Produksi Nasional

Dari sisi produksi, produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia pada tahun 2005-2016 diperkirakan rata-rata sebanyak 1.162.962 ton/tahun, terdiri dari tuna dan cakalang rata-rata sebanyak 580.229 ton/tahun serta tongkol sebanyak 582.565 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 54.

Tabel 54. Estimasi Produksi Tuna, Cakalang, dan Tongkol tahun 2005-2016

Tahun	Jumlah produksi (ton)						Jumlah
	Albakora	Tuna mata besar	Cakalang	Tuna sirip biru selatan	Madidihang	Tongkol	
2005	9.285	27.622	223.267	1.831	119.121	492.577	873.703
2006	7.950	29.003	279.143	747	79.502	466.756	863.101
2007	9.367	36.441	301.531	1.079	97.696	571.345	1.017.459
2008	8.460	35.493	281.476	891	83.553	575.263	985.136
2009	14.073	42.321	355.624	641	106.932	569.100	1.088.691
2010	12.504	40.427	348.895	474	112.803	554.379	1.071.492
2011	11.483	52.427	372.211	700	176.754	568.032	1.181.607
2012	11.028	73.603	429.024	910	191.047	588.060	1.293.672
2013	6.295	78.142	481.014	1.382	219.816	618.376	1.405.025
2014	6.973	88.037	496.682	1.015	217.839	715.832	1.526.378
2015	7.304	52.659	415.061	593	189.931	663.077	1.328.625
2016	7.180	54.848	440.812	601	209.227	607.983	1.320.651
Rata-rata	9.325	50.919	368.728	905	150.352	582.565	1.162.962
Jumlah	580.229					582.565	1.162.962

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (Data diolah)

Berdasarkan estimasi produksi di atas dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk tuna mata besar, albakora, madidihang, cakalang, tuna sirip biru selatan, dan tongkol berfluktuasi dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh tongkol (582.565 ton/tahun), cakalang (311.659 ton/tahun), madidihang (150.352 ton/tahun), tuna mata besar (50.919 ton/tahun), albakora (9.325 ton/tahun) dan tuna sirip biru selatan (905 ton/tahun). Namun demikian tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 16.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

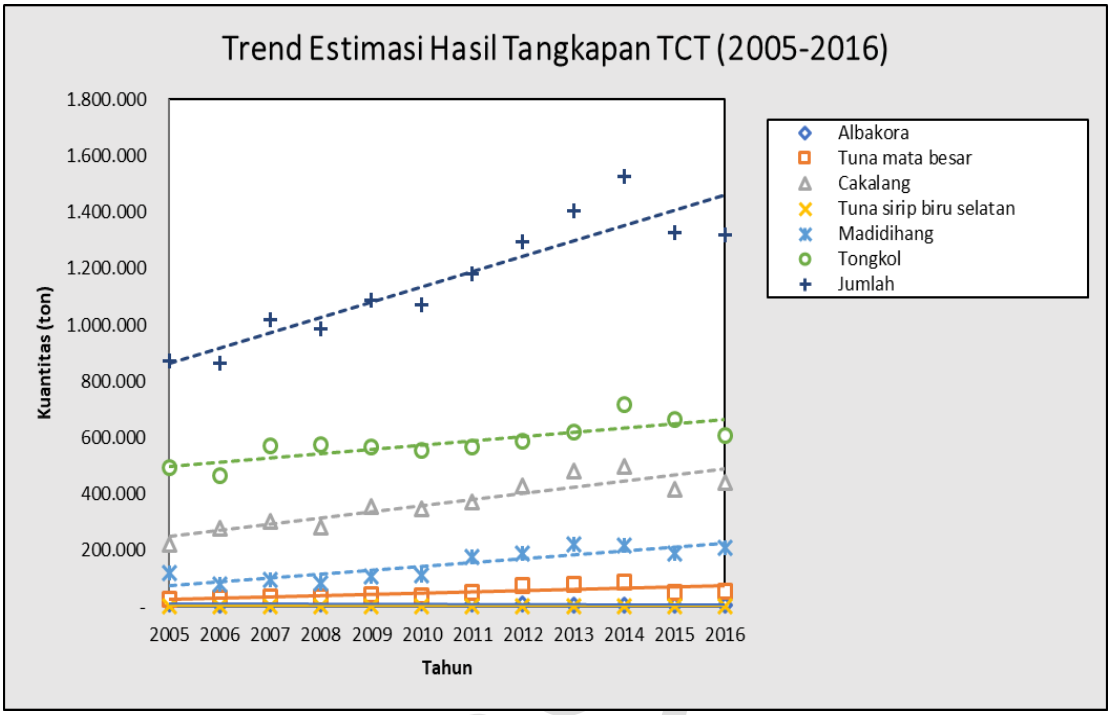

Gambar 16. Tren produksi Tuna Cakalang dan Tongkol tahun 2005-2016

Disamping itu, berdasarkan estimasi IOTC, rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia pada tahun 2009-2011 sebanyak 356.862 ton dan 2010-2012 sebanyak 339.306 ton dan pada tahun 2013-2017 sebanyak 467.537 ton (IOTC, 2017) sebagaimana tersebut pada Tabel 55 di bawah ini.

Tabel 55. Estimasi produksi tuna, cakalang dan tongkol negara IOTC

No	Negara	Estimasi Rata-Rata Produksi					
		2009-2011		2010-2012		2013-2017	
		Ton	(%)	Ton	(%)	Ton	(%)
1	**Indonesia**	**356.862**	**25,22**	**339.306**	**23,61**	**467.537**	**25,32**
2	European Community	183.194	12,95	199.224	13,86	340.165	18,42
3	Iran	168.437	11,9	184.879	12,87	319.322	17,29
4	India	143.708	10,16	158.598	11,04	115.670	6,26
5	Sri Lanka	96.165	6,8	100.739	7,01	105.978	5,74
6	Maldives	98.100	6,93	99.976	6,96	127.443	6,90
7	Seychelles	75.911	5,36	72.418	5,04	95.440	5,17
8	China	65.407	4,62	67.548	4,7	8.111	0,44
9	Pakistan	52.940	3,74	55.573	3,87	42.895	2,32

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

No	Negara	Estimasi Rata-Rata Produksi					
		2009-2011		2010-2012		2013-2017	
		Ton	(%)	Ton	(%)	Ton	(%)
10	Yemen	32.374	2,29	36.209	2,52	33.995	1,84
11	Malaysia	26.498	1,87	28.188	1,96	15.942	0,86
12	Oman	22.604	1,6	23.690	1,65	35.345	1,91
13	Japan	19.901	1,41	16.479	1,15	14.650	0,79
14	Thailand	20.964	1,48	15.801	1,1	11.441	0,62
15	Madagascar	8.650	0,61	8.712	0,61	3.876	0,21
16	Tanzania	4.234	0,3	6.433	0,45	5.459	0,30
17	Australia	5.385	0,38	5.164	0,36	4.538	0,25
18	Comoros	5.328	0,38	5.164	0,36	8.724	0,47
19	Mozambique	400	0,03	3.680	0,26	1.119	0,06
20	Korea, Republic	2.196	0,16	2.774	0,19	19.590	1,06
21	Philippines	636	0,04	1.219	0,08	767	0,04
22	Eriterea	962	0,07	837	0,06	-	0,00
23	Kenya	736	0,05	658	0,05	294	0,02
24	Mauritius	774	0,05	587	0,04	10.127	0,55
25	Belize	400	0,03	400	0,03	230	0,01
26	France (Terr)	19.978	1,41	400	0,03	57.752	3,13
27	Guinea	400	0,03	400	0,03	-	0,00
28	Sierra Leone	400	0,03	400	0,03	-	0,00
29	Somalia	400	0,03	400	0,03	-	0,00
30	Sudan	400	0,03	400	0,03	-	0,00
31	United Kingdom (Terr)	400	0,03	400	0,03	107	0,01
32	Vanuatu	400	0,03	400	0,03	-	0,00

Sumber : Hasil Rapat Tahunan IOTC, 2018

Dari Tabel 55 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil TCT terbesar diantara negara anggota IOTC. Kontribusi produksi Indonesia tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 467.537 ton/tahun (25,32%), sedangkan tahun 2010-2012 rata-rata sebesar 339.306 ton/tahun (23,61%). Estimasi produksi di atas dipergunakan IOTC sebagai dasar penetapan iuran tahunan (kontribusi finansial) Indonesia sebagai anggota tetap untuk tahun 2017 dan 2018.

b. Produksi Berdasarkan Jenis Ikan dan WPPNRI

Produksi berdasarkan jenis ikan dan WPPNRI dilakukan karena pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol tidak dapat dipisahkan dari wilayah pengelolaan RFMO yang mencakup ZEEI. Dalam hal ini, WPPNRI yang menjadi bagian dari wilayah pengelolaan IOTC adalah Samudera

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Hindia yakni WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, sedangkan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik yakni WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, merupakan wilayah pengelolaan WCPFC.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

1) Tuna Dan Cakalang

a) WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 yang merupakan wilayah pengelolaan IOTC

Samudera Hindia (WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573) merupakan wilayah penangkapan tuna dan cakalang bagi armada Indonesia. Produksi albakora, tuna mata besar, madidihang, cakalang, dan tuna sirip biru selatan tahun 2005-2016 rata-rata sebanyak 142.657 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 56 di bawah ini.

Tabel 56. Estimasi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)					Total
	Albakora	Tuna mata Besar	Cakalang	SBT	Madidihang	
2005	9285	13337	48671	1831	59374	132498
2006	7950	14247	50518	747	25486	98948
2007	9367	20697	52252	1079	34188	117583
2008	8460	16860	48100	891	24092	98403
2009	14073	23619	69806	641	25559	133698
2010	12504	25296	68466	474	47926	154666
2011	11483	26859	84601	700	38511	162154
2012	11028	32540	87333	910	38533	170344
2013	6295	35505	94437	1382	61380	198999
2014	6973	32412	72088	1015	45122	157610
2015	7301	18665	80938	593	40571	148068
2016	7177	22135	72206	601	36799	138918
Rata-rata	9.325	21.462	63.718	947	36.709	142.657

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Berdasarkan estimasi produksi di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk tuna mata besar, albakora, madidihang, dan cakalang berfluktuasi dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh cakalang (63.718 ton/tahun), madidihang (36.709 ton/tahun), tuna mata besar (21.462 ton/tahun) dan albakora (10.738 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun, sebagaimana tersebut pada Gambar 17.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

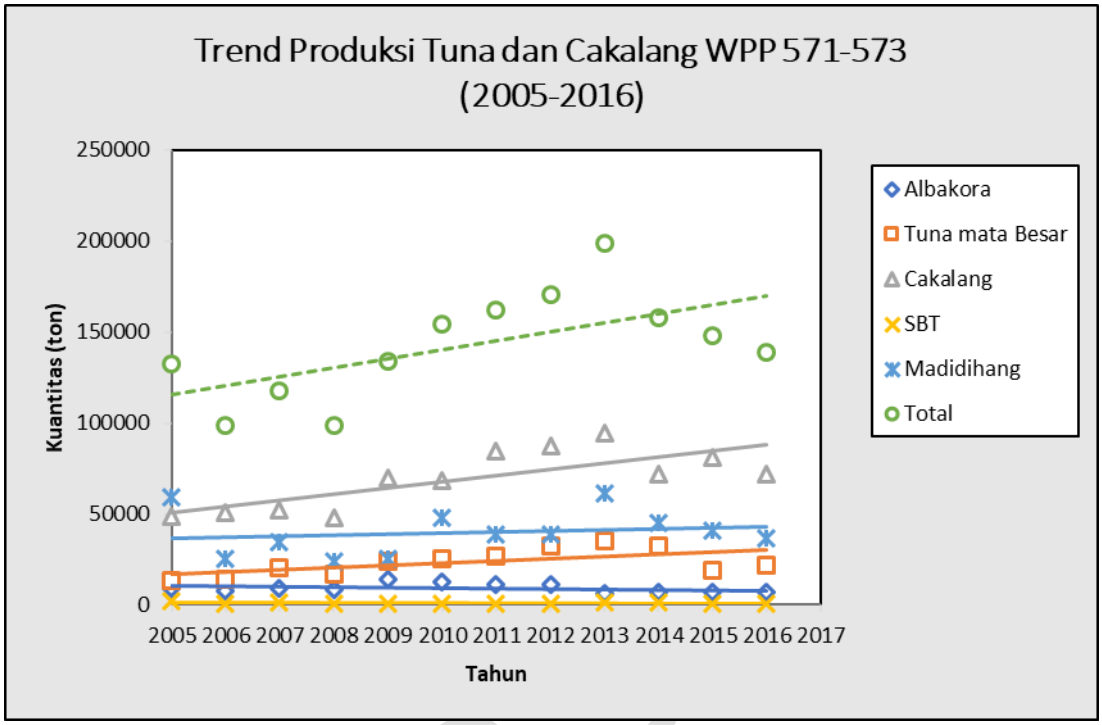

Gambar 17. Tren estimasi produksi di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 tahun 2005-2016

b) WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

Estimasi produksi tuna mata besar, madidihang, dan cakalang tahun 2005-2016 rata-rata sebesar 292.868 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 57 di bawah ini.

Tabel 57. Estimasi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan 715 tahun 2005-2012

Tahun	Estimasi Hasil Tangkapan (ton)			Jumlah (ton)
	Tuna Mata Besar	Madidihang	Cakalang	
2005	8.660	35.111	120.920	164.691
2006	10.183	35.632	141.592	187.407
2007	7.350	43.971	172.110	223.431
2008	10.191	42.857	158.221	211.269
2009	12.735	49.997	207.704	270.436
2010	12.281	42.536	202.821	257.638
2011	15.623	101.666	214.112	331.401
2012	30.869	107.109	256.342	394.320
2013	29.566	111.622	265.189	406.377
2014	25.356	87.109	199.118	311.583
2015	24.208	91.232	220.335	335.775

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tahun	Estimasi Hasil Tangkapan (ton)			Jumlah (ton)
	Tuna Mata Besar	Madidihang	Cakalang	
2016	23.131	130.184	266.776	420.091
Rata-rata	17.513	73.252	202.103	292.868

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Berdasarkan estimasi produksi di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk tuna mata besar, madidihang dan cakalang berfluktuasi, dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh cakalang (202.103 ton/tahun), madidihang (73.252 ton/tahun) dan tuna mata besar (17.513 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 18.

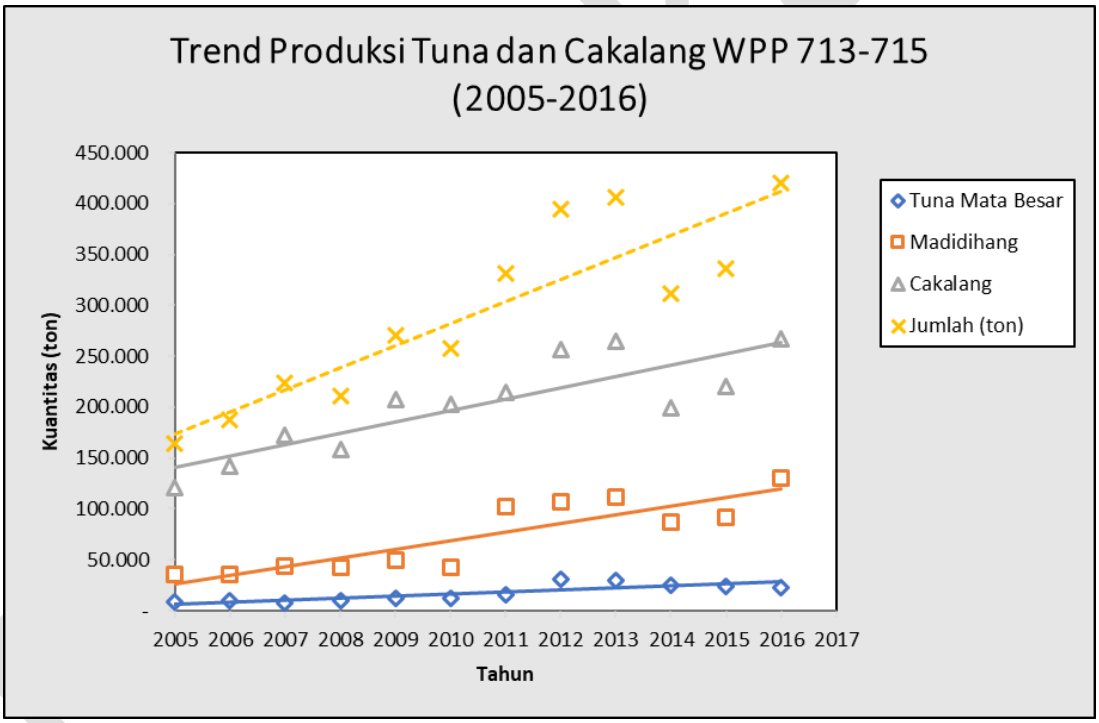

Gambar 18. Tren estimasi produksi di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

c) WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan wilayah pengelolaan WCPFC

Estimasi produksi tuna mata besar, madidihang, dan cakalang tahun 2005-2016 rata-rata sebesar 117.334 ton/tahun, dengan rincian seperti pada Tabel 58 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 58. Estimasi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Hasil Tangkapan (ton)			Jumlah (ton)
	Tuna Mata Besar	Madidihang	Cakalang	
2005	3.487	24.339	52.283	80.109
2006	4.533	15.408	75.718	95.659
2007	6.183	18.870	71.008	96.061
2008	6.116	16.336	72.344	94.796
2009	5.318	30.673	72.281	108.272
2010	1.191	21.620	70.814	93.625
2011	8.228	35.360	64.491	108.079
2012	8.045	39.579	70.637	118.261
2013	10.545	40.242	108.370	159.157
2014	13.768	51.644	125.763	191.175
2015	6.760	50.972	90.276	148.008
2016	6.194	33.731	74.878	114.803
Rata-rata	6.697	31.565	79.072	117.334

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016

Berdasarkan estimasi produksi di atas dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk tuna mata besar, madidihang dan cakalang berfluktuasi, dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh cakalang (79.072 ton/tahun), madidihang (31.565 ton/tahun) dan tuna mata besar (6.697 ton/tahun). Namun demikian tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 19.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

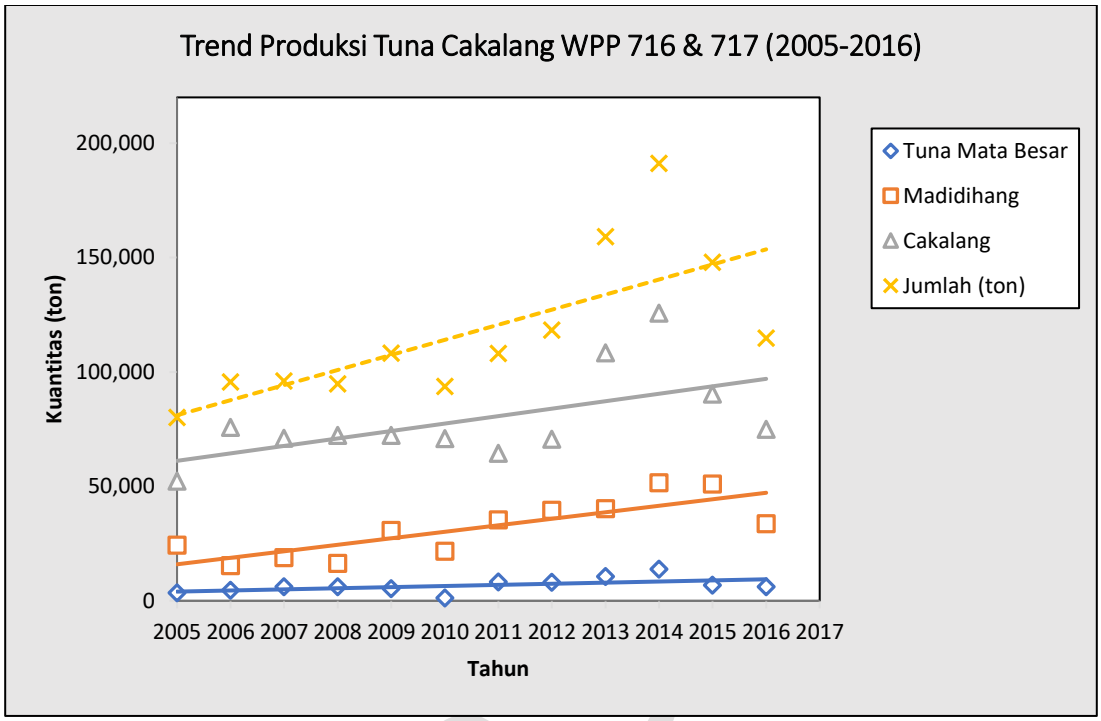

Gambar 19. Tren estimasi produksi tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 tahun 2005-2012

d) Tuna sirip biru selatan di WPPNRI 573 dan laut lepas Samudera Hindia yang dikelola oleh CCSBT

CCSBT telah menetapkan bahwa pengelolaan jenis tuna sirip biru selatan dilakukan melalui penetapan kuota produksi *(output control).* Perbandingan antara produksi tahunan dan kuota Nasional Indonesia dari Tahun 2008 – 2020 sebagaimana tersebut pada Tabel 59 di bawah ini.

Tabel 59. Kuota Nasional dan produksi tuna sirip biru selatan Indonesia tahun 2008-2020

No	Tahun	Kuota Nasional (ton)	Produksi (ton)	Keterangan
1	2008	750	891	*Over quota*
2	2009	750	641	-
3	2010	651	635	-
4	2011	651	842	*Over quota*
5	2012	685	909	*Over quota*
6	2013	709	1388	*Over quota*
7	2015	750	593	-
8	2016	750	601	-
9	2017	750	-	-
10	2018	1023	-	-
11	2019	1023	-	-
12	2020	1023	-	-

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Nas

Dari Tabel 59 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tren total produksi Indonesia cenderung meningkat hingga tahun 2013 dan melebihi kuota yang ditetapkan setiap tahun. Namun jumlah tangkapan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016 dan kurang dari kuota yang ditentukan oleh CCSBT. Pada tahun 2018 – 2020 Jepang memberikan alokasi tangkapan sukarela kepada Indonesia sebesar 21 ton. Namun, apabila keadaan *over quota* terus berlanjut dan tanpa dapat dikendalikan, akan menimbulkan implikasi antara lain:

1. Mempengaruhi citra Indonesia terkait dengan komitmen pelaksanaan pengelolaan sumber daya tuna sirip biru selatan secara berkelanjutan;
2. Kemungkinan terjadinya embargo oleh negara pasar terhadap produk tuna sirip biru selatan Indonesia; dan/atau
3. Kuota Indonesia dapat menjadi nol bahkan negatif karena penerapan kebijakan tindakan untuk perbaikan (*corrective action policy*).

1. Tongkol (Neritic Tuna)

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan tongkol dalam RPP-TCT ini adalah kelompok jenis tuna neritik (*neritic tuna*) yang terdiri dari 4 (empat) jenis tongkol dan 2 (dua) jenis tenggiri (*sheer-fish*). Jenis tongkol mencakup lisong, tongkol krai, tongkol komo, tongkol abu-abu sedangkan *sheer-fish* mencakup tenggiri papan dan tenggiri.

Keenam jenis tuna neritic (*neritic tuna*) umumnya tertangkap pada 11 WPPNRI baik perairan Kepulauan Indonesia, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Adapun estimasi jumlah produksi Nasional tahun 2005-2016 rata-rata sebesar 582.565 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 60 di bawah ini.

Tabel 60. Estimasi produksi tongkol pada 11 WPPNRI tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2005	17	130.181	86.459	121.792	131.225	22.903	492.577
2006	553	115.111	118.470	95.327	114.214	23.081	466.756
2007	3.712	134.593	143.101	145.587	115.424	28.928	571.345
2008	3.604	123.882	159.450	135.801	128.147	24.379	575.263
2009	5.369	148.663	154.487	114.863	120.997	24.721	569.100
2010	3.696	132.733	141.190	112.556	140.277	23.927	554.379
2011	7.434	145.541	145.838	117.783	132.705	18.731	568.032
2012	14.722	158.001	172.740	84.022	141.557	17.018	588.060
2013	32.491	192.943	153.193	70.842	151.648	17.259	618.376

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2014	45.005	204.491	208.522	55.589	165.808	36.417	715.832
2015	36.243	205.051	201.427	78.483	124.137	17.736	663.077
2016	33.625	184.586	190.566	65.651	113.839	19.716	607.983
Rata-rata	15.539	156.315	156.287	99.858	131.665	22.901	582.565

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 60 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk lisong, tongkol krai, tongkol komo, tongkol abu-abu, tenggiri dan tenggiri papan relatif stabil, dan dari sisi jumlah produksi/tahun didominasi secara berturut-turut oleh tongkol krai (156.315 ton/tahun), tongkol komo (156.287 ton/tahun), tenggiri (131.665 ton/tahun), tongkol abu-abu (99.858 ton/tahun), tenggiri papan (22.977 ton/tahun) dan lisong (15.539 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 20.

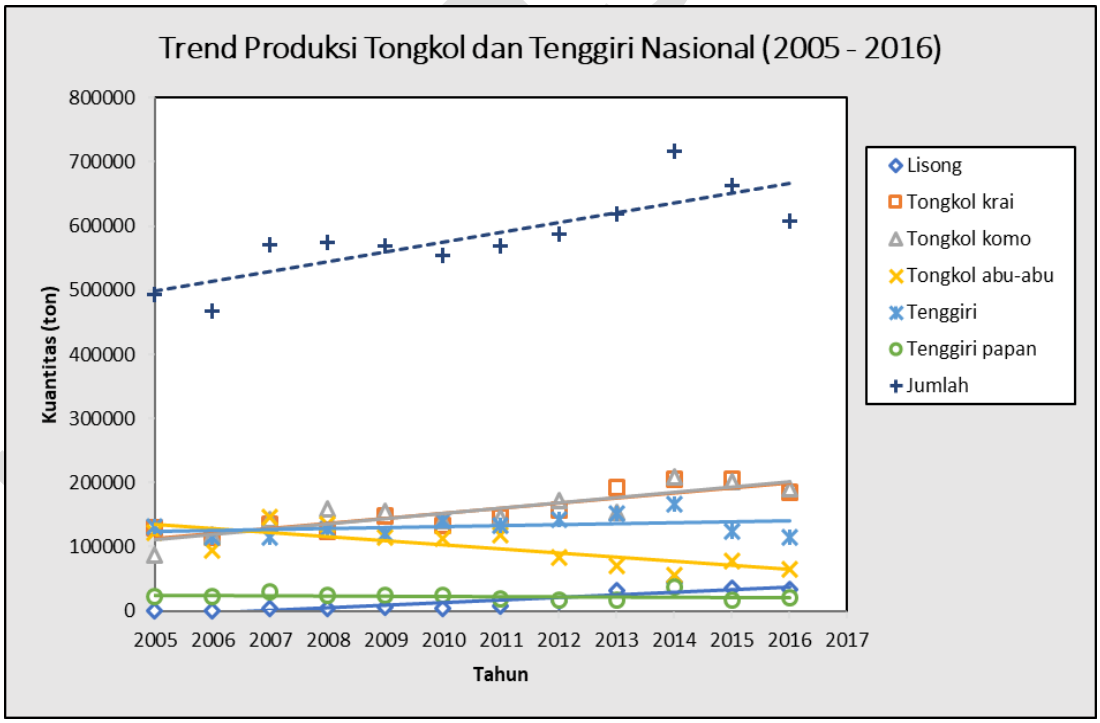

Gambar 20. Tren estimasi produksi tongkol pada 11 WPPNRI tahun 2005-2016

Mengingat tongkol (*neritic tuna*) juga termasuk spesies yang dikelola oleh RFMO, maka klasifikasi produksi juga akan dilakukan berdasarkan WPPNRI sebagai berikut:

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

a) WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 yang merupakan wilayah pengelolaan IOTC

Produksi jenis tongkol dari WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 tahun 2005-2016 diperkirakan rata-rata sebanyak 180.209 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 61 di bawah ini.

Tabel 61. Estimasi produksi tongkol di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2005	9	43.003	30.335	30.779	26.879	9.454	140.459
2006	539	34.271	38.576	32.806	26.794	9.560	142.546
2007	3.351	43.490	54.081	37.915	23.627	16.083	178.547
2008	3.022	54.981	79.436	18.743	23.798	13.254	193.234
2009	4.909	50.963	75.638	34.379	21.730	12.066	199.685
2010	3.505	51.889	60.385	24.088	22.577	11.632	174.076
2011	6.203	64.066	50.791	38.585	25.936	8.853	194.434
2012	12.131	71.118	50.510	26.658	30.553	7.389	198.359
2013	23.386	73.044	38.747	23.645	34.061	6.004	198.887
2014	27.934	46.690	43.511	20.901	32.016	8.205	179.257
2015	13.429	70.705	40.547	25.757	30.297	7.833	188.568
2016	6.724	77.206	34.511	21.451	25.355	9.208	174.455
Rata-rata	8.762	56.786	49.756	27.976	26.969	9.962	180.209

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 (data diolah)

Dari tabel 61 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk 6 (enam) jenis tongkol berfluktuasi dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh tongkol krai (56.786 ton/tahun), tongkol komo (49.756 ton/tahun), tongkol abu-abu (27.976 ton/tahun), tenggiri (26.969 ton/tahun), tenggiri papan (9.962 ton/tahun), dan lisong (8.762 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 21.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

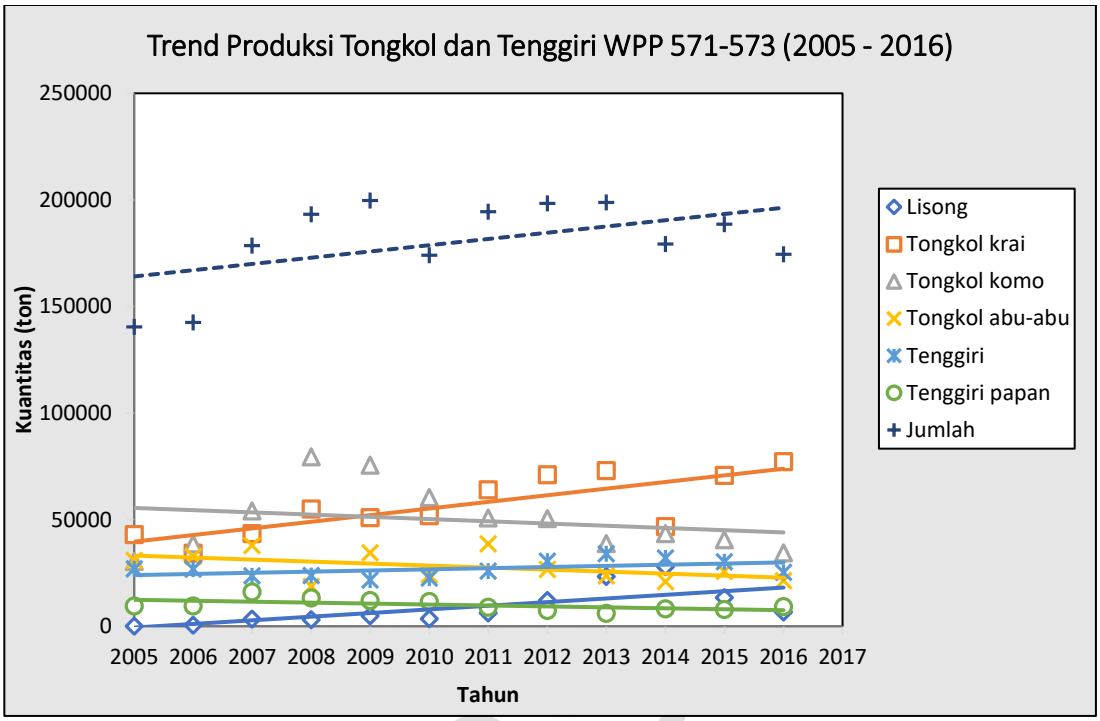

Gambar 21. Tren estimasi produksi tongkol WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 tahun 2005-2016

b) WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718

Produksi jenis tongkol dari tahun 2005-2016 WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718 rata-rata sebanyak 332.376 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 62 di bawah ini.

Tabel 62. Estimasi produksi tongkol di WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718 tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2005	8	81.959	51.750	66.221	100.763	12.593	313.294
2006	14	73.837	74.816	58.137	84.172	12.694	303.670
2007	361	82.043	84.523	93.699	87.700	11.657	359.983
2008	582	63.795	72.518	98.354	98.422	10.253	343.924
2009	442	90.299	67.475	53.974	91.017	11.272	314.479
2010	174	71.711	72.037	60.665	103.744	11.393	319.724
2011	1.211	71.269	86.363	65.004	98.219	8.944	331.010
2012	2.587	80.530	108.888	43.705	97.856	8.255	341.821
2013	7.613	107.845	99.012	41.151	103.814	9.862	369.297

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tahun	Estimasi Jumlah Hasil Tangkapan (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2014	15.560	142.309	129.921	33.413	120.115	26.637	467.955
2015	14.816	109.024	115.970	50.639	86.749	8.190	385.388
2016	24.542	86.010	134.577	41.776	78.147	8.248	373.300
Rata-rata	5.659	88.386	91.488	58.895	95.893	11.667	351.987

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap 2016, data diolah

Dari tabel 62 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk 6 (enam) jenis tongkol berfluktuasi, dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh tenggiri (95.893 ton/tahun), tongkol komo (91.488 ton/tahun), tongkol krai (88.386 ton/tahun), tongkol abu-abu (58.895 ton/tahun), tenggiri papan (11.667 ton/tahun) dan lisong (5.659 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi stabil setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 22.

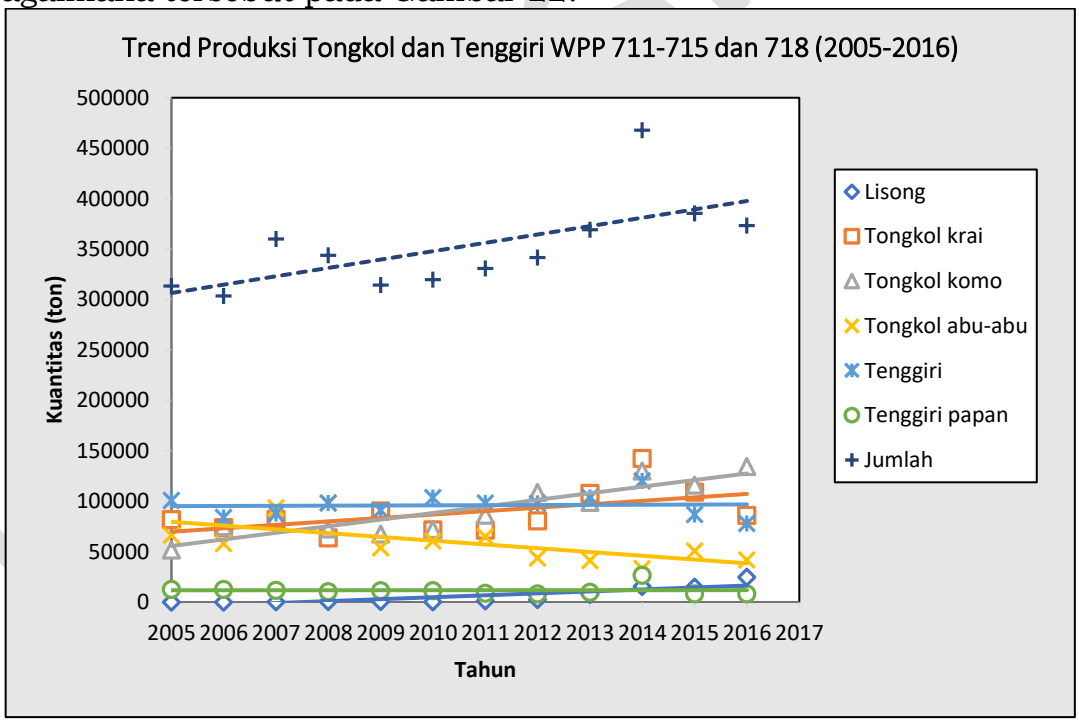

Gambar 22. Tren estimasi produksi tongkol WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 tahun 2005-2016

c) WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan wilayah pengelolaan WCPFC

Produksi jenis tongkol dari WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 tahun 2005-2012 diperkirakan rata-rata sebanyak 40.745 ton/tahun, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 63 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 63. Estimasi produksi tongkol di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 tahun 2005-2016

Tahun	Estimasi Jumlah Produksi (ton)						Jumlah
	Lisong	Tongkol krai	Tongkol komo	Tongkol abu-abu	Tenggiri	Tenggiri papan	
2005	-	5.219	4.374	24.792	3.583	856	38.824
2006	-	7.003	5.078	4.384	3.248	827	20.540
2007	-	9.060	4.497	13.973	4.097	1.188	32.815
2008	-	5.106	7.496	18.704	5.927	872	38.105
2009	18	7.401	11.374	26.510	8.250	1.383	54.936
2010	17	9.133	8.768	27.803	13.956	902	60.579
2011	20	10.206	8.684	14.194	8.550	934	42.588
2012	4	6.353	13.342	13.659	13.148	1.374	47.880
2013	1.492	12.054	15.434	6.046	13.773	1.393	50.192
2014	1.511	15.492	35.090	1.275	13.677	1.575	68.620
2015	7.998	25.322	44.910	2.087	7.091	1.713	89.121
2016	2.359	21.370	21.478	2.424	10.337	2.260	60.228
Rata-rata	1.677	11.143	15.044	12.988	8.803	1.273	50.369

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap (2016), data diolah

Dari tabel 63 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa produksi rata-rata tahun 2005-2016 untuk 6 (enam) jenis tongkol berfluktuasi, dan dari sisi jumlah didominasi secara berturut-turut oleh tongkol komo (15.044 ton/tahun), tongkol abu-abu (12.988 ton/tahun), tongkol krai (11.143 ton/tahun), tenggiri (8.803 ton/tahun), lisong (1.677 ton/tahun), dan tenggiri papan (1.273 ton/tahun). Namun demikian, tren produksi menunjukkan adanya kecenderungan produksi meningkat. Setiap tahun sebagaimana tersebut pada Gambar 23.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

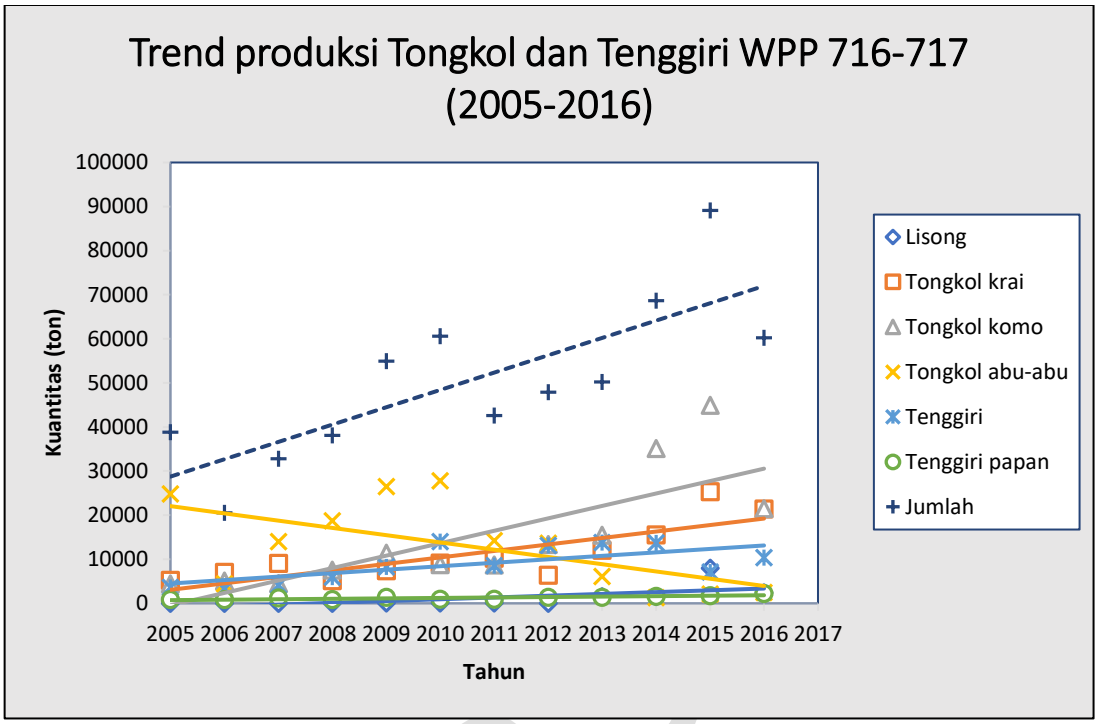

Gambar 23. Tren estimasi produksi tongkol WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 tahun 2005-2016

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan peringkat jumlah produksi dominan menurut jenis tongkol antara jumlah produksi Nasional dan jumlah produksi berdasarkan WPPNRI sebagaimana tersebut pada Tabel 64 di bawah ini.

Tabel 64. Peringkat Produksi Nasional dan berdasarkan WPPNRI

No	Jenis Tongkol	Hasil Tangkapan Dominan			
		Nasional	WPPNRI		
			571,572,573	716, 717	711,712,713, 714,715,718
1	Lisong	6	6	5	6
2	Tongkol Krai	1	1	3	3
3	Tongkol komo	2	2	1	2
4	Tongkol abu-abu	4	3	2	4
5	Tenggiri	3	4	4	1
6	Tenggiri papan	5	5	6	5

c. Produksi Berdasarkan Jenis Alat penangkapan ikan

Produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan yaitu *longline, purse seine, pole and line, handline* dan alat penangkapan ikan lainnya, hanya dapat disajikan untuk tuna dan cakalang. Sedangkan data produksi tongkol berdasarkan jenis alat penangkapan ikan akan dielaborasi dalam pelaksanaan rencana aksi RPP-TCT ini. Adapun data produksi jenis tuna dan cakalang tahun 2005-2016 sebagaimana tersebut pada Tabel 65 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 65. Produksi tuna dan cakalang berdasarkan alat penangkapan ikan Tahun 20013-2018

Alat Tangkap/Spesies	Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	2018
DS (Danish Seine)	**7,450**	**5,786**	**18,508**	**1,970**	**18**	**-**
ALB	-	-	341	3	-	-
BET	213	169	77	285	-	-
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	6,605	5,161	15,384	855	16	-
YFT	632	456	2,706	828	2	-
GI (Gillnet)	**26,431**	**30,830**	**17,674**	**27,695**	**11,257**	**28,527**
ALB	-	-	965	20	29	-
BET	2,032	2,216	1,186	1,303	1,165	2,476
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	21,624	18,752	11,998	20,497	7,231	17,524
YFT	2,774	5,927	2,183	4,218	1,271	6,274
HL (Handline)	**36,616**	**55,907**	**120,066**	**119,427**	**99,281**	**130,442**
ALB	3	9	755	608	14	534
BET	1,472	4,056	6,908	6,470	6,667	4,256
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	8,167	6,382	54,924	62,460	51,137	32,551
YFT	26,974	45,461	57,478	49,889	41,462	93,101
LL (Long Line)	**72,002**	**79,790**	**51,483**	**50,818**	**101,129**	**58,259**
ALB	6,021	8,539	4,488	6,278	2,879	6,495
BET	19,550	23,391	11,682	12,596	18,285	14,480
SBF	1,382	1,063	593	601	835	835
SKJ	9,517	5,729	4,763	6,279	4,352	8,845
YFT	35,532	41,068	29,957	25,063	74,778	27,604
LN (Lift Net)	**1,511**	**1,175**	**8,432**	**5,468**	**11,158**	**2,421**
ALB	-	-	95	-	-	-
BET	26	21	49	119	1	3
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	1,380	1,078	5,780	4,702	4,080	46
YFT	105	76	2,508	647	7,078	2,372
OTH (Other)	**71,760**	**51,555**	**53,082**	**28,766**	**92,843**	**111,657**
ALB	1	3	226	185	2	162
BET	4,591	4,309	3,863	2,742	2,664	6,128
SBF	#NILAI!	#NILAI!	#NILAI!	#NILAI!	#NILAI!	#NILAI!
SKJ	40,177	33,708	36,662	17,760	83,157	70,579
YFT	26,991	13,536	12,331	8,078	7,020	34,789
PL (Pole & Line)	**122,821**	**114,452**	**124,832**	**109,971**	**88,685**	**142,911**
ALB	-	-	-	-	-	-
BET	2,586	2,054	4,906	2,918	841	2,735
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	98,052	89,325	86,202	86,568	63,151	116,425
YFT	22,183	23,073	33,723	20,484	24,694	23,750
PS (Purse Seine)	**281,764**	**195,720**	**89,107**	**175,795**	**421,694**	**173,420**
ALB	70	199	7	18	203	30
BET	16,519	11,570	8,042	12,376	56,845	10,756
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	203,269	147,328	60,462	119,287	171,640	111,278
YFT	61,906	36,622	20,596	44,114	193,006	51,356
TL (Troll Line)	**97,438**	**107,137**	**96,961**	**143,932**	**10,016**	**45,854**
ALB	-	-	424	258	27	234
BET	8,963	8,495	4,905	11,668	114	686
SBF	-	-	-	-	-	-
SKJ	57,546	84,114	66,644	88,886	6,410	29,114
YFT	30,928	14,529	24,988	43,121	3,464	15,820
Grand Total	717,792	520,362	429,787	504,795	724,003	565,066

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2013 (data diolah)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

Data produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan tahun 2005-2012 di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut dari Tabel 66 di bawah ini.

Tabel 66. Produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan tahun 2010-2018 di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

Alat	tahun								
Tangkap/Spes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DS (Danish Sei	**35,553**	**51,911**	**9,689**	**7,450**	**5,786**	**18,508**	**1,970**	**18**	**-**
ALB	341	1,027	193	-	-	341	3	-	-
BET	8,226	7,309	180	213	169	77	285	-	-
SBF		-		-	-	-	-	-	-
SKJ	22,652	34,838	8,091	6,605	5,161	15,384	855	16	-
YFT	4,334	8,737	1,225	632	456	2,706	828	2	-
GI (Gillnet)	**9,429**	**18,036**	**14,123**	**5,441**	**4,220**	**10,796**	**16,553**	**6,011**	**8,302**
ALB	252	152	95	-	-	965	20	29	-
BET	554	1,411	2,493	430	341	938	729	747	1,119
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	7,704	12,755	10,183	4,394	3,434	7,652	12,892	4,086	6,023
YFT	919	3,718	1,353	617	445	1,241	2,912	1,149	1,160
HL (Handline)	**6,729**	**4,926**	**9,278**	**18,439**	**13,846**	**12,051**	**18,274**	**19,647**	**21,253**
ALB	39	39	423	3	9	755	602	14	488
BET	200	237	218	745	590	1,064	1,440	2,053	2,934
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	3,373	2,653	5,002	8,167	6,382	5,087	10,577	8,916	10,168
YFT	3,117	1,997	3,634	9,524	6,865	5,145	5,655	8,664	7,663
LL (Long Line)	**36,215**	**31,164**	**39,857**	**48,282**	**44,173**	**28,312**	**27,207**	**97,184**	**32,619**
ALB	5,505	8,775	7,631	6,021	8,539	4,488	6,278	2,879	6,399
BET	14,202	8,207	11,150	15,037	16,197	7,919	7,642	16,799	8,302
SBF	474	700	910	1,382	1,063	593	601	835	835
SKJ	1,463	4,167	8,943	9,517	5,729	4,763	2,281	4,078	6,556
YFT	14,571	9,315	11,222	16,325	12,645	10,549	10,404	72,594	10,527
LN (Lift Net)	**21,746**	**33,280**	**280**	**1,511**	**1,175**	**8,432**	**5,468**	**11,158**	**2,421**
ALB	4,443	1,128	24	-	-	95	-	-	-
BET	774	8,229	29	26	21	49	119	1	3
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	11,238	15,360	6	1,380	1,078	5,780	4,702	4,080	46
YFT	5,291	8,562	221	105	76	2,508	647	7,078	2,372
OTH (Other)	**34,679**	**13,821**	**10,104**	**12,555**	**9,536**	**17,068**	**8,758**	**2,267**	**21,398**
ALB	1,825	362	12	1	3	226	0	2	-
BET	647	627	2,542	1,254	993	1,995	1,288	152	137
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	13,558	9,677	5,993	6,509	5,087	9,288	5,837	1,094	16,039
YFT	18,649	3,155	1,557	4,791	3,453	5,559	1,632	1,019	5,222
PL (Pole & Line	**6,668**	**1,102**	**8,722**	**16,116**	**12,359**	**8,652**	**1,644**	**6,747**	**14,059**
ALB	625			-	-	-	-	-	-
BET		-		-	-	-	-	21	4
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	5,767	1,093	8,328	12,256	9,577	7,364	1,044	3,335	12,684
YFT	276	9	394	3,860	2,782	1,288	600	3,390	1,371
PSSS (Purse Sei	**934**	**2,156**	**52,600**	**66,182**	**50,765**	**32,746**	**48,831**	**207,089**	**64,686**
ALB			98	70	199	7	18	203	30
BET	167	-	9,537	12,012	9,516	5,779	9,199	54,699	9,448
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	456	1,514	31,190	33,871	26,468	18,597	28,828	30,001	43,613
YFT	311	642	11,776	20,229	14,582	8,363	10,786	122,186	11,595
TL (Troll Line)	**2,712**	**4,080**	**25,691**	**22,823**	**17,575**	**11,503**	**10,054**	**6,947**	**1,819**
ALB			2,552	-	-	424	258	27	78
BET		-	6,392	5,788	4,585	844	1,432	15	-
SBF				-	-	-	-	-	-
SKJ	2,255	2,545	9,597	11,738	9,172	7,023	5,343	4,460	1,741
YFT	457	1,535	7,150	5,297	3,818	3,212	3,021	2,444	-
Grand Total	154,665	160,475	170,344	198,799	159,435	148,068	138,760	357,068	166,557

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pralinjakan

Data produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan tahun 2005-2012 di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 sebagaimana tersebut dari Tabel 67 di bawah ini.

Tabel 67. Produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan Tahun 2013-2018 di WPPNRI 713, WPPNRI 714, dan WPPNRI 715

Gear/Species	Year					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gill Net	18,215	22,668	5,534	9,482	3,685	17,969
BET	1,599	1,868	246	572	418	1,354
SKJ	14,918	15,318	4,346	7,604	3,145	11,501
YFT	1,697	5,482	942	1,306	122	5,114
Handline	14,218	26,427	74,604	74,723	73,878	86,254
ALB				6		
BET	569	3,004	5,368	4,634	4,424	863
SKJ			43,720	36,889	38,291	18,976
YFT	13,649	23,423	25,516	33,194	31,163	66,416
Longline	12,589	18,884	961	17,971	3,749	16,678
ALB						96
BET	1,653	3,521	61	4,946	1,472	4,923
SKJ				3,998	271	2,289
YFT	10,937	15,363	900	9,027	2,006	9,370
Others	49,192	31,668	27,257	13,132	68,796	63,436
ALB				185		129
BET	3,051	2,435	1,813	1,383	2,408	5,032
SKJ	26,517	20,611	22,660	7,472	60,681	39,937
YFT	19,623	8,621	2,784	4,092	5,707	18,337
Pole and Line	85,219	91,364	104,312	96,824	70,467	89,637
BET	2,209	1,996	4,179	2,608	705	2,339
SKJ	68,971	72,393	69,978	77,497	51,441	68,056
YFT	14,039	16,975	30,155	16,719	18,322	19,242
Purse seine	150,242	101,582	21,757	65,647	143,785	86,691
BET	4,507	1,765	1,110	2,669	1,438	867
SKJ	106,672	84,775	16,660	50,196	94,898	52,015
YFT	39,063	15,041	3,987	12,782	47,449	33,810
Troll Line	66,477	68,335	47,295	88,256	2,575	37,843
ALB						156
BET	2,775	3,474	3,762	6,703	84	377
SKJ	40,518	55,064	23,545	55,383	1,654	22,236
YFT	23,184	9,796	19,988	26,171	837	15,075
Grand Total	396,152	360,927	281,719	366,035	366,936	398,509

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Data produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan tahun 2005-2012 di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagaimana tersebut dari Tabel 68 di bawah ini.

Tabel 68. Produksi tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan Tahun 2013-2019 di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Gear/Species	Year					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gill Net	2,775	3,941	1,344	1,660	1,561	2,256
BET	2	6	2	2	-	3
SKJ	2,312	3,351	1,046	1,522	1,521	1,950
YFT	460	584	297	136	40	303
Handline	3,960	15,634	33,411	26,430	5,756	22,935
ALB						46
BET	158	461	476	396	190	460
SKJ			6,118	14,994	3,930	3,407
YFT	3,801	15,173	26,817	11,039	1,636	19,022
Longline	11,130	16,733	22,210	5,640	195	8,962
BET	2,860	3,673	3,701	8	13	1,255
SKJ					4	
YFT	8,271	13,060	18,509	5,632	178	7,707
Others	10,013	10,352	8,757	6,876	21,780	26,824
ALB						33
BET	285	881	55	71	104	959
SKJ	7,151	8,010	4,714	4,451	21,382	14,602
YFT	2,577	1,462	3,988	2,354	295	11,230
Pole and Line	21,486	10,729	11,868	11,502	11,471	39,215
BET	377	57	727	311	115	392
SKJ	16,825	7,356	8,860	8,027	8,374	35,685
YFT	4,284	3,316	2,280	3,165	2,983	3,137
Purse seine	65,340	43,374	34,604	61,317	70,820	22,043
BET	-	289	1,153	509	708	441
SKJ	62,726	36,085	25,205	40,262	46,741	15,650
YFT	2,614	7,000	8,247	20,546	23,370	5,951
Troll Line	8,138	21,228	38,163	45,622	494	6,191
BET	400	435	299	3,533	15	309
SKJ	5,290	19,877	36,076	28,160	296	5,137
YFT	2,447	915	1,788	13,929	183	745
Grand Total	122,842	121,991	150,357	159,047	112,077	128,425

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016 dan 2018 (data diolah).

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

B. Lingkungan

Dalam RPP-TCT ini, ruang lingkup faktor lingkungan (ekosistem) mencakup kondisi oseanografi, habitat ikan serta hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna dan cakalang (*Ecologically Related Species* /ERS).

1. Kondisi Oseanografi

Keberadaan sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol di suatu perairan sangat dipengaruhi oleh kondisi oseanografi dari perairan tersebut utamanya suhu dan salinitas. Kondisi suhu dan salinitas suatu perairan sangat dipengaruhi sistem angin muson, perubahan iklim global dan aliran massa air yang masuk. Oleh sebab itu, sistem angin muson, perubahan iklim global dan aliran massa air sangat mempengaruhi penyebaran tuna, cakalang dan tongkol. Hal ini mengakibatkan tuna, cakalang dan tongkol tidak ditemukan di semua perairan.

Menurut Jade (1990), pada bulan Desember 1989 telah terjadi distribusi vertikal suhu perairan dari kedalaman 500 meter hingga permukaan, mulai dari barat Australia (stasiun paling jauh) hingga pantai pulau Bali (stasiun paling dekat) yaitu massa air dingin dengan suhu 25^0C pada kedalaman 100 m naik menuju ke permukaan. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu dan salinitas perairan tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyebaran tuna, cakalang dan tongkol di perairan tersebut. Pada perairan selatan Jawa pada posisi lintang 104^0-119^0 BT dan 8^0-13^0 LS, yang dikenal kaya akan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol, terjadi pelapisan massa air dengan kedalaman batas atas 40-75 m dan batas bawah 150-200 m dengan suhu permukaan umumnya > 27^0C dan salinitas rendah < 34.5 psu (Purba *et al*, 1997).

Menurut Muklis (2008), suhu permukaan laut di daerah penangkapan cakalang di utara Nangroe Aceh Darusalam pada bulan Agustus 2007 yaitu tertinggi 30,10^0C dan terendah sebesar 28^0C pada bulan Juni 2007. Sedangkan untuk suhu permukaan laut tertinggi pada daerah penangkapan ikan tongkol terjadi pada bulan April 2006 (peralihan barat-timur) sebesar 30^0C dan terendah pada bulan Juni 2007 (musim timur) sebesar 28^0C.

Selanjutnya Menurut Lehodey *et.al* (1998), suhu permukaan laut di barat Pasifik rata-rata 29^0C dan memiliki produktivitas primer yang rendah di dalamnya jika dibandingkan dengan perairan bagian timur dan tengah Pasifik. Wilayah ini merupakan daerah penangkapan cakalang, terkonsentrasi pada daerah sekitar zona konvergen antara daerah hangat (>28 – 29^0C) dengan massa air bersalinitas rendah dari *warm pool* dan air dingin dengan salinitas tinggi dari *equatorial upwelling*. Zona konvergen ini ditandai oleh salinitas yang didekati oleh *isotherm* 28,5^0C. Selanjutnya menurut Lehodey *et.al* (2003), indikator lokasi zona konvergen sekaligus sebagai lokasi penangkapan tuna dan cakalang yaitu pada *isotherm* 29^0C. Distribusi madidihang dan cakalang

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

di perairan utara Papua (Pasifik sebelah barat) terkonsentrasi pada *sentroid-sentroid* air hangat 28,5 – 31,2^{0}C kecuali pada bulan Juli 2003. Hal ini diduga dipengaruhi oleh *equatorial upwelling* pada area tersebut (Harold, 2004).

Laut Banda yang juga dikenal sebagai habitat tuna, cakalang dan tongkol, digambarkan sebagai daerah yang memiliki diameter 400 km dari Utara ke Selatan, dan 800 km dari Timur ke Barat. Kedalaman rata-rata laut ini diperkirakan 5.000 m (Sulaiman, 2000 dikutip dalam Widodo *et.al*, 2012). Selanjutnya menurut Widodo *et.al* (2012), Laut Banda digolongkan juga sebagai satu-satunya ekosistem laut semi-tertutup di khatulistiwa. Laut Banda juga dianggap sebagai bagian Arus Laut Indonesia (Arlindo) yang menghubungkan arus dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Selama musim timur, bergerak aliran dari Laut Banda sampai Laut Flores dan kemudian bergerak ke Laut Jawa dan akhirnya berhenti di Laut Cina Selatan. Pada musim barat, bergerak aliran dengan cara yang berlawanan dari Laut Jawa dan Selat Malaka melalui Laut Flores dan berhenti di Laut Banda. Selama musim barat, salinitas maksimum Laut Flores dan Laut Banda sebesar 110 dBar dan minimum sebesar 300 dBar yang merupakan karakteristik dari laut sub Tropic Pasifik Utara dan Samudera Pasifik Utara Tengah (Widodo *et.al*, 2012). Salinitas permukaan air dianggap lebih rendah dari sub permukaan dan fenomena ini telah diidentifikasi karena tingginya tingkat hujan serta air tawar mengalir dari sungai ke laut ini (Widodo *et.al*, 2012).

2. Habitat Ikan

Pengelolaan habitat ikan merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol. Pengelolaan habitat ikan umumnya dilakukan melalui penetapan suatu kawasan konservasi. Hingga tahun 2017, capaian kawasan konservasi mencapai 19,14 juta hektar. Hal ini merupakan bukti komitmen Indonesia untuk melindungi habitat ikan dan biota lainnya.

Penetapan kawasan konservasi tersebut di atas telah dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa tenggara Timur;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEPMEN-KP/2013 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut disekitarnya di Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigio sebelah Barat dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Di tingkat regional, upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil termuat dalam koridor kerjasama "*Coral Triangle Initiative*". Pada kerjasama tersebut, telah disusun sistem pengelolaan kawasan konservasi di segitiga karang yang memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang di 6 (enam) negara anggota. Selain itu, juga manfaat bagi masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

~~Selanjutnya, untuk mendukung upaya pemulihan stok sumber daya ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melaksanakan program pembangunan rumah ikan (*fish apartment*). Rumah ikan merupakan suatu bangunan yang tersusun dari benda padat yang ditempatkan di dalam~~

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

~~perairan, berfungsi sebagai tempat ikan berpijah (*spawning ground*) dan/atau tempat perlindungan asuhan dan pembesaran bagi telur ikan serta anak-anak ikan (*nursery ground*). Adapun target pembangunan rumah ikan tahun 2011-2015 sebanyak 5.250 modul, sedangkan realisasi sampai tahun 2014 baru mencapai 1.650 modul (31,5%). Direncanakan, pada tahun 2015 jumlah rumah ikan akan dibangun sebanyak 3.600 modul (68,5%).~~

3. Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*) dan Species yang Secara Ekologi Berasosiasi Dengan Tuna dan Cakalang (*Ecologically Related Species/ERS*)

IOTC dan WCPFC melakukan pengelolaan lingkungan *(*ekosistem*)* melalui pengelolaan hasil tangkapan sampingan *(bycatch)* dan species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna *(Ecologically Related Species/ERS)* atau disebut juga hasil tangkapan yang tidak disengaja (*incidental catch).* Terdapat kecenderungan bahwa keberhasilan pengelolaan tuna, juga ditentukan melalui keberhasilan pengelolaan *bycatch* dan *ERS.* Dalam hal ini, hasil tangkapan sampingan *(bycatch)* umumnya terdiri dari jenis hiu *(sharks)* dan *billfish,* sedangkan species yang secara ekologi berasosiasi dengan tuna *(Ecologically Related Species/ERS)* umumnya terdiri dari penyu laut *(marine turtle),* burung laut *(seabirds)* dan mamalia laut *(cetacean).*

a. Hiu (*Sharks*)

Dalam kegiatan penangkapan tuna dan cakalang, paling sedikit terdapat 7 (tujuh) jenis hiu yang umum tertangkap bersamaan dengan penangkapan jenis tuna yaitu hiu selendang (*blue shark),* hiu koboi *(oceanic whitetip sharks),* hiu tenggiri *(shortfin mako shark),* hiu lanjam *(silky shark),* hiu monyet *(bigeye thresher shark),* hiu tikus *(pelagic thresher shark)* dan hiu martil *(scalloped hammerhead shark).*

1) Potensi dan tingkat pemanfaatan hiu (*sharks*) di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 yang merupakan wilayah pengelolaan IOTC

Berdasarkan laporan hasil penelitian komite Ilmiah IOTC (2013), potensi dan tingkat pemanfaatan masing-masing jenis hiu di atas di wilayah pengelolaan IOTC, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Hiu selendang (*blue shark*)

Potensi hiu selendang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) adalah 33.000 ton. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 27.259 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 29.790 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu selendang sampai tahun 2017, disimpulkan tidak mengalami *overfishing* sebagaimana tersebut pada Tabel 69 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 69. Tingkat pemanfaatan hiu selendang (*blue shark*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	27.259 t	
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.735 t	
	Produksi rata-rata 2013-2017:	29.790 t	
	Rata-rata tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	51.712	
	MSY (1.000t)(80% CI):	33.0 (29.5-36.6)	
	F_{2015}/F_{MSY} (80% CI):	0.87 (0.6701.09)	
	SB_{2015}/SB_{MSY} (80% CI):	1.54 (1.37-1.72)	
	SB_{2015}/SB_0 (80% CI):	0.52 (0.46-0.56)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

b) Hiu koboi (*oceanic whitetip sharks*)

Potensi hiu koboi dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 48 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 230 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu koboi sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 70 di bawah ini.

Tabel 70. Tingkat pemanfaatan hiu koboi (*oceanic whitetip sharks*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	48 t	*uncertain*
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.883 t	
	Produksi rata-rata 2017:	230 t	
	MSY (kisaran):	Unknown	
	F_{2015}/F_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2015}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown	

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	SB_{2015}/SB_0 (kisaran):	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

c) Hiu Tenggiri (*shortfin mako shark*)

Potensi hiu tenggiri dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 1.664 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 1.555 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu tenggiri sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 71 di bawah ini.

Tabel 71. Tingkat pemanfaatan hiu tenggiri (*shortfin mako shark*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	1.664 t	*uncertain*
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.883 t	
	Produksi rata-rata 2017:	1.555 t	
	Rata-rata tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	51.712 t	
	MSY (kisaran):	Unknown	
	F_{2015}/F_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2015}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2015}/SB_0 (kisaran):	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

d) Hiu lanjam (*silky shark*)

Potensi hiu lanjam dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 2.175 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 2.967 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu lanjam sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 72 di bawah ini.

Tabel 72. Tingkat pemanfaatan hiu lanjam (silky shark) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	2.175 t	*uncertain*
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.883 t	
	Produksi rata-rata 2017:	2.967 t	
	Rata-rata tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	51.712 t	
	MSY (kisaran):	Unknown	
	F_{2015}/F_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2015}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2015}/SB_0 (kisaran):	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

e) Hiu monyet (*bigeye threser shark*)

Potensi hiu monyet dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 0 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 0 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu monyet sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 73 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 73. Tingkat pemanfaatan hiu monyet (*bigeye threser shark*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	0 t	*uncertain*
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.883 t	
	Produksi rata-rata 2017:	0 t	
	Rata-rata termasuk di tempat lain (nei) hiu:	51.712 t	
	MSY (kisaran):	Unknown	
	F_{2012}/F_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2012}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2012}/SB_0 (kisaran):	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

f) Hiu tikus (*pelagic threser shark*)

Potensi hiu tikus dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 0 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 0 ton/tahun. Dalam hal ini tingkat pemanfaatan hiu tikus sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 74 di bawah ini.

Tabel 74. Tabel Pemanfaatan Hiu Tikus di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017:	0 t	*uncertain*
	Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	56.883 t	
	Produksi rata-rata 2017:	0 t	
	Rata-rata tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	51.712 t	
	MSY (kisaran):	Unknown	
	F_{2012}/F_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2012}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown	
	SB_{2012}/SB_0 (kisaran):	Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

g) Hiu martil (*scalloped hammerhead shark*)

Potensi hiu martil dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) belum dapat ditentukan. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 118 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 76 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan hiu martil sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 75 di bawah ini.

Tabel 75. Tingkat pemanfaatan hiu martil (*scalloped hammerhead shark*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi yang dilaporkan 2017: Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu: Produksi rata-rata 2017: Tidak termasuk di tempat lain (nei) hiu:	118 t 56.883 t 74 t 51.712 t	*uncertain*
	MSY (kisaran): F_{2012}/F_{MSY} (kisaran): SB_{2012}/SB_{MSY} (kisaran):	Unknown Unknown Unknown	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa estimasi tingkat pemanfaatan 7 (tujuh) jenis hiu di seluruh Samudera Hindia termasuk WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Tabel 76 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 76. Estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan hiu di Samudera Hindia

No	Jenis Ikan			Estimasi Potensi	Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah		
1	Hiu selendang	*Blue shark*	*Prionace glauca*	Tidak mengalami *overfishing*	Tidak mengalami *overfishing*
2	Hiu koboi	*Oceanic whitetip shark*	*Carcharhinus longimanus*	*uncertain*	*uncertain*
3	Hiu martil	*Scalloped hammerhead shark*	*Sphyrna lewini*	*uncertain*	*uncertain*
4	Hiu tenggiri	*Shortfin mako shark*	*Isurus oxyrinchus*	*uncertain*	*uncertain*
5	Hiu lanjam	*Silky shark*	*Carcharhinus falciformis*	*uncertain*	*uncertain*
6	Hiu monyet	*Bigeye thresher shark*	*Alopias superciliosus*	*uncertain*	*uncertain*
7	Hiu tikus	*Pelagic thresher shark*	*Alopias pelagius*	*uncertain*	*uncertain*

2) Hasil Penelitian P4KSI tentang Hiu

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan (P4KSI) telah melakukan penelitian tentang hiu, dengan hasil sebagai berikut:

a) Hiu selendang (*blue shark*)

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 di Perairan Selatan Nusa Tenggara yang didaratkan di Pelabuhan Tanjung Luar menunjukkan bahwa hiu selendang yang tertangkap berukuran panjang total (TL) 95 – 383,0 cm untuk hiu jantan dan 113 – 333,02 cm untuk hiu betina. Tingkat eskploitasi belum diketahui namun hasil analisis menunjukkan bahwa 39,96% - 44,71% hiu selendang yang tertangkap pada saat mencapai panjang optimumnya, sehingga ada kecenderungan dari aktivitas penangkapan berlebih.

b) Hiu martil (*Scalloped hammerhead shark*)

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Peairan Selatan Nusa Tenggara dan didaratkan di Pelabuhan Tanjung Luar menunjukkan bahwa ukuran hiu martil (*scalloped hammerhead shark*) yang tertangkap di perairan Samudera Hindia didominasi oleh jenis kelamin betina dengan panjang total (TL) 81 – 320 cm dan 91 – 310 cm untuk hiu jenis kelamin jantan. Hiu yang tertangkap didominasi oleh hiu yang belum matang kelamin sehingga berpotensi terjadinya *recruitment overfishing* dan laju pertumbuhan dan kematian hiu jantan lebih tinggi dibanding betina.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

c) Hiu lanjam (*silky shark*)

Hasil penelitian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hiu yang tertangkap di Samudera Hindia memiliki panjang total (TL) sebesar 65-300 cm untuk hiu betina, dan 74-315 cm untuk hiu jantan. Dari jumlah tersebut hanya 17% betina dan 35% jantang yang tertangkap dalam kondisi matang gonad. Sementara sebagian besar hiu yang tertangkap adalah hiu yang masih muda dan belum matang gonad. Laju eksploitasi (E) hiu lanjam sebesar 0,82 sehingga menandakan tingkat eksploitasi hiu ini sudah tinggi.

d) Hiu monyet (*Bigeye thresher shark)*/hiu tikus (*Pelagic thresher shark)*

Hasil penelitian tahun 2010 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menunjukkan bahwa ukuran hiu monyet (*bigeye thresher shark*)/hiu tikus (*pelagic thresher shark*) jantan yang tertangkap rawai tuna yang dioperasikan di WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 belum diketahui tingkat eksploitasinya, namun diketahui bahwa terjadi penurunan produksi antara tahun 2005 dan 2011.

Diketahui bahwa TL 202-309 cm (modus 271-280 cm), dan hiu monyet betina mempunyai TL 206-328 cm (modus 291-300 cm). Perbandingan jumlah hiu monyet jantan muda dan dewasa yang tertangkap rawai tuna adalah 26,4:73,4 % dan hiu monyet betina 46,5:53,5 %.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*) menunjukkan bahwa hiu tikus dan hiu monyet yang tertangkap didominasi oleh hiu yang belum dewasa. Hiu tikus (*pelagic thresher shark)* yang tertangkap memiliki panjang total (FL) antara 55-185 cm. Sementara hiu tikus mencapai ukuran dewasa pada ukuran 240-250cm jantan dan 260-285cm untuk betina.

Disisi lain, hiu monyet (*Bigeye thresher shark)* yang tertangkap memiliki panjang total (TL) berkisar antara 90-268cm. Sementara hiu monyet dewasa memiliki ukuran 247-269cm untuk jantan dan 246-290 untuk hiu betina.

e) Hiu tenggiri (*Shortfin mako shark*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiu tenggiri di samudera Hindia tertangkap rawai tuna ukuran TL 110,0-270,0 cm. Tingkat eksploitasi belum diketahui, namun hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah hiu mako muda yang tertangkap lebih banyak (sekitar 59%) dibanding yang telah dewasa.

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang menggunakan jaring insang

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

hanyut mendapatkan jenis hiu tenggiri (*Shortfin mako shark)* dengan panjang total (TL) berukuran 106-286 cm. Berdasarkan hal tersebut, hiu tenggiri yang tertangkap kebanyakan sudah masuk dalam kategori dewasa, karena hiu tenggiri mencapai ukuran dewasa sekitar 156cm.

3) Analisa data *bycatch onboard observer* perikanan tuna longline di Indonesia periode tahun 2006-2014 hasil kegiatan WWF-Indonesia 2014

WWF-Indonesia telah melakukan kegiatan analisa data *bycatch onboard observer* perikanan tuna longline di Indonesia periode tahun 2006-2014 dengan hasil hiu yang paling banyak tertangkap di wilayah tangkap Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah jenis hiu selendang (*blue shark*) dengan jumlah 703 individu dengan rata-rata ukuran berkisar 50-250 m, dan diikuti dengan jenis lainnya seperti hiu tikus (*pelagic threser sharks*), hiu martil (*scalloped hammerhead sharks*), hiu tenggiri (*Shortfin Mako Sharks*).

a) Samudera Hindia

Hiu merupakan salah satu hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang cukup dominan ditemui dalam pengoperasian alat penangkapan ikan longline. Setidaknya tercatat dari 4.182 setting longline di wilayah penangkapan Samudera Hindia, 694 setting terdapat hiu dengan jumlah total sebanyak 1.277 ekor hiu pada periode 2006 – 2014 (Juli). Setidaknya rata-rata didapatkan 8-9 ekor hiu setiap tripnya. *Bycatch* tertinggi ditemui pada jenis hiu selendang (*Blue shark*) yang diikuti oleh jenis hiu tikus (*pelagic threser sharks*). Informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada Tabel 77 di bawah ini.

Tabel 77. Jumlah bycatch hiu di Samudera Hindia

Indian Ocean	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Blue shark	18	2	58	40	6	3	13	166	75	381
Pelagic threser sharks	38	0	11	5	2	2	1	52	6	117
Shortfin mako sharks	5	0	1	0	1	0	0	3	0	10
Scalloped hammerhead sharks	5	0	0	0	0	0	1	0	0	6
Other Sharks	78	365	67	46	18	8	22	71	88	763
	144	367	137	91	27	13	37	292	169	1277

Sumber : WWF-Indonesia, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah mata kail yang digunakan pada tiap settingnya rata-rata menggunakan 1161 – 1.536 mata pancing. Jenis hiu selendang sebagai jenis yang sering

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

tertangkap memiliki *hook rate* tertinggi dengan 0,3519 individu/1000 *hook*, yang diikuti oleh jenis hiu martil dengan *hook rate* 0,11296 individu/1000 *hook*, hiu tikus 0,0895 individu/1000 *hook*, dan Hiu tenggiri dengan *hook rate* sebesar 0,0596 individu / 1000 *hook* sebagaimana tersebut pada Tabel 78 di bawah ini.

Tabel 78. *Hook rate bycatch* hiu di Samudera Hindia

Indian Ocean	Jumlah Hiu Tertangkap	Jumlah Setting	Jumlah kapal	Rata-rata Jumlah mata Pancing	Hook rate (1000)
Pelagic threser sharks	114	74	17	1.395,73	0,0895
Scalloped hammerhead sharks	6	4	2	1.161,00	0,1296
Shortfinn mako sharks	10	10	5	1.332,70	0,0596
Blue shark	380	47	25	1.532,98	0,3519
Hiu lainnya	777	559	42	1.535,38	0,0711

Sumber : WWF-Indonesia, 2014

b) Samudera Pasifik

Pencatatan yang dilakukan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai salah satu pelabuhan perikanan penangkapan longline di laut pasifik tidak luput juga dengan tertangkapnya *bycatch* hiu. Tercatat setidaknya dari 1.449 setting longline, 508 setting ditemukan hiu tersangkut kail dengan jumlah hiu yang tertangkap sebanyak 943 ekor pada periode 2007 – 2013. Setidaknya rata-rata 12-13 ekor hiu setiap tripnya. *Bycatch* hiu tertinggi yang didapatkan yaitu hiu selendang dan hiu tikus dengan masing-masing didapatkan 322 ekor dan 80 ekor. Informasi jumlah hiu tertangkap sejak tahun 2007 – 2013 sebagaimana tersebut pada Tabel 79 di bawah ini.

Tabel 79. Jumlah *bycatch* hiu di Samudera Pasifik

Indian Ocean	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Blue shark	4	15	87	96	28	38	38	54	322
Pelagic threser sharks	0	4	2	5	5	5	54	10	80
Shortfin mako sharks	0	0	0	1	2	2	0	0	3
Scalloped hammerhead sharks	2	12	0	0	2	2	3	0	19
Other Sharks	89	85	78	78	96	96	52	30	508
	95	116	167	180	133	133	147	94	932

Sumber : WWF-Indonesia, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah mata kail yang digunakan pada tiap settingnya rata-rata menggunakan 1248 – 1.864 mata pancing. Jenis hiu selendang sebagai jenis yang sering

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

tertangkap memiliki *hook rate* tertinggi dengan 0,1159 individu/1000 *hook*, yang diikuti oleh jenis hiu tenggiri dengan *hook* rate 0,787 individu/1000 *hook*, hiu tikus dengan hook rate 0,0761 individu/1000 *hook*, dan hiu martil sebesar 0,0401 individiu/1000 *hook* sebagaimana tersebut pada Tabel 80 di bawah ini.

Tabel 80. *Hook rate bycatch* hiu di Samudera Pasifik

Indian Ocean	Jumlah Hiu Tertangkap	Jumlah Setting	Jumlah kapal	Rata-rata Jumlah mata Pancing	*Hook rate* (1000)
Pelagic threser sharks	34	24	13	1.391,57	0,0761
Scalloped hammerhead sharks	20	14	6	1.864,33	0,0401
Shortfin mako sharks	3	3	3	1.152,00	0,0787
Blue shark	321	205	20	1.248,47	0,1159
Hiu lainnya	508	262	27	1.461,41	0,0769

Sumber : WWF-Indonesia, 2014

b. Billfish

Sekurang-kurangnya, terdapat 5 (lima) jenis *billfish* yang dapat tertangkap bersamaan dengan penangkapan tuna yaitu ikan todak/pedang (*swordfish*), setuhuk hitam (*black marlin*), setuhuk loreng (*striped marlin*), setuhuk biru (*blue marlin*) dan ikan layaran indo-pasifik (*indo-pasific sailfish*). Berdasarkan laporan hasil penelitian Komite Ilmiah IOTC (2018), kondisi estimasi stok masing-masing jenis di atas di wilayah pengelolaan IOTC (WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573), dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1) Ikan todak/pedang (*swordfish*)

Potensi ikan todak/pedang dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada tahun 2017 sebesar 31.590 ton/tahun. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 34.782 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 31.405 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan ikan todak sampai tahun 2017, disimpulkan belum *over fished* sebagaimana tersebut pada Tabel 81 di bawah ini.

Tabel 81. Tingkat pemanfaatan ikan todak/pedang (*swordfish*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi 2017[2]:	34.782[3] (53.658[4]) t	
	Produksi rata-rata 2013 - 2017:	31.405[3] (42.187[4])t	
	MSY (1.000 t) (80% CI) :	29.900 – 34.200 t	
	F_{2015}/F_{MSY} (80% CI) :	0,76 (0,41-1,04)	

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	SB_{2015}/SB_{MSY} (80% CI) : SB_{2015}/SB_{1950} (80% CI):	1,50 (1,05-2,45) 0,31 (0,26-0,43)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC
[2] Proporsi tangkapan yang secara penuh atau sebagian diestimasi oleh IOTC tahun 2018: 54%
[3] Skenario tangkapan terendah (IOTC-2018-WPB16-DATA03b): terdapat perubahan metode untuk estimasi tangkapan longline tuna Indonesia
[4] Skenario tangkapan tertinggi (IOTC-2018-WPB16-DATA03a): estimasi tangkapan IOTC untuk kapal longline tuna Indonesia diperoleh dari perwakilan kapal perikanan (cth. Taiwan, China longline tuna)

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

2) Setuhuk hitam (*black marlin*)

Potensi setuhuk hitam dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada tahun 2017 sebesar 12.930 (9.440-18.200) ton/tahun. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 21.250 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 18.673 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan setuhuk hitam sampai tahun 2017, disimpulkan belum dapat ditentukan (*uncertain*) sebagaimana tersebut pada Tabel 82 di bawah ini.

Tabel 82. Tingkat pemanfaatan setuhuk hitam (black marlin) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2013
Samudera Hindia	Produksi 2017[2]: Produksi rata-rata 2013-2017:	21.250 (22.625[4]) t 18.673[3] (19.546[4]) t	55%*
	MSY (1.000t)(80% CI): F_{2017}/F_{MSY} (80% CI): B_{2017}/B_{MSY} (80% CI): B_{2017}/B_0 (80% CI):	12,93 (9,44-18,20) 0,96 (0,77-1,12) 1,68 (1,32-2,10) 0,62 (0,49-0,78)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC
[2] Proporsi tangkapan yang secara penuh atau sebagian diestimasi oleh IOTC tahun 2018: 54%
[3] Skenario tangkapan terendah (IOTC-2018-WPB16-DATA03b): terdapat perubahan metode untuk estimasi tangkapan longline tuna Indonesia
[4] Skenario tangkapan tertinggi (IOTC-2018-WPB16-DATA03a): estimasi tangkapan IOTC untuk kapal longline tuna Indonesia diperoleh dari perwakilan kapal perikanan (cth. Taiwan, China longline tuna)
*Kemungkinan estimasi jumlah stok didapatkan dari interval kepercayaan yang berasosiasi dengan kondisi stok terbaru

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		45%
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih		55%

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

(*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY} \leq 1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

3) Setuhuk loreng (*striped marlin*)

Potensi setuhuk loreng dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada tahun 2017 sebesar 4.730 ton. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 3.082. dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 3.578 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan setuhuk loreng sampai tahun 2017, disimpulkan telah mengalami kondisi *overfished* sebagaimana tersebut pada Tabel 83 di bawah ini.

Tabel 83. Tingkat pemanfaatan setuhuk loreng (*striped marlin*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi 2017: Produksi rata-rata 2013-2017:	3.082[3] (4.087[4]) t 3.587[3] (4.495[4])	**99.8%***
	MSY (1.000 t)(kisaran): F_{2017}/F_{MSY} (kisaran): B_{2017}/B_{MSY} (kisaran): B_{2017}/B_{1950} (kisaran):	4,74 (4,27-5,18) 1,99 (1,21-3,62) 0,33 (0,18-0,54) 0,12 (0,07-0,20)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC
[2] Proporsi tangkapan yang secara penuh atau sebagian diestimasi oleh IOTC tahun 2018: 54%
[3] Skenario tangkapan terendah (IOTC-2018-WPB16-DATA03b): terdapat perubahan metode untuk estimasi tangkapan longline tuna Indonesia
[4] Skenario tangkapan tertinggi (IOTC-2018-WPB16-DATA03a): estimasi tangkapan IOTC untuk kapal longline tuna Indonesia diperoleh dari perwakilan kapal perikanan (cth. Taiwan, China longline tuna)
*Kemungkinan estimasi jumlah stok didapatkan dari interval kepercayaan yang berasosiasi dengan kondisi stok terbaru

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY} < 1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY} \geq 1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY} > 1$)	99.8%	
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY} \leq 1$)	0,2%	
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

4) Setuhuk biru (*blue marlin*)

Potensi setuhuk biru dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada tahun 2017 sebesar 11.930 ton/tahun. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 17.417 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 16.082 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan setuhuk biru sampai tahun 2017, disimpulkan dalam keadaan lebih tangkap (*over fished*) sebagaimana tersebut pada Tabel 84 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 84. Tingkat Pemanfaatan Setuhuk Biru (*blue marlin*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2017
Samudera Hindia	Produksi 2017:	17.417[4] t (12.155[3])t	**46.8%***
	Produksi rata-rata 2017:	16.082[4] t (11.635[3]) t	
	MSY (1.000 t)(80% CI:	11,93 (9,23-16,15)	
	F_{MSY} (80% CI):	0,11 (0,08-0,16)	
	B_{2015}/B_{MSY} (80% CI):	1,11 (0,90-1,35)	
	B_{2015}/B_0 (80% CI):	0,56 (0,44-0,71)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)	24.6%	46.8%
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)	1.0%	27.6%
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

5) Ikan layaran Indo-Pasifik (*indo-pacific sailfish*)

Potensi ikan layaran Indo-Pasifik dalam bentuk produksi maksimum lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) pada tahun 2018 sebesar 25.000 ton. Total produksi seluruh negara anggota IOTC tahun 2017 sebanyak 33.280 ton dan produksi tahun 2013-2017 rata-rata sebanyak 29.873 ton/tahun. Dalam hal ini, tingkat pemanfaatan ikan layaran Indo-Pasifik sampai tahun 2017, disimpulkan belum mengalami *overfishing* tapi mengacu kepada *overfishing* sebagaimana tersebut pada Tabel 85 di bawah ini.

Tabel 85. Tingkat pemanfaatan ikan layaran indo-pasifik (*Istiophorus platypterus*) di Samudera Hindia

Wilayah[1]	Indikator		Tingkat pemanfaatan 2018
Samudera Hindia	Produksi 2017[2]:	33.280[3] t	
	Produksi rata-rata 2013-2017:	29.873[3] t	
	MSY (1.000t)(80% CI:	25,00 (16,18-35,17)	
	$F_{current}/F_{MSY}$ (80% CI):	1,05 (0,63-1,63)	
	$B_{current}/B_{MSY}$ (80% CI):	1,13 (0,87-1,37)	
	$B_{current}/SB_0$ (80% CI):	0,56 (0,44-0,67)	

[1] Batas wilayah untuk Samudera Hindia = area kompetensi IOTC

[2] Proporsi tangkapan yang diestimasi seluruhnya atau sebagian oleh IOTC tahun 2018: 52%

[3] Sumber: Tangkapan nominal (IOTC-2018-WPB16-DATA03b)

Kunci warna	Stok yang sudah lebih tangkap (*Stock overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}<1$)	Stok yang tidak lebih tangkap (*Stock not overfished*) ($SB_{year}/SB_{MSY}\geq1$)
Stok mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}>1$)		
Stok tidak mengarah ke penangkapan berlebih (*Stock not subject to overfishing*) ($F_{year}/F_{MSY}\leq1$)		
Tidak diasses/belum ditentukan (*Not assessed/Uncertain*)		

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi stok *bycatch* yang terdiri dari *billfish* yang dikelola oleh IOTC di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagaimana tersebut pada Tabel 86 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Draft Naskah

Tabel 86. Estimasi tingkat pemanfaatan bycatch di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

No	Jenis Ikan			Estimasi Potensi (MSY = t/tahun)	Estimasi Tingkat pemanfaatan
	Indonesia	Inggris	Ilmiah		
1	Ikan todak/pedang	*Swordfish*	*Xiphias gladius*	31.590 (26.300 – 45.500)	Belum *overfished*
2	Setuhuk hitam	*Black marlin*	*Makaria indica*	12.930 (9.440 – 18.200)	Belum *overfished*
3	Setuhuk biru	*Blue marlin*	*Makaira nigricans*	11.930 (9.230 – 16.150)	Belum *overfished* namun mengarah ke *overfishing*
4	Setuhuk Loreng	*Striped marlin*	*Tetrapturus audax*	4.730 (4.270 – 5.180)	*Overfished*
5	Ikan layaran Indo-Pasifik	*Indo-pasific sailfish*	*Istiophorus platypterus*	25.000 (16.180 – 35.170)	Belum *overfished* namun mengarah ke *overfishing*

c. Spesies Yang Secara Ekologi Berasosiasi Dengan Tuna/*Ecologically Related Species (ERS)*

Jenis species yang tertangkap bersamaan dengan tuna dan cakalang karena secara ekologi berasosiasi dengan ikan tersebut/*Ecologically related Species (ERS)* sering juga disebut hasil tangkapan yang tidak disengaja *(incidental catch). ERS* umumnya terdiri dari spesies non-ikan, seperti penyu laut *(marine turtle),* dan/atau burung laut *(sea birds)* dan/atau mamalia laut *(cetacean*).

1) Penyu laut

a. Samudera Hindia

Penyu laut yang tertangkap tanpa sengaja di perairan Samudera Hindia tercatat sebanyak 129 ekor dengan jumlah 1.464 setting longline tuna pada periode 2006 – 2014 (Juli). Setidaknya didapatkan 1 penyu laut setiap tripnya dengan jumlah *hook rate* dari semua jenis penyu laut yang tertangkap sebesar 0,4927 individu/1000 hook. Informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada Tabel 87 di bawah ini.

Tabel 87. Hook rate bycatch penyu laut di Samudera Hindia

Indian Ocean	Mata pancing	*Hook rate*	*Hook rate*/ 1000	Jumlah Setting	Jumlah kapal
Penyu Belimbing	1.184,62	0,0913	0,0770	8	6
Penyu Lekang	2.128,82	0,0747	0,0351	78	28
Penyu Hijau	1.484,67	0,0883	0,0595	6	3
Penyu Sisik	1.498,50	0,0677	0,0452	2	2
Penyu Tempayan	1.439,23	0,0766	0,0532	7	2

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Penyu Pipih	1.213,11	0,0942	0,0776	7	3

Sumber : Laporan WWF-Indonesia, 2014

b. Samudera Pasifik

Penyu laut yang tertangkap tanpa sengaja di perairan Pasifik tercatat sebanyak 475 ekor dengan jumlah 1.450 *setting longline* tuna pada periode 2007 – 2014 (Juli). Setidaknya 6 (enam) ekor penyu laut setiap tripnya dengan jumlah *hook rate* dari semua jenis penyu laut yang tertangkap sebesar 0,4709 individu/ 1000 hook. *Hook rate* perjenis penyu laut yang tertangkap *bycatch* terbesar yaitu jenis penyu hijau. Informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada Tabel 88 di bawah ini.

Tabel 88. Hook rate bycatch penyu di Samudera Pasifik

Indian Ocean	Mata pancing	*Hook rate*	*Hook rate*r /1000	Jumlah Setting	Jumlah kapal
Penyu Belimbing	1.309,23	0,0825	0,0630	7	6
Penyu Lekang	2.176,06	0,0702	0,0322	317	24
Penyu Hijau	1.544,79	0,0877	0,0567	33	8
Penyu Sisik	1.535,70	0,0695	0,0453	2	7
Penyu Tempayan	1.480,53	0,0761	0,0514	23	10
Penyu Pipih	1.360,05	0,0849	0,0625	15	5

Sumber : Laporan WWF-Indonesia, 2014

2) Mamalia laut (*cetacean*)

Mamalia laut yang tertangkap tanpa sengaja pada alat penangkapan ikan tidak sebanyak pada jenis Hiu, tercatat 2 jenis mamalia laut, yaitu lumba-lumba dan paus pilot (*Pilot whale*). Setidaknya tertangkap sebanyak 21 ekor lumba-lumba dengan kisaran ukuran 110-195 cm dan 3 ekor paus pilot dengan ukuran 425 cm. Tertangkapnya lumba-lumba itu sendiri umumnya terbelit pada senar utama pada longline tuna.

a) Samudera Hindia

Potensi tertangkap *bycatch* yang terjadi pada mamalia laut ditemukan pada jenis lumba-lumba dan paus pilot (*pilot Whales*). Dalam periode 2006 – 2014 tercatat 20 ekor lumba-lumba dan 1 ekor paus pilot tertangkap pancing longline dengan rata-rata jumlah mata pancing sebanyak 1.200 - 1.323 kail. Setidaknya *hook rate* yang tercatat sebesar 0,0627 individu/1000 hook untuk lumba-lumba dan 0,0694 individu/1000 hook untuk paus pilot. Informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada Tabel 89 di bawah ini.

Tabel 89. Jumlah dan hook rate bycatch mamalia laut di Samudera Hindia

Indian Ocean	Jumlah mamalia laut	Jumlah setting	Jumlah kapal	Rata-rata jumlah mata pancing	Hook rate (1000)
Lumba-lumba	20	19	12	1.323,21	0,0627
Paus pilot	1	1	1	1.200	0,0694

Sumber : Laporan WWF-Indonesia, 2014

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

b) Samudera Pasifik

Selama periode 2007 – 2013 tercatat 1 ekor lumba-lumba dan 2 ekor paus pilot tertangkap pancing *longline* tuna dari kapal berbasis di Bitung dengan rata-rata jumlah mata pancing sebanyak 1.400 - 1.700 kail. Setidaknya *hook rate* yang tercatat sebesar 0,0510 individu/1000 hook untuk lumba-lumba dan 0,0346 individu /1000 *hook* untuk paus pilot. Informasi lebih detail sebagaimana tersebut pada Tabel 90 di bawah ini.

Tabel 90. Jumlah dan hook rate bycatch mamalia laut di Samudera Pasifik

Indian Ocean	Jumlah mamalia laut	Jumlah setting	Jumlah kapal	Rata-rata jumlah mata pancing	Hook rate (1000)
Lumba-lumba	1	1	1	1.400	0,0510
Paus pilot	2	1	1	1.700	0,0346

Sumber : Laporan WWF-Indonesia, 2014

C. Sosial Ekonomi

Ruang lingkup sosial ekonomi yang diuraikan dalam RPP-TCT ini mencakup jumlah nelayan, pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan, jumlah armada penangkapan dan permasalahan nelayan, serta persyaratan pasar. Namun demikian, data dan informasi terkait dengan nelayan tuna, cakalang dan tongkol masih sangat terbatas dan akan dielaborasi melalui pelaksanaan rencana aksi dalam RPP-TCT ini.

1. Jumlah Nelayan

Pada tahun 2016, jumlah nelayan laut di Indonesia sebanyak 2.278.388 orang, dengan rincian menurut provinsi dan kategori sebagaimana tersebut pada Tabel 91 di bawah ini.

Tabel 91. Jumlah nelayan berdasarkan provinsi dan kategori di Indonesia

No	Propinsi	Jumlah (orang)	Persentase
1	Aceh	73122	3,23%
2	Sumatera Utara	219527	9,69%
3	Sumatera Barat	40359	1,78%
4	Riau	42793	1,89%
5	Kepulauan Riau	85618	3,78%
6	Jambi	14744	0,65%
7	Sumatera Selatan	18650	0,82%
8	Kepulauan Bangka Belitung	46834	2,07%
9	Bengkulu	21097	0,93%
10	Lampung	33929	1,50%
11	Banten	52178	2,30%
12	DKI Jakarta	2863	0,13%
13	Jawa Barat	74949	3,31%

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	Propinsi	Jumlah (orang)	Persentase
14	Jawa Tengah	171064	7,55%
15	DI Yogyakarta	1513	0,07%
16	Jawa Timur	224007	9,89%
17	Bali	47324	2,09%
18	Nusa Tenggara Barat	64953	2,87%
19	Nusa Tenggara Timur	75850	3,35%
20	Kalimantan Barat	40046	1,77%
21	Kalimantan Tengah	19659	0,87%
22	Kalimantan Selatan	19118	0,84%
23	Kalimantan Timur	33345	1,47%
24	Kalimantan Utara	7810	0,34%
25	Sulawesi Utara	129231	5,70%
26	Gorontalo	19548	0,86%
27	Sulawesi Tengah	69476	3,07%
28	Sulawesi Selatan	154701	6,83%
29	Sulawesi Barat	58463	2,58%
30	Sulawesi Tenggara	90674	4,00%
31	Maluku	117395	5,18%
32	Maluku Utara	20286	0,90%
33	Papua	93708	4,14%
34	Papua Barat	81025	3,58%
	Total	2265859	100%

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016

Berdasarkan tabel 91 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah nelayan terbesar sebanyak 226.303 orang dengan persentase 9,93% dari total nelayan di Indonesia.

2. Pendapatan Nelayan

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2012), bahwa pendapatan nelayan dibedakan antara nelayan buruh dan nelayan pemilik. Adapun jumlah pendapatan nelayan buruh dan nelayan pemilik berdasarkan provinsi sebagaimana tersebut pada Tabel 92 di bawah ini.

Tabel 92. Pendapatan nelayan berdasarkan provinsi

No	Provinsi	Nelayan Buruh		Nelayan Pemilik	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Aceh	1.661.770	1.300.000	6.564.300	8.000.000
2	Sumut	2.299.820	2.199.820	7.850.730	7.386.660
3	Sumbar	4.007.060	1.115.308	9.957.000	5.260.732
4	Riau	1.232.730	1.000.000	3.482.610	2.500.000

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	Provinsi	Nelayan Buruh		Nelayan Pemilik	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Jambi	1.691.240	1.244.500	4.011.200	1.925.000
6	Bengkulu	1.957.750	1.957.750	3.275.040	3.275.040
7	Lampung	630.052	900.000	1.550.289	5.676.000
8	DKI Jakarta	1.658.360	1.400.000	27.290.720	11.200.000
9	Jabar	1.326.950	1.469.416	1.943.269	2.898.166
10	Jateng	721.660	1.250.000	2.051.880	3.750.000
11	DIY	762.690	900.000	1.115.490	1.250.000
12	Jatim	887.910	1.616.844	3.161.320	4.754.245
13	NTT	515.160	850.000	1.345.810	2.524.500
14	Kalbar	998.850	895.854	5.360.260	2.131.708
15	Kalsel	1.042.120	1.250.000	2.530.090	2.500.000
16	Kaltim	622.340	1.407.667	2.268.690	2.337.947
17	Sulteng	853.290	1.013.636	1.970.140	1.714.545
18	Sultra	1.939.870	780.600	5.458.160	1.376.500
19	Malut	1.150.160	747.252	3.037.500	2.989.000
20	Papua	3.263.100	1.102.500	5.832.630	3.024.155
21	Papua Barat	2.067.310	1.750.000	5.857.570	2.500.000
	Rata - rata	735.215	1.245.293	1.903.290	3.760.676

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan nelayan pemilik sebesar Rp 3.760.676,-/bulan sedangkan nelayan buruh sebesar Rp 1.245.293,-/bulan.

3. Nilai Tukar Nelayan

Selanjutnya data Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016) sebagaimana tersebut pada Tabel 93 di bawah ini.

Tabel 93. Nilai Tukar Nelayan berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	NTN
1	Banten	116,45
2	B a l i	112,69
3	Kalimantan Selatan	112,07
4	R i a u	110,41
5	Sulawesi Tenggara	109,84
6	Kalimantan Tengah	108,95
7	Sulawesi Tengah	108,57
8	Jawa Timur	108,35
9	Sulawesi Utara	108,27
10	D.I. Yogyakarta	108,09
11	Jawa Barat	107,71

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	Provinsi	NTN
12	Kep. Riau	107,67
13	Papua	107,34
14	Kalimantan Timur	107,30
15	Jawa Tengah	107,13
16	Lampung	106,08
17	Sulawesi Selatan	105,68
18	Papua Barat	105,58
19	Maluku	105,48
20	Nusa Tenggara Barat	104,96
21	J a m b i	104,51
22	Nusa Tenggara Timur	104,46
23	DKI Jakarta	104,24
24	Kep. Bangka Belitung	104,05
25	Gorontalo	103,53
26	Sumatera Barat	102,62
27	Kalimantan Barat	102,11
28	Sumatera Utara	101,71
29	Bengkulu	100,88
30	Maluku Utara	100,84
31	Aceh	100,83
32	Sulawesi Barat	100,63
33	Sumatera Selatan	96,97

Berdasarkan tabel 93 tersebut di atas dapat diprediksi bahwa daerah-daerah yang memiliki pendaratan tuna, cakalang, dan tongkol yang besar di Indonesia memiliki nilai tukar nelayan (NTN) tinggi seperti Banten sebesar 116,45, Bali sebesar 112,69, dan Kalimantan Selatan sebesar 112,07.

4. Jumlah Armada Penangkapan Ikan

Armada penangkapan Ikan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Namun masih didominasi oleh armada perahu tanpa motor yaitu 190.923 unit atau sebesar 35,11%, motor tempel sejumlah 181.178 atau sebesar 33,31% dan kapal motor 171.744 unit atau 31,58%. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah armada perikanan terbesar yaitu sebanyak 66.843 unit dengan persentase 12,29%. Selanjutnya jumlah armada penangkapan ikan di Indonesia selengkapnya sebagaimana tersebut pada Tabel 94 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 94. Jumlah armada penangkapan ikan di Indonesia tahun 2016

No	Propinsi	Perahu Tanpa Motor		Motor Tempel		Kapal Motor		Total	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Sulawesi Selatan	27.578	14,44	24.508	13,53	14.757	8,59	66.843	12,29
2	Maluku	40.029	20,97	12.779	7,05	6.155	3,58	58.963	10,84
3	Sulawesi Tengah	9.439	4,94	24.015	13,25	1.461	0,85	34.915	6,42
4	Sulawesi Tenggara	9.131	4,78	15.812	8,73	7.362	4,29	32.305	5,94
5	Sumatera Utara	7.020	3,68	897	0,50	20.305	11,82	28.222	5,19
6	Jawa Tengah	14.713	7,71	6.371	3,52	3.452	2,01	24.536	4,51
7	Kepulauan Riau	8.798	4,61	3.475	1,92	11.677	6,80	23.950	4,40
8	Nusa Tenggara Timur	10.222	5,35	5.625	3,10	7.865	4,58	23.712	4,36
9	Nusa Tenggara Barat	3.435	1,80	15.704	8,67	4.511	2,63	23.650	4,35
10	Sulawesi Utara	8.750	4,58	12.442	6,87	154	0,09	21.346	3,93
11	Aceh	2.322	1,22	7.294	4,03	8.734	5,09	18.350	3,37
12	Kalimantan Timur	1.454	0,76		0,00	16.865	9,82	18.319	3,37
13	Sulawesi Barat	4.424	2,32	7.505	4,14	4.526	2,64	16.455	3,03
14	Jawa Timur	5.211	2,73	2.735	1,51	7.226	4,21	15.172	2,79
15	Jawa Barat	518	0,27	6.234	3,44	6.779	3,95	13.531	2,49
16	Riau	5.727	3,00	1.197	0,66	5.782	3,37	12.706	2,34
17	Sumatera Barat	3.849	2,02	6.115	3,38	1.734	1,01	11.698	2,15
18	Papua Barat	5.305	2,78	4.387	2,42	838	0,49	10.530	1,94
19	Kalimantan Barat	2.946	1,54	2.242	1,24	5.029	2,93	10.217	1,88
20	Papua	7.626	3,99	1.526	0,84	171	0,10	9.323	1,71
21	Lampung	2.232	1,17	2.392	1,32	3.756	2,19	8.380	1,54
22	Banten	1.346	0,70	1.979	1,09	5.054	2,94	8.379	1,54
23	Gorontalo	1.517	0,79	6.272	3,46	263	0,15	8.052	1,48
24	Kalimantan Selatan	90	0,05	114	0,06	6.847	3,99	7.051	1,30
25	Kepulauan Bangka Belitung	418	0,22		0,00	6.221	3,62	6.639	1,22
26	Kalimantan Utara	601	0,31	3.642	2,01	1.811	1,05	6.054	1,11
27	Kalimantan Tengah	1.355	0,71	1.295	0,71	2.110	1,23	4.760	0,88
28	Bali	2.558	1,34	502	0,28	1.486	0,87	4.546	0,84

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	Propinsi	Perahu Tanpa Motor		Motor Tempel		Kapal Motor		Total	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
29	Maluku Utara	875	0,46	1.338	0,74	1.794	1,04	4.007	0,74
30	Bengkulu	573	0,30	2.063	1,14	746	0,43	3.382	0,62
31	Jambi	22	0,01	126	0,07	2.508	1,46	2.656	0,49
32	Sumatera Selatan	140	0,07		0,00	2.445	1,42	2.585	0,48
33	DKI Jakarta	699	0,37	165	0,09	1.267	0,74	2.131	0,39
34	DI Yogyakarta		0,00	427	0,24	53	0,03	480	0,09
	Total	190.923	100	181.178	100	171.744	100	543.845	100

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, 2016

Dari jumlah tersebut, terdapat 2.298 kapal berukuran 30 GT ke atas yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, dan tongkol sebagaimana tersebut pada Tabel 95 di bawah ini.

Tabel 95. Jumlah kapal berukuran 30 GT ke atas yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, dan tongkol.

No	Alat penangkapan ikan	Total	L Lepas S. Hindia	L Lepas S. Pasific	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WPP 711	WPP 712	WPP 713	WPP 714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718
1	Purse Seine Pelagis Besar	191	-	-	-	68	104	-	-	-	-	-	12	8	0
2	Purse Seine Pelagis Kecil	1.336	-	-	46	210	188	398	145	235	3	85	8	12	8
3	PSPB Armada (penangkap)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-
4	PSPK (P.Utara Jawa)	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
5	PSPK Armada (penangkap)	27	-	-	-	1	1	-	-	-	1	9	4	6	6
6	Rawai Tuna (Tuna Longline)	723	85	7		152	398	-	-	-	29		6	46	1
	Total	2.298	85	7	46	431	691	399	146	236	33	94	33	88	15

Namun demikian, jumlah armada berukuran 30 GT ke bawah yang melakukan penangkapan tuna, cakalang, tongkol belum dapat diketahui dan akan diakomodir melalui RPP-TCT ini.

5. Permasalahan Nelayan Tuna, Cakalang, dan Tongkol

Promosi pengembangan perikanan tuna telah dilakukan sejak tahun 1970. Pemerintah dan pelaku usaha industri perikanan tuna termasuk nelayan, telah melakukan investasi di bidang penangkapan ikan dan industri pengolahan. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan investasi yang sangat besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan. Di sisi lain, pihak swasta juga telah membangun sarana penangkapan dan industri pengolahan.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Investasi ini memerlukan pengembalian modal yang hanya dapat diperoleh dari produksi tuna, cakalang, dan tongkol.

Dewasa ini perikanan tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia sedang menghadapi keadaan dimana pada saat Produksi untuk spesies tertentu cenderung menurun, terdapat kebutuhan penyediaan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan tuna, serta kewajiban membuka lapangan kerja baik penangkapan maupun pengolahan ikan. Penurunan produksi diduga terjadi karena adanya indikasi tangkapan lebih (*over fishing*) yang timbul, baik karena terlalu banyak menangkap ikan dewasa (*recruitment over fishing*) dan terlalu banyak menangkap tuna berukuran juvenile (*growth over fishing*). *Recruitment over fishing* terjadi karena pengoperasian alat penangkapan ikan tuna longline dan *handline*, sedangkan *growth over fishing* terjadi karena pengoperasian purse seine dan alat penangkapan ikan lainnya dengan menggunakan rumpon.

Pada saat kondisi stok diduga atau diindikasi mengalami penurunan yang ditandai dengan ukuran tuna, cakalang, dan tongkol yang tertangkap cenderung mengecil, disisi lain nelayan terus berusaha meningkatkan produksi yang dilakukan antara lain melalui:

a. peningkatan upaya penangkapan dengan cara menambah jumlah hari operasi dan modifikasi pola operasi penangkapan dengan menerapkan alih muatan di laut.
b. melakukan perubahan alat penangkapan ikan dari pancing menjadi jaring.
c. maraknya penggunaan rumpon.
d. praktek penangkapan dengan cara yang merusak *(destructive fishing practices).*
e. belum adanya pola usaha perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang mampu memberikan manfaat ekonomi optimum kepada nelayan.

Disamping itu, secara umum masalah lain terkait pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol di Indonesia antara lain:

a. ketersediaan data yang akurat, objektif dan tepat waktu.
b. belum adanya pola usaha perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang mampu memberikan manfaat ekonomi optimum kepada nelayan.
c. penegakan hukum.
d. ketersediaan data terkait hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan *Ecologically Related Species* (ERS).

Apabila permasalahan tersebut di atas tidak dapat dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan memberikan tekanan terhadap sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol yang mengakibatkan dampak negatif baik terhadap kondisi stok sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol. Di samping itu, adanya fenomena perubahan alat penangkapan ikan pancing (*tuna longline*) menjadi jaring (*purse seine*) yang dapat menimbulkan konflik.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Konflik antara purse seine dan longline dapat diduga mulai terjadi. Konflik tersebut timbul karena pada saat longline mengalami penurunan produksi madidihang dan tuna mata besar, disisi lain, perikanan purse seine dengan target utama cakalang, ternyata juga melakukan pe dengan … madidihang dan tuna mata besar yang berukuran kecil (*baby* berasosiasi dengan cakalang dalam persentase yang cukup besar. Keadaan ini terjadi karena purse seine menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dan pada saat tertentu dikombinasikan dengan lampu (cahaya). Keadaan ini, dipastikan akan mengakibatkan terjadinya penangkapan tuna berukuran *juvenile* secara berlebihan (*growth over fishing*) terhadap tuna mata besar dan madidihang yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha penangkapan dan pengolahan tuna, cakalang, dan tongkol di Indonesia.

6. Persyaratan Pasar (*Market Requirement*)

Persyaratan pasar merupakan faktor utama yang harus dipenuhi agar tuna dan produk tuna dapat diterima oleh pasar khususnya pasar ekspor. Persyaratan pasar umumnya meliputi 2 (dua) aspek yakni ketertelusuran asal tuna dan produk tuna serta sertifikat *ecolabelling*. Pemenuhan terhadap persyaratan pasar, sangat efektif menjamin terlaksananya praktek pengelolaan tuna, cakalang, dan tongkol secara berkelanjutan.

D. Kelompok Jenis Ikan yang Akan Dikelola

Dalam dokumen RPP TCT jenis atau kelompok ikan yang akan dikelola yaitu tuna, cakalang, dan tongkol, hal ini disebabkan tuna, cakalang, dan tongkol merupakan jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory stocks*) dan beruaya terbatas (*straddling fish stocks*). Jenis ikan yang akan dikelola dalam RPP-TCT ini meliputi jenis ikan yang dikelola oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) dan/atau organisasi intra-regional seperti *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC). Sedangkan penentuan kelompok jenis ikan yang akan dikelola berdasarkan WPPNRI sebagai berikut:

1. WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 Yang Merupakan Bagian Dari Daerah (*area of competence*) IOTC.

Hasil identifikasi terhadap jenis tuna dan cakalang pada WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 yang mencakup perairan kepulauan, teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana tersebut Tabel 96 di bawah ini.

Tabel 96. Jenis ikan yang dikelola pada WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

No	Nama Ikan		
	Indonesia	Inggris	Ilmiah
A	Species Utama		
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacarers*

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	Nama Ikan		
	Indonesia	Inggris	Ilmiah
3	Albakor	*Albacore*	*Thunnus alalunga*
4	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*
5	Tuna sirip biru selatan	*Southern bluefin tuna*	*Thunnus maccoyii*
B	Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*)		
B.1	HIU (*shark*)		
1	Hiu selendang	*Blue shark*	*Prionace glauca*
2	Hiu koboi	*Oceanic whitetip sharks*	*Carcharhinus longimanus*
3	Hiu martil	*Scalloped hammerhead shark*	*Sphyrna lewini*
4	Hiu tenggiri	*Shortfin mako shark*	*Isurus oxyrinchus*
5	Hiu lanjam	*Silky shark*	*Carcharhinus falciformis*
6	Hiu monyet	*Bigeye thresher shark*	*Alopias superciliosus*
7	Hiu tikus	*Pelagic thresher shark*	*Alopias pelagicus*
B.2	*Billfish*		
1	Ikan todak/pedang	*Swordfish*	*Xiphias gladius*
2	Setuhuk hitam	*Black marlin*	*Makaira indica*
3	Setuhuk biru	*Blue marlin*	*Makaira nigricans*
4	Setuhuk loreng	*Striped marlin*	*Tetrapturus audax*
5	Ikan layaran Indo-Pasifik	*Indo-pacific sailfish*	*Istiophorus platypterus*
C	*Ecologically Related Species* (ERS)		
1	Penyu laut	*Marine turtles*	-
2	Burung Laut	*Sea-birds*	-
3	Mamalia Laut	*Cetacean*	-

2. WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 yang merupakan perairan kepulauan Indonesia

   Hasil identifikasi terhadap jenis tuna dan cakalang pada WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 yang mencakup perairan kepulauan sebagaimana tersebut Tabel 97 di bawah ini.

Tabel 97. Jenis ikan yang dikelola pada WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

No	Nama Ikan		
	Indonesia	Inggris	Ilmiah
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacarers*
3	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*

3. WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan bagian wilayah konvensi WCPFC

   Hasil identifikasi terhadap jenis tuna dan cakalang pada WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang mencakup perairan kepulauan, teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana tersebut pada Tabel 98 di bawah ini.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 98. Jenis ikan yang dikelola pada WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

No	Nama Ikan		
	Indonesia	Inggris	Ilmiah
1	Tuna mata besar	*Bigeye tuna*	*Thunnus obesus*
2	Madidihang	*Yellowfin tuna*	*Thunnus albacares*
3	Cakalang	*Skipjack tuna*	*Katsuwonus pelamis*

4. Tongkol (*Neritic Tuna*) Pada 11 WPPNRI

Hasil identifikasi terhadap jenis tongkol (*neritic tuna*) pada 11 WPPNRI yang mencakup perairan kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif di seluruh Indonesia sebagaimana tersebut pada Tabel 99 di bawah ini.

Tabel 99. Jenis ikan yang dikelola pada 11 WPPNRI

No	Nama Ikan		
	Indonesia	Inggris	Ilmiah
1	Tongkol krai	*Frigate tuna*	*Auxis thazard*
2	Tongkol komo	*Kawakawa*	*Euthynnus affinis*
3	Tongkol abu-abu	*Longtail tuna*	*Thunnus tonggol*
4	Lisong	*Bullet tuna*	*Auxis rochei*
5	Tenggiri	*Narrow-barred spanish mackerel*	*Scomberomorus commerson*
6	Tenggiri Papan	*Indo-pacific king mackerel*	*Scomberomorus guttatus*

E. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumberdaya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian di WPPNRI dan area organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs).

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol antara lain:

1. Kementerian Perhubungan, di bidang penerbitan dokumen kapal perikanan;
2. Kementerian Perdagangan, di bidang ketentuan perdagangan;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang infrastruktur;
4. Kementerian Luar Negeri, di bidang kerjasama perikanan dengan negara lain (bilateral dan multilateral) serta keanggotaan dalam organisasi regional dan internasional;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI-Angkatan Laut di bidang Penegakan Hukum Perikanan; dan
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bidang penelitian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya ikan hingga 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

57/PERMEN-KP/2014 disebutkan bahwa pemerintah provinsi berwenang menerbitkan izin bagi kapal perikanan berukuran diatas 10 GT–30 GT dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin bagi kapal perikanan berukuran 5 GT-10 GT. Sedangkan kapal penangkap ikan yang berukuran dibawah 5 GT, tidak diwajibkan memiliki izin, namun wajib melakukan pendaftaran kapal pada instansi yang berwenang di bidang perikanan di tingkat kabupaten/kota. Ruang lingkup kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi mencakup pengelolaan, konservasi, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaannya. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah provinsi dapat merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan dan penyusunan peraturan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan KKP nasional lainnya baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Kajiskan, pemerintah daerah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi termasuk asosiasi perikanan antara lain seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna *Longline* Indonesia (ATLI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU), Asosiasi Kapal Perikanan Nasional (AKPN) Bitung, Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI), Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN), Asosiasi *Pole and line* dan *hand line* (AP2HI), termasuk pelaku usaha perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan.

F. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya tuna, tongkol dan cakalang di seluruh WPPNRI termasuk Laut Lepas Samudera Hindia dan Pasifik, baik sebagai individu, kelompok atau organisasi. Oleh sebab itu setiap pemangku kepentingan hendaknya dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan realisasi rencana aksi yang diadopsi dalam RPP-TCT ini.

Secara umum pemangku kepentingan dibagi menjadi 2 kelompok:

a. Pemerintah:

1) Kementerian Kelautan dan Perikanan:

a) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perikanan;

b) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dengan prinsip kehati-hatian;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

c) membantu dan menyediakan infrastuktur atau sarana bagi nelayan/pembudidaya/pengolah; dan
d) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha dan nelayan.

2) Kementerian dan lembaga terkait:
a) dukungan infrastruktur;
b) kemudahan perdagangan.
c) TNI-AL dan Polri, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

3) Pemerintah Daerah:
a) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai kewenangannya;
b) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
c) membantu dan menyediakan infrastuktur atau sarana bagi nelayan/pembudidaya/pengolah sesuai kewenangannya; dan
d) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha dan nelayan sesuai kewenangannya.

4) Kelompok Ilmiah/*Scientific Group*:
a) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
b) menyediakan SDM (sumber daya manusia) unggul untuk pendidikan dan industri
c) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing (*observer on board*);
d) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
e) kontribusi inovasi dan teknologi baru;
f) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

b. Non Pemerintah:

1) Nelayan:
a) nelayan merupakan pelaku utama kegiatan usaha penangkapan ikan;
b) penyedia bahan baku ikan;
c) nelayan juga bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
d) kelompok nelayan merupakan pelaku kunci dalam mendukung RPP;
e) nelayan harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
f) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi SDM melalui pelatihan dan penyuluhan.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

2) Industri Penangkapan:

a) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan;
b) membeli ikan hasil tangkapan nelayan;
c) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.

3) Industri Pengolahan Ikan:

membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan;

a) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
b) melakukan pengolahan untuk pengembangan produk/nilai tambah;
c) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.

4) Asosiasi Perusahaan:

a) mediator antara pemerintah dan nelayan;
b) nelayan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi;
c) nama asosiasi, antara lain: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Asosiasi Pengusaha Non-Tuna dan Non-Udang (ASPINTU), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Bali, Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pukat Cincin Sibolga, Asosiasi Kapal Perikanan Nasional (AKPN) Sulawesi Utara, Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI), Asosiasi Usaha Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU), Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN), termasuk pelaku usaha penangkapan dan industri pengolahan ikan tuna, cakalang dan tongkol.

5) Pemerhati perikanan tuna

6) Mitra Kerja sama:

a) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan;
b) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumberdaya perairan;
c) mitra kerja sama, antara lain: *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western Central Pasific Fisheries Commission* (WCPFC), *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), SEAFDEC, ASEAN *Tuna Working Group* (ATWG), Lembaga Non-Pemerintah (NGO).

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

BAB III
RENCANA STRATEGIS

A. ISU PENGELOLAAN

1. Isu pengelolaan tuna dan cakalang

Adapun isu pengelolaan tuna, cakalang dan ekosistem di WPPNRI 571, WPPNRI 572 Dan WPPNRI 573 yang merupakan bagian dari *Area Of Competence* IOTC dan Laut Lepas Samudera Hindia sebagaimana tersebut pada tabel 100 di bawah ini.

Tabel 100
Isu Pengelolaan Tuna, Cakalang dan Ekosistem Di WPPNRI 571, WPPNRI 572 Dan WPPNRI 573 yang Merupakan Bagian Dari *Area Of Competence* IOTC Dan Laut Lepas Samudera Hindia

ISU	
a.	SUMBER DAYA TUNA, CAKALANG DAN EKOSISTEM
1)	Tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan di seluruh lokasi potensial pendaratan jenis ikan tersebut belum tercatat
2)	Informasi teknis terkait metode penangkapan ikan tuna dan cakalang masih kurang (diantaranya, jumlah mata pancing per-basket, hasil tangkapan per-basket dalam kg dan ekor, dll.)
3)	Informasi biologi ikan tuna dan cakalang secara spasial dan temporal masih kurang (diantaranya, size by gear, ukuran hasil tangkapan per alat tangkap, per-waktu penangkapan, dll.)
4)	Informasi hasil tangkapan dan upaya (catch & effort) secara reguler, baik spasial maupun temporal belum tersedia secara optimal
5)	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS* masih kurang (diantaranya, size by gear, ukuran hasil tangkapan per alat tangkap, per-waktu penangkapan, dll.)
6)	Belum ada regulasi terkait pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu
7)	Tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil *(juvenile)* masih tertangkap oleh alat penangkapan ikan *purse seine* yang menggunakan rumpon
b.	TATA KELOLA
1)	Kapasitas penangkapan ikan dan atau jumlah armada penangkapan ikan belum optimal
2)	Ketentuan yang mengatur penandaan alat penangkapan ikan belum ada serta penandaan unik untuk kapal perikanan belum diaplikasikan
3)	Kepatuhan penerapan logbook penangkapan ikan belum optimal
4)	Akurasi data logbook penangkapan ikan masih rendah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

5)	Cakupan minimal *observer* diatas kapal ikan untuk perikanan tuna dan cakalang masih kurang
6)	Belum semua kapal (yang terdaftar di IOTC dan *eligible* memiliki nomor IMO) memiliki nomor IMO
7)	Akurasi pelaporan hasil tangkapan di area statistik CCSBT belum optimal
8)	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak sesuai ketentuan masih terjadi
9)	Operasi Penangkapan Ikan disekitar *buoy* riset masih terjadi
10)	Belum efektifnya pelaksanaan tindakan negara pelabuhan (*Port State Measure*)
11)	Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam kegiatan ilmiah dengan pengelolaan masih kurang sehingga berimplikasi kepada akurasi data dan pelaporan kepada RFMO
12)	Penyajian data kapal aktif belum terintegrasi
13)	Pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna masih kurang
14)	Data *nominal catch* yang berasal dari industri dan perikanan skala kecil belum terpisah
15)	Akurasi hasil penangkapan ikan tuna dan cakalang dari kelompok nelayan kecil masih kurang
16)	Akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna masih kurang
17)	Informasi mengenai hasil tangkapan yang dibuang ke laut masih kurang
18)	Informasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan peran *gender*, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja belum terlaksana
19)	Penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam *IUU Vessel List* di RFMO belum ada
20)	Belum terbentuknya Mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol
c.	PERSYARATAN PASAR
1)	Pelaporan pemasaran ekspor dan impor ikan Tuna dan sejenis tuna sesuai ketentuan RFMO masih rendah
2)	Dukungan perolehan sertifikasi ecolabelling belum optimal
3)	Pelaksanaan sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan) belum terpenuhi
4)	Penerapan *Catch Documentation Scheme* untuk tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*) belum optimal
5)	Upaya legalisasi dan penelusuran asal hasil tangkapan nelayan skala kecil belum optimal

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Adapun isu pengelolaan tuna, cakalang, dan ekosistem di di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 perairan kepulauan Indonesia sebagaimana tersebut pada tabel 101 di bawah ini.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tabel 101
Isu pengelolaan tuna, cakalang dan ekosistem di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 perairan kepulauan Indonesia

ISU	
a.	SUMBER DAYA TUNA, CAKALANG, DAN EKOSISTEM
1)	Data estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang belum tersedia
2)	Akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna masih kurang
3)	Penerapan kebijakan tentang pengelolaan dan penataan rumpon masih lemah
4)	Kajian dampak negatif perubahan iklim terhadap stok sumber daya tuna dan cakalang belum terlaksana
5)	Adaptasi perubahan iklim pada perikanan tuna di WPPNRI belum berkembang
6)	Tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil *(juvenile)* masih tertangkap dengan alat penangkapan ikan *purse seine* yang menggunakan rumpon
7)	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS* masih kurang (diantaranya, *size by gear*, ukuran hasil tangkapan per alat tangkap, per-waktu penangkapan, dll.)
8)	Pasok Umpan Hidup untuk perikanan Huhate (*Pole & Line*) masih kurang
9)	Regulasi terkait pelarangan penangkapan hiu tertentu belum ada
b.	TATA KELOLA
1)	Belum terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol
2)	Informasi kapal penangkap tuna yang beroperasi di perairan kepulauan belum tersedia
3)	Penyajian data kapal aktif belum terintegrasi
4)	*Vessel Monitoring System* (VMS) belum optimal pemanfaatannya untuk mendukung tingkat kepatuhan dalam pelaporan kepada RFMO
5)	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak sesuai ketentuan masih terjadi
6)	Ketentuan yang mengatur penandaan alat penangkapan ikan belum ada serta penandaan unik untuk kapal perikanan belum diaplikasikan
7)	Praktek Penangkapan tuna dengan cara yang merusak masih terjadi
8)	Praktik penangkapan/tertangkapnya lumba-lumba pada perikanan tuna masih terjadi
9)	Pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan pemerintah dan RFMO masih kurang
10)	Kepatuhan penerapan logbook penangkapan ikan belum optimal
11)	Akurasi data logbook penangkapan ikan masih rendah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

12)	Ketersediaan informasi hasil tangkapan dan upaya belum tersedia (*catch & effort*) secara reguler, baik spasial maupun temporal
13)	Akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna masih kurang
14)	Informasi mengenai hasil tangkapan yang dibuang ke laut masih belum tersedia
15)	Kajian sosio-ekonomi untuk menentukan parameter dalam pengembangan Harvest Strategy belum ada
16)	Informasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan peran *gender*, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja belum ada
17)	*Harvest Strategy* (HS) untuk perikanan tuna dan cakalang di Perairan kepulauan belum ada
18)	Pengaturan pemanfaatan sumberdaya tuna dan cakalang di perairan kepulauan yang didasarkan pada ketersediaan stok belum ada
19)	Kapasitas Sumberdaya dalam kegiatan ilmiah dengan pengelolaan masih rendah yang berimplikasi pada kurangnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO
20)	Akurasi hasil penangkapan ikan tuna dan cakalang dari kelompok nelayan kecil masih kurang
c.	PERSYARATAN PASAR
1)	Pelaksanaan sistem rantai pasok belum terpenuhi (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan)
2)	Dukungan perolehan sertifikasi *ecolabelling* belum optimal

Adapun isu pengelolaan tuna, cakalang dan ekosistem di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan bagian dari konvensi area WCPFC dan dan laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah sebagaimana tersebut pada tabel 102 di bawah ini.

Tabel 102
Isu pengelolaan tuna, cakalang dan ekosistem di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yang merupakan bagian dari konvensi area WCPFC dan dan laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah

ISU	
a.	SUMBER DAYA TUNA, CAKALANG DAN EKOSISTEM
1)	Pelaksanaan pemanfaatan alokasi tangkapan untuk tuna mata besar perikanan *Longline* di ZEEI dan Laut Lepas belum optimal
2)	Pelaksanaan pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC
3)	Informasi biologi spasial dan temporal tuna dan cakalang masih kurang (diantaranya, *size by gear*, ukuran hasil tangkapan per alat tangkap, per-waktu penangkapan, dll.)
4)	Ketersediaan informasi hasil tangkapan dan upaya (*catch & effort*) belum optimal secara reguler, baik spasial maupun temporal

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

5)	Penerapan kebijakan tentang pengelolaan dan penataan rumpon masih lemah
6)	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tidak sesuai ketentuan masih terjadi
7)	Regulasi terkait pelarangan penangkapan hiu tertentu belum ada
8)	Penangkapan ikan di kantong laut lepas oleh kapal perikanan Indonesia belum ada
9)	Tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil masih tertangkap dengan alat penangkapan ikan *purse seine* yang menggunakan rumpon
10)	Cakupan observer untuk perikanan *Purse Seine* belum optimal
11)	Informasi teknis yang dapat menggambarkan metode penangkapan Ikan Tuna dan Cakalang masih kurang (diantaranya, jumlah mata pancing per-basket, hasil tangkapan per-basket dalam kg dan ekor, dll.)
12)	Pasok Umpan Hidup untuk perikanan Huhate (*Pole & Line*) masih kurang
b.	TATA KELOLA
1)	Ketentuan yang mengatur penandaan alat penangkapan ikan belum ada serta penandaan unik untuk kapal perikanan belum diaplikasikan
2)	Belum adanya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam *IUU Vessel List* di RFMO
3)	Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran kapal pada *Record of Fishing Vessel and Authorized to Fish* pada RFMO
4)	Belum optimalnya pemanfaatan *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk mendukung tingkat kepatuhan dalam pelaporan kepada RFMO
5)	Belum adanya pemeriksaan kapal di laut lepas
6)	Operasi Penangkapan Ikan disekitar *buoy* Riset masih terjadi
7)	Penyajian data kapal aktif belum terintegrasi
8)	Akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna masih kurang
9)	Informasi mengenai hasil tangkapan yang dibuang ke laut masih kurang
10)	Kajian sosio-ekonomi untuk menentukan parameter dalam pengembangan Harvest Strategy belum terlaksana
11)	Informasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja belum tersedia
12)	Adaptasi perubahan iklim pada perikanan tuna di WPPNRI belum berkembang
13)	Perlunya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dalam kegiatan ilmiah dengan pengelolaan yang berimplikasi pada kurangnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO
14)	Belum optimalnya kepatuhan *logbook* penangkapan ikan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

15)	Akurasi data logbook penangkapan ikan masih rendah
16)	Akurasi hasil penangkapan ikan tuna dan cakalang dari kelompok nelayan kecil masih kurang
17)	Mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol belum ada
c.	PERSYARATAN PASAR
1)	Pelaksanaan sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan) belum terpenuhi
2)	Dukungan perolehan sertifikasi *ecolabelling* belum optimal

2. Isu pengelolaan tongkol (*neritic tuna*)

Isu prioritas terkait tongkol (*neritic tuna*) ditetapkan berdasarkan hasil workshop tentang *Expert Group Meeting on Regional Plan of Action on Sustainable Utilization of Neritic Tuna in the ASEAN Region* yang diselenggarakan SEAFDEC di Provinsi Krabi, Thailand pada tanggal 18-20 Juni 2014. Workshop tersebut merupakan tindaklanjut hasil pertemuan *the 46th Meeting of SEAFDEC Council* tanggal 1- 4 April 2014 di Singapura. Dalam workshop tersebut telah disepakati bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan tongkol (*neritic tuna*) secara berkelanjutan, perlu disusun rencana pengelolaan tongkol (*neritic tuna*) berdasarkan isu nasional yang merupakan bagian integral dari isu regional. Adapun isu pengelolaan tongkol (*neritic tuna*) di 11 (sebelas) WPPNRI sebagaimana tersebut pada tabel 103 di bawah ini.

Tabel 103
Isu pengelolaan tongkol (*neritic tuna*) di 11 (sebelas) WPPNRI

ISU	
a.	SUMBER DAYA TONGKOL (*NERITIC TUNA*) DAN EKOSISTEM
1)	Belum tersedianya Estimasi tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya tongkol
2)	Belum adanya pengaturan pemanfaatan sumberdaya tongkol di perairan kepulauan yang didasarkan pada ketersediaan stock
3)	Belum terlaksananya kajian dampak negatif perubahan iklim terhadap stok sumber daya tongkol
b.	TATA KELOLA
1)	Perlunya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dalam kegiatan ilmiah (*scientific*) dengan pengelolaan (*management*) yang berimplikasi pada kurangnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

2)	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna
3)	Belum optimalnya kepatuhan logbook penangkapan ikan
4)	Masih rendahnya akurasi data logbook penangkapan ikan
c.	PERSYARATAN PASAR
1)	Belum terpenuhinya pelaksanaan sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan)

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pengelolaan perikanan TCT dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Sumber daya tuna, cakalang, dan tongkol;
2. Tata kelola; dan
3. Persyaratan pasar *(market requirement).*

1. Tujuan dan sasaran pengelolaan tuna dan cakalang

Tujuan Nomor 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya:
Terwujudnya pengelolaan Tuna dan Cakalang dan ekosistemnya secara berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573:
   a. Terlaksananya pemantauan hasil tangkapan Tuna Sirip Biru selatan berdasarkan ketentuan CCSBT di seluruh lokasi potensial pendaratan tangkapan jenis ikan tersebut dalam 5 tahun;
   b. Tersedianya informasi terkini mengenai karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun;
   c. Tersedianya informasi terkini mengenai biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun;
   d. Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun;
   e. Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS dalam 5 tahun;
   f. Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

g. Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun*;*

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

2. Sasaran di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 sebagai berikut:
   a. Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun;
   b. Tersedianya estimasi data *Total Allowable Catch (TAC)* atau *catch limit* tuna dan cakalang sebesar 100 % dalam 5 tahun;
   c. Terlaksananya perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini;
   d. Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan karbon dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang dalam 5 tahun;
   e. Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah perairan indonesia dalam 5 tahun;
   f. Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (*juvenile*) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun;
   g. Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS* dalam 5 tahun;
   h. Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun;
   i. Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun;

3. Sasaran di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagai berikut:
   a. Termanfaatkannya alokasi tangkapan jenis tuna mata besar untuk longline berdasarkan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun;
   b. Terlaksananya pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun;
   c. Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun;
   d. Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun;
   e. Perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini;
   f. Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun;
   g. Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

h. Terlaksananya sosialisasi prosedur penangkapan ikan di kantong laut lepas kepada asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Tuna Indonesia/ASTUIN, Asosiasi Kapal Perikanan Nasional/AKPN dan Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung/HIPPBI) dalam 4 tahun;

i. Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (*juvenile*) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun;

j. Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal purse seine sebesar 100% dalam 5 tahun;

k. Tersedianya informasi karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun;

l. Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun;

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola: Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tuna dan cakalang, *bycatch* dan ERS.

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran di WPPNRI 571, WPPNRI 572, dan WPPNRI 573 sebagai berikut:

   a. Terlaksananya monitoring pengembangan armada perikanan tuna dalam 5 tahun;

   b. Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun;

   c. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;

   d. Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;

   e. Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal penangkap tuna dan cakalang sebesar 25% dalam 5 tahun;

   f. Peningkatan jumlah kapal yang terdaftar di IOTC yang memiliki nomor IMO sebanyak 100% dalam 3 tahun;

   g. Peningkatan akurasi pelaporan hasil tangkapan di area statistik CCSBT sebesar 100 % dalam 5 tahun;

   h. Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

i. Terlaksananya pengawasan di sekitar buoy riset;
j. Terlaksananya tindakan negara pelabuhan di 3 pelabuhan dalam 5 tahun;
k. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun;
l. Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun;
m. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi;
n. Terlaksananya pemisahan data nominal catch untuk industri dan perikanan skala kecil sebanyak dalam 2 tahun;
o. Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil;
p. Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun;
q. Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun;
r. Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 2 tahun;
s. Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dalam 5 tahun;
t. Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun.

2. Sasaran di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 sebagai berikut:
a. Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun;
b. Tesedianya informasi kapal penangkap tuna dan cakalang yang beroperasi di perairan kepulauan selama 2 tahun;
c. Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar 100% dalam 2 tahun;
d. Pemanfaatan vessel monitoring system (VMS) secara optimal untuk mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

e. Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebesar 100% dalam 5 tahun;

f. Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun;

g. Berkurangnya jumlah aktivitas penangkapan tuna dengan cara yang merusak sebesar (…%) dalam 5 tahun;

h. Terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan lumba-lumba sebesar (…%) dalam 5 tahun;

i. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan pemerintah dan RFMO melalui kegiatan diseminasi dalam 5 tahun;

j. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;

k. Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;

l. Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun;

m. Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun;

n. Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun;

o. Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun;

p. Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun;

q. Tersusunnya Harvest Strategy (HS) untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 3 tahun;

r. Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 3 tahun;

s. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun;

t. Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun.

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

3. Sasaran di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebagai berikut:
   a. Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun;
   b. Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam *IUU Vessel List* dalam 5 tahun;
   c. Peningkatan jumlah kapal perikanan Indonesia yang tercantum pada RFMO *Record of Fishing Vessel and Authorized to Fish* dalam 3 tahun;
   d. Pemanfaatan *vessel monitoring system* (VMS) secara optimal untuk mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 3 tahun;
   e. Terlaksananya sosialisasi prosedur pemeriksaan kapal di laut lepas kepada aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam 5 tahun;
   f. Terlaksananya pengawasan di sekitar buoy riset dalam 3 tahun;
   g. Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun;
   h. Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna sebesar dalam 5 tahun;
   i. Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun;
   j. Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun;
   k. Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun;
   l. Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah WCPFC dalam 5 tahun;
   m. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun;
   n. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;
   o. Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;
   p. Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun;
   q. Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tujuan 3 Berdasarkan Aspek Persyaratan Pasar (*Market Requirement*): Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tuna dan cakalang.

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional, yaitu terlaksananya penyusunan Sertifikat *Ecolabelling* – Tuna dan Cakalang Produksi Indonesia sebesar 100% dalam 5 tahun.
2. Sasaran di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebagai berikut:
    1. Terlaksananya penerapan *Bigeye Tuna Statistical Document Programme* untuk ekspor dan impor tuna mata besar sebesar 100% dalam 5 tahun;
    2. Tersusunnya dokumen sistam rantai pasok (*supply chain system)* tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam 3 tahun;
    3. Terlaksananya ketentuan pemasangan *tag* dan *Catch Documentation Scheme* untuk tuna sirip biru selatan sebesar 100% dalam 3 tahun.
3. Sasaran di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 yaitu tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari perairan kepulauan Indonesia sebesar 100% dalam 5 tahun.
4. Sasaran di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 yaitu tersusunnya dokumen *supply chain system* tuna dan cakalang yang berasal dari ZEEI Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sebesar 100% dalam 5 tahun.

2. Tujuan dan sasaran pengelolaan tongkol (*neritic tuna*)

Tujuan 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya: Terwujudnya pengelolaan tongkol dan ekosistemnya secara berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran di 11 WPPNRI sebagai berikut:
    a. Tersedianya data Estimasi potensi, tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya tongkol pada 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 5 tahun;
    b. Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada *Harvest Control Rules* (HCR) dalam 2 tahun;
    c. Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan carbon dampak perubahan iklim terhadap tongkol dalam 5 tahun;

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola:
Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tongkol, *bycatch dan ERS.*

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran di 11 WPPNRI sebagai berikut:
   a. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun;
   b. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi dalam 2 tahun;
   c. Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun;
   d. Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun.

Tujuan 3 Berdasarkan Aspek Persayaratan Pasar (*Market Requirement*):
Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tongkol

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran di 11 WPPNRI sebagai berikut:

   Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (supply chain system) neritic tuna di 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 3 tahun.

C. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR

1. Indikator dan tolok ukur pengelolaan tuna dan cakalang

Untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk pengelolaan tuna dan cakalang.

Tujuan Nomor 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya:
Terwujudnya pengelolaan Tuna dan Cakalang dan ekosistemnya secara berkelanjutan

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 104 di bawah ini:

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

Tabel 104. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tuna dan cakalang

No	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 DAN WPPNRI 573	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Terlaksananya pemantauan hasil tangkapan Tuna Sirip Biru selatan berdasarkan ketentuan CCSBT di seluruh lokasi potensial pendaratan tangkapan jenis ikan tersebut dalam 5 tahun.	Jumlah Lokasi potensial pendaratan Tuna Sirip Biru Selatan	Sebanyak 3 lokasi potensial pendaratan Tuna Sirip Biru Selatan sudah terpantau (Pondok Dadap, Cilacap dan Nizam Zachman)
2	Tersedianya informasi terkini mengenai karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun	Informasi teknis terkait detil operasi penangkapan data hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang meliputi hasil tangkapan per-jenis alat tangkap dalam kg dan/atau ekor	Informasi yang tersedia antara lain hasil tangkapan per-jenis alat tangkap dalam kg dan/atau ekor
3	Tersedianya informasi terkini mengenai biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	informasi biologi, spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang	Lokasi pengumpulan data dan informasi biologi melalui port sampling untuk skala industri dilakukan di PPS Nizam Zachman, PPS Cilacap, PPN Pelabuhan Ratu dan Pelabuhan Benoa. Sementara untuk skala kecil dilakukan di Sumatera Barat (Bungus)
4	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara	Data *catch & effort* tuna dan cakalang menurut daerah penangkapan	Data *catch & effort* tuna dan cakalang menurut daerah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	dalam WPP secara reguler	penangkapan dalam WPP belum tersedia secara reguler
5	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS* dalam 5 tahun	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS*	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan *bycatch* dan *ERS* belum tersedia sesuai kebutuhan pelaporan
6	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	Ketentuan pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu	Ketentuan nasional hanya mengatur pelarangan penangkapan untuk hiu monyet (t*hresher shark*) dan hiu paus (*whale shark*)
7	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	Besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon	Informasi besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon belum diobservasi secara reguler
No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersedianya data estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun.	Data estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang	Dokumen tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang, antara lain: a) Fcurrent/FMSY belum diketahui. Dan, b)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

			SBcurrent/SBMSY belum diketahui
2	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	Tercukupinya jumlah 1) enumerator data statistik dan/atau, 2) perbaikan sistem/mekanisme data statistik	Jumlah enumerator yang tersedia saat ini (…) dan mekanisme data statistik saat ini belum tercukupi
3	Terlaksananya perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini	Draft revisi ketentuan pengelolaan dan penataan rumpon	Pelaksanaan PERMEN KP. No 26/2014 tentang Rumpon tidak berjalan sebagaimana mestinya
4	Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan karbon dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang dalam 5 tahun.	Dokumen hasil kajian mitigasi, adaptasi dan karbon dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang	Dokumen hasil kajian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah tersedia (dokumen WPEA-SM)
5	Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah perairan indonesia dalam 5 tahun	Metode/cara adaptasi perubahan iklim yang dapat diaplikasikan pada perikanan tuna	Dokumen pengembangan perubahan iklim yang tersedia saat ini baru sebatas pengenalan perubahan iklim
6	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	Besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon	Informasi besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon belum diobservasi secara reguler

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

7	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS dalam 5 tahun	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS	Informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS belum tersedia sesuai kebutuhan pelaporan
8	Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun	Dokumen hasil Kajian identifikasi kebutuhan dan penyediaan umpan hidup	Dokumen hasil kajian identifikasi kebutuhan dan penyediaan umpan hidup masih bersifat parsial
9	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	Dokumen hasil kajian d-ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu	Ketentuan nasional hanya mengatur pelarangan penangkapan untuk hiu monyet (thresher shark), hiu lanjam (silky shark), hiu koboi (oceanic whitetip), hiu biru (blue shark), (mako shark) dan hiu paus (whale shark)
No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Termanfaatkannya *alokasi tangkapan* jenis tuna mata besar untuk *longline* berdasarkan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun.	Jumlah tuna mata besar produksi tahunan longline.	Produksi tuna mata besar yang tertangkap di tahun 2017 oleh kapal longline di ZEEI WPPNRI 716-717 sebesar 13 ton, jauh dibawah catch limit bigeye longline WCFPC untuk

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pusa-Naskah

			Indonesia sebesar 5889 ton
2	Terlaksananya pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun	Batasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC	Batasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC sebesar 68.935 mt untuk tuna mata besar, madidihang dan cakalang
3	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	informasi biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang	Lokasi pengumpulan data dan informasi biologi melalui port sampling di (…)
4	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	Data catch & effort tuna dan cakalang menurut daerah penangkapan dalam WPP secara reguler	Data catch & effort tuna dan cakalang menurut daerah penangkapan dalam WPP belum tersedia secara reguler
5	Perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini	Draft revisi ketentuan pengelolaan dan penataan rumpon	Pelaksanaan PERMEN KP. No 26/2014 tentang Rumpon tidak berjalan sebagaimana mestinya
6	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	Jumlah praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang terpantau oleh hasil inspeksi	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang terpantau oleh

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

			hasil inspeksi sebanyak (…)
7	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	Dokumen hasil kajian d-ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu	Ketentuan nasional hanya mengatur pelarangan penangkapan untuk hiu monyet (thresher shark), hiu lanjam (silky shark), hiu koboi (oceanic whitetip), hiu biru (blue shark), (mako shark) dan hiu paus (whale shark)
8	Terlaksananya sosialisasi prosedur penangkapan ikan di kantong laut lepas kepada asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Tuna Indonesia/ASTUIN, Asosiasi Kapal Perikanan Nasional/AKPN dan Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung/HIPPBI) dalam 4 tahun.	Dokumen prosedur penangkapan ikan di kantong laut lepas	Saat ini tidak ada kapal perikanan Indonesia yang memiliki akses penangkapan ikan di kantong laut lepas Samudera Pasifik
9	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	Besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon	Informasi besaran juvenil tuna mata besar dan/atau madidihang yang tertangkap oleh purse seine yang menggunakan rumpon belum diobservasi secara reguler
10	Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal purse seine sebesar 100% dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan jumlah observer di atas kapal purse seine	Jumlah observer yang ditempatkan di kapal purse seine saat ini sebesar (…%)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

11	Tersedianya informasi karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun	Informasi karakteristik operasi penangkapan data hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang (diantaranya, jumlah mata pancing per-basket, hasil tangkapan per-basket dalam kg dan ekor, dll.)	Informasi yang tersedia antara lain hasil tangkapan per-jenis alat tangkap dalam kg dan/atau ekor
12	Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun	Dokumen hasil Kajian identifikasi kebutuhan dan penyediaan umpan hidup	Dokumen hasil kajian identifikasi kebutuhan dan penyediaan umpan hidup belum tersedia

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola:
Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tuna dan cakalang, *bycatch* dan ERS.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 105 di bawah ini:

Tabel 105. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tuna dan cakalang

NO	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Terlaksananya monitoring pengembangan armada perikanan tuna dalam 5 tahun	Penetapan batasan kapasitas penangkapan sesuai alokasi tangkapan yang optimal di IOTC	Kapasitas penangkapan belum sesuai dengan alokasi tangkapan yang optimal di IOTC
2	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	Ketentuan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	Ketentuan penandaan alat penangkapan ikan belum tersedia

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

3	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Jumlah laporan logbook penangkapan ikan	Berdasarkan hasil verifikasi Masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara alat tangkap dengan hasil tangkapan serta hasil tangkapan dengan daerah penangkapannya
4	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Hasil verifikasi pelaporan logbook penangkapan ikan	Jumlah logbook penangkapan ikan yang diserahkan pada tahun 2018 di Samudera Hindia sebanyak 10.325 logbook
5	Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal penangkap tuna dan cakalang sebesar 25% dalam 5 tahun	Jumlah kapal penangkap tuna yang menerima observer	Kapal penangkap tuna yang menerima observer sebanyak (…) kapal
6	Peningkatan jumlah kapal yang terdaftar di IOTC yang memiliki nomor IMO sebanyak 100% dalam 3 tahun	Jumlah kapal yang terdaftar di IOTC yang memiliki nomor IMO	Jumlah kapal yang terdaftar di IOTC yang memiliki nomor IMO sebanyak 209 kapal
7	Peningkatan akurasi pelaporan hasil tangkapan di area statistik CCSBT sebesar 100 % dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan Jumlah kapal yang melaporkan hasil tangkapan secara akurat sesuai dengan area statistik CCSBT	Jumlah kapal yang melaporkan secara akurat sesuai dengan area statistik CCSBT mengalami peningkatan sebesar (…%) pada tahun 2018
8	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan	Jumlah praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	(*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	terpantau oleh hasil inspeksi	terpantau oleh hasil inspeksi sebanyak (…)
9	Terlaksananya pengawasan di sekitar buoy riset	Jumlah operasi penangkapan disekitar buoy riset yang terpantau oleh kegiatan pengawasan	Operasi penangkapan disekitar buoy riset belum termasuk dalam kegiatan pengawasan
10	Terlaksananya tindakan negara pelabuhan di 3 pelabuhan dalam 5 tahun	Terbentuknya otoritas pelaksana tindakan negara pelabuhan di 3 pelabuhan perikanan yang ditunjuk	Tim otoritas pelaksana tindakan negara pelabuhan belum dibentuk
11	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO	a) Kapasitas sumber daya manusia terdiri dari 1) pengumpul data meningkat sebesar (…%), 2) peneliti dan pengelola perikanan meningkat (…%), b) akurasi pelaporan ke RFMO meningkat sebesar (…%)
12	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun.	Daftar kapal aktif yang sudah terintegrasi	Penyajian data kapal aktif saat ini disajikan berdasarkan status perizinan
13	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilakukan	Kegiatan diseminasi terkait ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna dilaksanakan sebanyak (…) kali dan dihadiri sebanyak (…) peserta
14	Terlaksananya pemisahan data *nominal catch* untuk industri dan perikanan skala	Tersajinya data nominal catch untuk	Penyajian Data nominal catch untuk

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

	kecil sebanyak dalam 2 tahun	industri dan perikanan skala kecil secara terpisah	industri dan perikanan skala kecil saat ini belum terpisah
15	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	Tersedianya hasil tangkapan tuna dan cakalang dari kelompok kapal berukuran 0-10GT	Hasil tangkapan dari kelompok ukuran kapal berukuran 0-10GT masih dilakukan dengan pendekatan desa sampel
16	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	Tercukupinya jumlah enumerator/pengolah data/validator data statistik dan meningkatnya pemahaman enumerator/pengolah data/validator tentang metodologi pengumpulan data (one data system)	Enumerator/pengolah data one data sampai dengan 2019 sebanyak (…) orang. Validator kabupaten kota sebanyak (…) orang. Validator propinsi sebanyak (…) orang. Validator pusat sebanyak (…) orang (KONFIRMASI PUSDATIN)
17	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	Jumlah kapal penangkap tuna yang melaporkan hasil tangkapan yang dibuang	Kapal penangkap tuna yang melaporkan hasil tangkapan yang dibuang pada tahun (…) sebanyak (…)
18	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 2 tahun	Survey Sosial Ekonomi	Survey sosial ekonomi yang tersedia saat ini belum spesifik untuk perikanan tuna
19	Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dalam 5 tahun	Tindakan terhadap kapal yang masuk dalam IUU list RFMO	Saat ini tidak ada kapal Indonesia yang masuk dalam daftar IUU di RFMO

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

20	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	Dokumen laporan hasil pembentukan mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol	Mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkoluntuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol saat ini belum terbentuk
No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	Dokumen laporan hasil pembentukan mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol	Mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkoluntuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol saat ini belum terbentuk
2	Tesedianya informasi kapal penangkap tuna dan cakalang yang beroperasi di perairan kepulauan selama 2 tahun	Pengembangan Basis data kapal penangkap tuna dan cakalang di Perairan Kepulauan dan Teritorial Indonesia, ZEEI dan laut lepas	Pengembangan Basis data kapal penangkap tuna dan cakalang di Perairan Kepulauan dan Teritorial Indonesia, ZEEI dan laut lepas sudah tersedia namun belum dikembangkan sesuai kebutuhan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

3	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar 100% dalam 2 tahun.	Daftar kapal aktif yang sudah terintegrasi	Penyajian data kapal aktif saat ini belum terintegrasi
4	Pemanfaatan vessel monitoring system (VMS) secara optimal untuk mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 5 tahun	Kegiatan evaluasi pemantauan data VMS tracking	Saat ini belum adanya evaluasi tracking VMS kapal penangkap tuna sebagai dasar penilaian kepatuhan, perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di RFMO
5	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	Jumlah praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang terpantau oleh hasil inspeksi	Praktek penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak sesuai ketentuan yang terpantau oleh hasil inspeksi sebanyak (…)
6	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	Ketentuan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	Ketentuan penandaan alat penangkapan ikan belum tersedia
7	Berkurangnya jumlah aktivitas penangkapan tuna dengan cara yang merusak sebesar (…%) dalam 5 tahun	Prosentase Penurunan jumlah aktivitas penangkapan dengan cara yang merusak	Aktivitas penangkapan dengan cara yang merusak mengalami penurunan sebesar (…%)
8	Terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan lumba-lumba sebesar (…%) dalam 5 tahun.	Prosentase penurunan penangkapan lumba-lumba pada perikanan tuna	Penangkapan lumba-lumba saat ini sebanyak (…) kasus/bulan, mengalami penurunan sebesar (…%)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

9	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan pemerintah dan RFMO melalui kegiatan diseminasi dalam 5 tahun	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilakukan	Kegiatan diseminasi terkait ketentuan pemerintah dan RFMO dilaksanakan sebanyak (…) kali dan dihadiri sebanyak (…) peserta
10	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Jumlah laporan logbook penangkapan ikan	Jumlah logbook penangkapan ikan yang diserahkan pada tahun 2018 di Perairan Kepulauan 6979 logbook
11	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Hasil verifikasi pelaporan logbook penangkapan ikan	Berdasarkan hasil verifikasi Masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara alat tangkap dengan hasil tangkapan serta hasil tangkapan dengan daerah penangkapannya
12	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	Data catch & effort tuna dan cakalang menurut daerah penangkapan dalam WPP secara reguler	Data catch & effort tuna dan cakalang menurut daerah penangkapan dalam WPP belum tersedia secara reguler
13	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	Tercukupinya jumlah enumerator/pengolah data/validator data statistik dan meningkatnya pemahaman enumerator/pengolah data/validator tentang metodologi	Enumerator/pengolah data one data sampai dengan 2019 sebanyak (…) orang. Validator kabupaten kota sebanyak (…) orang. Validator propinsi sebanyak (…) orang. Validator

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

		pengumpulan data (one data system)	pusat sebanyak (…) orang
14	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	Jumlah kapal penangkap tuna yang melaporkan hasil tangkapan yang dibuang	Kapal penangkap tuna yang melaporkan hasil tangkapan yang dibuang pada tahun (…) sebanyak (…)
15	Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun	Kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy	Kajian Sosio-ekonomi belum dilaksanakan
16	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun	Survey Sosial Ekonomi	Survey sosial ekonomi yang tersedia saat ini belum spesifik untuk perikanan tuna
17	Tersusunnya *Harvest Strategy* (HS) untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 3 tahun	Dokumen *harvest strategy* (HS) untuk perikanan tuna dan cakalang	Saat ini baru tersedia *harvest strategy framework*
18	Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 3 tahun	Ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR)	Saat ini Harvest Control Rules (HCR) masih dalam proses penyusunan
19	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO	a) Kapasitas sumber daya manusia terdiri dari 1) pengumpul data meningkat sebesar (…%), 2) peneliti dan pengelola perikanan meningkat (…%), b) akurasi pelaporan ke RFMO meningkat sebesar (…%)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

20	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	Tersedianya hasil tangkapan tuna dan cakalang dari kelompok kapal berukuran 0-10GT	Hasil tangkapan dari kelompok ukuran kapal berukuran 0-10GT masih dilakukan dengan pendekatan desa sampel

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	Penyusunan materi ketentuan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	Draft ketentuan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang yang dilaksanakan
2	Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dalam 5 tahun	Tindakan terhadap kapal yang masuk dalam IUU list RFMO	Saat ini tidak ada kapal Indonesia yang masuk dalam daftar IUU di RFMO
3	Peningkatan jumlah kapal perikanan Indonesia yang tercantum pada *RFMO Record of Fishing Vessel and Authorized to Fish* dalam 3 tahun	Prosentase jumlah kapal perikanan Indonesia yang tercantum pada *RFMO Record of Fishing Vessel and Authorized to Fish*	Jumlah kapal perikanan indonesia yang tercantum pada WCPFC Record of Authorized Vessel sebanyak 22 unit kapal
4	Pemanfaatan vessel monitoring system (VMS) secara optimal untuk mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 3 tahun	Kegiatan evaluasi pemantauan data VMS tracking	Saat ini belum adanya evaluasi tracking VMS kapal penangkap tuna sebagai dasar penilaian kepatuhan, perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di RFMO
5	Terlaksananya sosialisasi prosedur pemeriksaan kapal di laut lepas kepada aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam 5 tahun	Sosialisasi pemeriksaan kapal di laut lepas	Indonesia belum melakukan kegiatan pemeriksaan kapal di laut lepas
6	Terlaksananya pengawasan di sekitar *buoy* riset dalam 3 tahun	Jumlah operasi penangkapan disekitar buoy riset yang terpantau oleh kegiatan pengawasan	Operasi penangkapan disekitar buoy riset belum termasuk dalam kegiatan pengawasan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

7	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun.	Daftar kapal aktif yang sudah terintegrasi	Penyajian data kapal aktif saat ini disajikan berdasarkan status perizinan
8	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna sebesar dalam 5 tahun	Tercukupinya jumlah enumerator/pengolah data/validator data statistik dan meningkatnya pemahaman enumerator/pengolah data/validator tentang metodologi pengumpulan data (one data system)	Enumerator/pengolah data one data sampai dengan 2019 sebanyak (…) orang. Validator kabupaten kota sebanyak (…) orang. Validator propinsi sebanyak (…) orang. Validator pusat sebanyak (…) orang (KONFIRMASI PUSDATIN)
9	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	Jumlah kapal penangkap tuna yang melaporkan hasil tangkapan yang dibuang	Kapal penangkap tuna yang melaporkan hasl tangkapan yang dibuang pada tahun (…) sebanyak (…)
10	Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun	Kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy	Kajian Sosio-ekonomi belum dilaksanakan
11	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun	Survey Sosial Ekonomi	Survey sosial ekonomi yang tersedia saat ini belum spesifik untuk perikanan tuna
12	Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah WCPFC dalam 5 tahun	Metode/cara adaptasi perubahan iklim yang dapat diaplikasikan pada perikanan tuna	Dokumen pengembangan perubahan iklim yang tersedia saat ini baru sebatas pengenalan perubahan iklim

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

13	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO	a) Kapasitas sumber daya manusia terdiri dari 1) pengumpul data meningkat sebesar (…%), 2) peneliti dan pengelola perikanan meningkat (…%), b) akurasi pelaporan ke RFMO meningkat sebesar (…%)
14	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Jumlah laporan logbook penangkapan ikan	Jumlah logbook penangkapan ikan yang diserahkan pada tahun 2018 di Perairan Samudera Pasifik 1436 logbook
15	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Hasil verifikasi pelaporan logbook penangkapan ikan	Berdasarkan hasil verifikasi Masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara alat tangkap dengan hasil tangkapan serta hasil tangkapan dengan daerah penangkapannya
16	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	Tersedianya hasil tangkapan tuna dan cakalang dari kelompok kapal berukuran 0-10GT	Hasil tangkapan dari kelompok ukuran kapal berukuran 0-10GT masih dilakukan dengan pendekatan desa sampel
17	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	Dokumen laporan hasil pembentukan mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam	Mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

		pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol	Tongkoluntuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol saat ini belum terbentuk

Tujuan 3 Berdasarkan Aspek Persyaratan Pasar (*Market Requirement*):
Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tuna dan cakalang.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 106 di bawah ini:

Tabel 106. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tuna dan cakalang

No	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Meningkatnya pelaporan pemasaran ekspor dan impor ikan Tuna dan sejenis tuna sesuai ketentuan RFMO sebesar 100% dalam 5 tahun.	Laporan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan RFMO	Laporan ekspor impor belum dirincikan sesuai kebutuhan RFMO
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	Kegiatan pendukung perolehan sertifikasi ecolabeling	Kegiatan Harvest Strategy yang diinisiasi oleh pemerintah telah dilakukan dalam rangka mendukung perolehan sertifikasi ecolabeling
3	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam (…) tahun.	Dokumen Kegiatan kajian sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan	Dokumen *supply chain system* tuna dan cakalang di Samudera Hindia

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

		peningkatan mutu hasil tangkapan) di Samudera Hindia	saat ini belum tersedia
4	Terlaksananya pemasangan *tag* dan *Catch Documentation Scheme* untuk tuna sirip biru selatan sebesar 100% dalam (…) tahun sesuai ketentuan CCSBT	*Time lag* penyampaian laporan pemasangan tag Tuna Sirip Biru Selatan	Terdapat time lag (…) hari dari ketentuan CCSBT yaitu (…) hari sejak Tuna Sirip Biru Selatan didaratkan
5	Terlaksananya pemantauan ketertelusuran dan legalitas hasil tangkapan nelayan skala kecil	Tumbuhnya inisiatif ketelusuran dan legalitas hasil tangkapan nelayan skala kecil	Inisiatif ketelusuran dan legalitas hasil tangkapan nelayan skala kecil baru tumbuh secara skala lokal
No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam (…) tahun.	Dokumen Kegiatan kajian sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan)	Dokumen *supply chain system* tuna dan cakalang di Perairan Kepulauan Indonesia saat ini belum tersedia
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	Kegiatan pendukung perolehan sertifikasi ecolabeling	Kegiatan Harvest Strategy yang diinisiasi oleh pemerintah telah dilakukan dalam rangka mendukung perolehan sertifikasi ecolabeling

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

No	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Pasifik sebesar 100% dalam (...) tahun.	Dokumen Kegiatan kajian sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan)	Dokumen *supply chain system* tuna dan cakalang di Perairan Kepulauan Indonesia saat ini belum tersedia
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	Kegiatan pendukung perolehan sertifikasi ecolabeling	Kegiatan Harvest Strategy yang diinisiasi oleh pemerintah telah dilakukan dalam rangka mendukung perolehan sertifikasi ecolabeling

2. Indikator dan tolok ukur pengelolaan tongkol (*neritic tuna*)

Untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk pengelolaan tongkol (*neritic tuna*).

Tujuan Nomor 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya: Terwujudnya pengelolaan tongkol dan ekosistemnya secara berkelanjutan

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 107 di bawah ini:

Tabel 107. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tongkol

No	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersedianya data Estimasi potensi, tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya tongkol pada 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 5 tahun.	Estimasi potensi, tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber	Dokumen estimasi potensi saat ini belum dirinci untuk kelompok tongkol

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

		daya tongkol pada 11 WPPNRI	
2	Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 2 tahun	Ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR)	Ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) belum tersedia
3	Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan carbon dampak perubahan iklim terhadap tongkol dalam 5 tahun	kajian mitigasi, adaptasi dan carbondampak perubahan iklim terhadap tongkol serta panduan mitigasi	Dokumen hasil kajian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum tersedia

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola:
Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tongkol, *bycatch dan ERS.*

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 108 di bawah ini:

Tabel 108. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tongkol

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO	a) Kapasitas sumber daya manusia terdiri dari 1) pengumpul data meningkat sebesar (…%), 2) peneliti dan pengelola perikanan meningkat (…%), b) akurasi pelaporan ke RFMO meningkat sebesar (…%)

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

2	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi dalam 2 tahun	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilakukan	Kegiatan diseminasi terkait ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna dilaksanakan sebanyak (…) kali dan dihadiri sebanyak (…) peserta
3	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Jumlah laporan logbook penangkapan ikan	Jumlah logbook penangkapan ikan yang diserahkan pada tahun 2018 di Perairan Kepulauan 18739 logbook
4	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	Hasil verifikasi pelaporan logbook penangkapan ikan	Berdasarkan hasil verifikasi Masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara alat tangkap dengan hasil tangkapan serta hasil tangkapan dengan daerah penangkapannya

Tujuan 3 Berdasarkan Aspek Persayaratan Pasar (*Market Requirement*): Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tongkol

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan nomor 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 109 di bawah ini:

Tabel 109. Indikator dan tolok ukur sasaran Nasional dan sasaran di WPPNRI pengelolaan tongkol

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	INDIKATOR	TOLOK UKUR
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) neritic tuna di 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 3 tahun.	Dokumen Kegiatan kajian sistem rantai pasok (dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan)	Dokumen sistem rantai pasok (supply chain system) neritic tuna di 11 WPPNRI saat ini belum tersedia

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Draf Naskah

D. RENCANA AKSI PENGELOLAAN

Adapun susunan rencana aksi untuk mencapai setiap sasaran yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan tuna dan cakalang
   a. Rencana aksi untuk mencapai sasaran pengelolaan tuna dan cakalang di WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 sebanyak 117.
   b. Rencana aksi untuk mencapai sasaran pengelolaan tuna dan cakalang di WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715 sebanyak 93.
   c. Rencana aksi untuk mencapai sasaran pengelolaan tuna dan cakalang di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 sebanyak 89.
2. Pengelolaan tongkol
   a. Rencana aksi untuk mencapai sasaran Nasional pengelolaan Tongkol sebanyak 93.
   b. Rencana aksi untuk mencapai sasaran pengelolaan Tongkol di 11 WPPNRI sebanyak 55.

Uraian rinci masing-masing rencana aksi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

1. Rencana Aksi Pengelolaan Tuna dan Cakalang

Tujuan Nomor 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya: Terwujudnya pengelolaan Tuna dan Cakalang dan ekosistemnya secara berkelanjutan

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TUNA DAN CAKALANG

NO	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 DAN WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Terlaksananya pemantauan hasil tangkapan Tuna Sirip Biru selatan berdasarkan ketentuan CCSBT di seluruh lokasi potensial pendaratan tangkapan jenis ikan tersebut dalam 5 tahun.	1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pelabuhan perikanan yang memiliki potensi pendaratan Tuna Sirip Biru Selatan	DJPT (PSDI)	2020
		2. Melakukan sosialisasi aturan CCSBT ke pelabuhan yang telah teridentifikasi	DJPT (PSDI)	2020
		3. Pemenuhan kelengkapan perangkat dalam rangka pelaksanaan CDS: a. Penetapan petugas validasi, b. Pembuatan admin untuk aplikasi CDS	DJPT (PSDI)	2020
		4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan CDS	DJPT (PSDI)	2021
		5. Melakukan validasi/verifikasi data hasil pelaksanaan CDS	DJPT (PSDI)	2021-2024
2	Tersedianya informasi terkini mengenai karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun	1. Penyusunan protokol pengumpulan data teknis rinci metode penangkapan ikan tuna dan cakalang	Pusriskan	2020
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan untuk setiap metode penangkapan ikan tuna dan cakalang	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan diseminasi hasil analisis data metode penangkapan tuna dan cakalang	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2022 dan 2024
3	Tersedianya informasi terkini mengenai biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	1. Melakukan pemantauan hasil tangkapan untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	Pusriskan, Dit PSDI	2020-2024
		2. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang	Pusriskan/BRPL	2020-2024
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan untuk memperoleh informasi biologi, spasial dan temporal tuna cakalang	Pusrikan, Dit PSDI	2023
		4. Menggunakan hasil riset dan pemantauan hasil tangkapan untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 DAN WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
4	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	1. Melakukan identifikasi optimalisasi pemanfaatan data logbook untuk penyediaan data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		2. Penyusunan protokol dan sistem pengolahan data logbook untuk penyediaan data catch dan effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		3. Melakukan lokakarya hasil penyajian data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2021
		4. Menggunakan hasil optimalisasi pemanfaatan data logbook untuk memperkuat laporan kepada RFMO	PSDI	2021-2024
5	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS dalam 5 tahun	1. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi biologi hasil tangkapan bycatch dan Ecologically Related Species sesuai dengan waktu dan daerah penangkapan ikan	BRSDMKP (Puriskan)	2020-2024
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan bycatch dan Ecologically Related Species untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporalnya sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan ikan bycatch dan Ecologically Related Species untuk memperoleh informasi biologi, spasial dan temporalnya	BRSDMKP (Puriskan)	2021 dan 2024
		4. Menyampaikan informasi hasil analisis biologi spasial dan temporal tangkapan bycatch dan ERS setiap tahun (antara lain RFMO, IUCN, dst)	DJPT (Dit PSDI)	2021-2024
6	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	1. Melakukan konsolidasi dan analisis data dampak perikanan tuna dan cakalang terhadap jenis hiu tertentu	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Melakukan review pelaksanaan regulasi yang ada saat ini terkait pengelolaan jenis hiu tertentu	DJPT (Dit PSDI dan Bagian Hukum)	2020
		3. Menyusun bahan untuk regulasi pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu pada perikanan tuna	DJPT (Dit PSDI)	2021
		4. Melaksanakan sosialisasi kepada stekholder tentang regulasi spesies hiu tertentu yang dilarang untuk ditangkap	DJPT (Dit PSDI)	2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 DAN WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		5. Melakukan pengawasan kapal penangkap ikan tuna dan cakalang dan mengidentifikasi adanya praktik penangkapan hiu yang dilarang	PSDKP	2021-2024
		6. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan penangkapan spesies hiu tertentu	PSDKP	2021-2024
		7. Menyampaikan hasil aktivitas dan pemantauan kapal sebagai dasar pertimbangan perpanjangan SIPI	PSDKP	2021-2024
7	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan pengkajian komposisi produksi alat penangkapan ikan purse seine dengan menggunakan rumpon	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Memfasilitasi kesediaan kapal purse seine dalam rangka pengkajian komposisi produksi yang menggunakan rumpon	Asosiasi	2020
		3. Menyusun laporan hasil kajian antara lain mencakup: a. Jenis ikan yang tertangkap; b. Komposisi produksi menurut jenis ikan; c. Data biologi antara lain berupa jenis kelamin, panjang dan berat, tingkat kematangan gonad untuk tuna mata besar dan madidihang yang tertangkap; d. Informasi ilmiah lainnya.	BRSDMKP (Puriskan)	2021
		4. Menyusun rekomendasi tindakan mitigasi (antara lain: penempatan observer on board pada periode penutupan penggunaan rumpon), untuk mengurangi produksi juvenile tuna mata besar dan madidihang yang berasosiasi dengan cakalang	DJPT (Dit PSDI)	2021-2022
		5. Menyampaikan hasil kajian pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	BRSDMKP (Puriskan)	2022
		6. Memepergunakan hasil kajian untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT (Dit. PSDI)	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

a. WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersedianya data estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun.	1. Melakukan pengumpulan data produksi tahunan *(historical catch)* tuna dan cakalang di WPPNRI	Pusdatin	2020-2024
		2. Melaksanakan kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang dengan menentukan: a. MSY; b. F current/F MSY; c. SB current/ SB MSY	DJPT (Dit PSDI), Puriskan	2021
		3. Menyampaikan hasil kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	PSDI	2022
		4. Menyampaikan hasil kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang kepada Komnas Kajiskan	PSDI	2022
		5. Mengusulkan kebijakan estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang	PSDI	2022
		6. Menetapkan potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang	PSDI	2023
		7. Melaksanakan *updating* estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang	PSDI	2024
2	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	1. Melakukan rekapitulasi data statistik yang berasal dari provinsi	DJPT	2020
		2. Melakukan validasi data statistik tuna dan cakalang setiap tahun, dengan unsur provinsi	DJPT	2020
		3. Melakukan pelatihan (…) enumerator di provinsi khususnya untuk pendataan tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS*	BRSDMKP	2020
		4. Melakukan pengumpulan data produksi tuna dan cakalang berdasarkan metode statistik yang ada	Pemerintah daerah provinsi	2020-2021
		5. Melakukan validasi data statistik tuna dan cakalang setiap tahun	DJPT	2021
		6. Melakukan pengumpulan data produksi tuna dan cakalang perusahaan yang berlokasi di wilayahnya	Pemerintah daerah provinsi	2020-2021
		7. Memfasilitasi kegiatan validasi dengan pelaku usaha	Asosiasi	2020-2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pusat Naskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		8. Menyajikan estimasi data produksi tahunan antara lain berdasarkan: a. Total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; b. Wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI dan Laut Lepas); c. Komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; d. Jenis species tuna dan cakalang, bycatch dan ERS; e. Armada penangkapan.	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2021
		9. Melaksanakan *workshop* estimasi produksi tahunan dan peningkatan sistem pengumpulan data tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS* setiap tahun	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2022
		10. Menyampaikan laporan statistik perikanan tuna dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional dan RFMO	DJPT	2022
3	Terlaksananya perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini	1. Melaksanakan kajian komprehensif tentang komposisi ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon	DJPT dan BRSDMKP	2020
		2. Menyampaikan rekomendasi pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT dan BRSDMKP	2021
		3. Melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum tentang pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu	Ditjen PSDKP	2021
		4. Melakukan estimasi komposisi hasil tangkapan juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang berdasarkan bulan penangkapan	DJPT dan BRSDMKP	2021-2022
		5. Menetapkan pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang	DJPT dan BRSDMKP	2023

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
4	Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan karbon dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang dalam 5 tahun.	1. Melakukan review kajian hasil mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari dokumen WPEA-SM	BRSDMKP (Puriskan)	2020-2021
		2. Melaksanakan kajian dampak perubahan iklim diantaranya emisi karbon dari aktivitas perikanan tuna dan cakalang serta adaptasi dan mitigasinya	BRSDMKP (Puriskan)	2020-2021
		3. Melaksanakan analisis data hasil kajian perubahan iklim dan aplikasinya terhadap stok Tuna dan Cakalang	BRSDMKP (Puriskan)	2022
		4. Menggunakan hasil kajian perubahan iklim sebagai dasar penyusunan adaptasi dan mitigasi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		5. Melakukan penyusunan panduan anduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada pelaku perikanan di perairan wilayah kepulauan Indonesia	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		6. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan panduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada pelaku perikanan di perairan wilayah kepulauan Indonesia	BRSDMKP (Puriskan)	2023-2024
		7. Mengevaluasi pelaksanaan tindakan mitigasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kondisi perikanan tuna dan cakalang, dan hasilnya dipresentasikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional serta Komisi Ilmiah RFMO	BRSDMKP (Puriskan)	2024
5	Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah perairan indonesia dalam 5 tahun	1. Melakukan kajian pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah wilayah perairan kepulauan Indonesia	Puriskan	2020-2021
		2. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil kajian pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah wilayah perairan kepulauan Indonesia	PSDI, Puriskan	2021-2022
		3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan nelayan dan melaksanakan workshop pelatihan adaptasi perubahan iklim	PSDI	2022
		4. Melakukan evaluasi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	PSDI	2023-2024

Pra Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
6	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan pengkajian komposisi produksi alat penangkapan ikan purse seine dengan menggunakan rumpon	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Memfasilitasi kesediaan kapal purse seine dalam rangka pengkajian komposisi produksi yang menggunakan rumpon	Asosiasi	2020
		3. Menyusun laporan hasil kajian antara lain mencakup: a. Jenis ikan yang tertangkap; b. Komposisi produksi menurut jenis ikan; c. Data biologi antara lain berupa jenis kelamin, panjang dan berat, tingkat kematangan gonad untuk tuna mata besar dan madidihang yang tertangkap; d. Informasi ilmiah lainnya.	BRSDMKP (Puriskan)	2021
		4. Menyusun rekomendasi tindakan mitigasi (antara lain: penempatan observer on board pada periode penutupan penggunaan rumpon), untuk mengurangi produksi juvenile tuna mata besar dan madidihang yang berasosiasi dengan cakalang	DJPT (Dit PSDI)	2021-2022
		5. Menyampaikan hasil kajian pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	BRSDMKP (Puriskan)	2022
		6. Memepergunakan hasil kajian untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT (Dit. PSDI)	2022
7	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal hasil tangkapan bycatch dan ERS dalam 5 tahun	1. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi biologi hasil tangkapan bycatch dan Ecologically Related Species sesuai dengan waktu dan daerah penangkapan ikan	Puriskan	2020-2022
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan bycatch dan Ecologically Related Species untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporalnya sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	PSDI	2020-2022
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan ikan bycatch dan Ecologically Related Species untuk memperoleh informasi biologi, spasial dan temporalnya	PSDI	2023-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		4. Menyampaikan informasi hasil analisis biologi spasial dan temporal tangkapan bycatch dan ERS setiap tahun	PSDI	2024
		5. Menggunakan hasil kajian tangkapan ikan bycatch dan ERS sebagai bahan rekomendasi untuk mitigasi penurunan populasi ikan bycatch dan ERS	DJPT	2023
8	Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal perikanan huhate	PSDI	2020
		2. Melakukan kajian kebutuhan umpan hidup perikanan huhate	Puriskan	2020-2021
		3. Menganalisis data hasil kajian dan menyampaikan dalam pertemuan bersama para pelaku usaha dan asosiasi	Puriskan	2022
9	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	1. Melakukan konsolidasi dan analisis data dampak perikanan tuna dan cakalang terhadap jenis hiu tertentu	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Melakukan review pelaksanaan regulasi yang ada saat ini terkait pengelolaan jenis hiu tertentu	DJPT (Dit PSDI dan Bagian Hukum)	2020
		3. Menyusun bahan untuk regulasi pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu pada perikanan tuna	DJPT (Dit PSDI)	2021
		4. Melaksanakan sosialisasi kepada stekholder tentang regulasi spesies hiu tertentu yang dilarang untuk ditangkap	DJPT (Dit PSDI)	2021
		5. Melakukan pengawasan kapal penangkap ikan tuna dan cakalang dan mengidentifikasi adanya praktik penangkapan hiu yang dilarang	PSDKP	2021-2024
		6. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan penangkapan spesies hiu tertentu	PSDKP	2021-2024
		7. Menyampaikan hasil aktivitas dan pemantauan kapal sebagai dasar pertimbangan perpanjangan SIPI	PSDKP	2021-2024

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

b. WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Termanfaatkannya *alokasi tangkapan* jenis tuna mata besar untuk *longline* berdasarkan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun.	1. Melakukan evaluasi pemanfaatan alokasi tangkapan untuk tuna mata besar perikanan Longline di ZEEI dan Laut Lepas	DJPT	2020
		2. Melakukan sosialisasi alokasi tangkapan untuk tuna mata besar perikanan longline di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2020-2022	DJPT	2021
		3. Melakukan pemantauan jumlah produksi tuna mata besar oleh kapal longline setiap bulan melalui log book penangkapan ikan dan sistem pengumpulan data statistik	DJPT	2021-2022
		4. Membuat surat edaran/pemberitahuan kepada pelaku usaha dalam hal jumlah produksi sudah mencapai 80% dari *catch limit*	DJPT	2022
		5. Membuat surat edaran/moratorium penghentian penangkapan tuna mata besar oleh kapal longline, dalam hal jumlah produksi telah mencapai *catch limit* (100%)	DJPT	2022
2	Terlaksananya pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC dalam 5 tahun	1. Melakukan evaluasi pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC	DJPT	2020
		2. Melakukan sosialisasi pembatasan hasil tangkapan purse seine di ZEEI sesuai dengan ketentuan WCPFC	DJPT	2021
		3. Melakukan pemantauan pembatasan hasil tangkapan purse seine secara reguler melalui log book penangkapan ikan dan sistem pengumpulan data statistik	DJPT	2021-2022
		4. Membuat surat edaran/pemberitahuan kepada pelaku usaha dalam hal jumlah produksi sudah mencapai 80% dari *catch limit*	DJPT	2022
		5. Membuat surat edaran/moratorium penghentian penangkapan tuna mata besar, madidihan, dan cakalang oleh kapal purse seine, dalam hal jumlah produksi telah mencapai *catch limit* (100%)	DJPT	2022
3		1. Melakukan pemantauan hasil tangkapan untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporal ikan tuna	Pusriskan, Dit PSDI	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	Tersedianya informasi biologi spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	dan cakalang sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan		
		2. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi biologi, spasial dan temporal ikan tuna dan cakalang	Pusriskan/BRPL	2020-2024
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan untuk memperoleh informasi biologi, spasial dan temporal tuna cakalang	Pusrikan, Dit PSDI	2023
		4. Menggunakan hasil riset dan pemantauan hasil tangkapan untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
4	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	1. Melakukan identifikasi optimalisasi pemanfaatan data logbook untuk penyediaan data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		2. Penyusunan protokol dan sistem pengolahan data logbook untuk penyediaan data catch dan effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		3. Melakukan lokakarya hasil penyajian data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2022
		4. Menggunakan hasil riset dan pemantauan hasil tangkapan untuk memperkuat laporan kepada RFMO	PSDI	2024
5	Perbaikan kebijakan pengelolaan dan penataan rumpon sesuai dengan kondisi terkini	1. melaksanakan kajian komprehensif tentang komposisi ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum tentang pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu	Ditjen PSDKP	2021
		3. Melakukan estimasi komposisi hasil tangkapan juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang berdasarkan bulan penangkapan	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2021
		4. Menyampaikan rekomendasi pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang pada pertemuan yang	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2022

Pra Finalisasi

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional		
		5. Menetapkan pelarangan/pembatasan penggunaan rumpon oleh purse seine untuk bulan tertentu, guna melindungi tertangkapnya juvenille tuna mata besar, madidihang, dan cakalang	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2023
6	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	1. Melakukan sosialisasi kepada asosiasi/pelaku usaha dan otoritas Pelabuhan Perikanan tentang larangan penyimpanan dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dit PP)	2020
		2. Melakukan inspeksi jenis ikan tangkapan sampingan (*bycatch*) yang disimpan di atas kapal dan/atau yang akan didaratkan oleh setiap kapal tuna	PSDKP	2020-2024
		3. Menerbitkan brosur, leaflet dan poster tentang pelarangan penyimpanan di atas dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dt PP) dan BRSDMKP	2020-2021
		4. Memberikan sanksi kepada kapal yang terbukti menyimpan di atas kapal dan/atau mendaratkan tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai dengan ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
		5. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan pelarangan penyimpanan di atas kapal tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
7	Terlaksananya harmonisasi ketentuan pelarangan spesies hiu tertentu dalam 5 tahun	1. Melakukan konsolidasi dan analisis data dampak perikanan tuna dan cakalang terhadap jenis hiu tertentu	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Melakukan review pelaksanaan regulasi yang ada saat ini terkait pengelolaan jenis hiu tertentu	DJPT (Dit PSDI dan Bagian Hukum)	2020
		3. Menyusun bahan untuk regulasi pelarangan penangkapan spesies hiu tertentu pada perikanan tuna	DJPT (Dit PSDI)	2021
		4. Melaksanakan sosialisasi kepada stekholder tentang regulasi spesies hiu tertentu yang dilarang untuk ditangkap	DJPT (Dit PSDI)	2021
		5. Melakukan pengawasan kapal penangkap ikan tuna dan cakalang dan mengidentifikasi adanya praktik penangkapan hiu yang dilarang	PSDKP	2021-2024

Pramasyan

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		6. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan penangkapan spesies hiu tertentu	PSDKP	2021-2024
		7. Menyampaikan hasil aktivitas dan pemantauan kapal sebagai dasar pertimbangan perpanjangan SIPI	PSDKP	2021-2024
8	Terlaksananya sosialisasi prosedur penangkapan ikan di kantong laut lepas kepada asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Tuna Indonesia/ASTUIN, Asosiasi Kapal Perikanan Nasional/AKPN dan Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung/HIPPBI) dalam 4 tahun.	1. Menyusun panduan penangkapan ikan di kantong laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasifik Bagian Timur (IATTC)	DJPT	2020
		2. Menyusun laporan tahunan hasil pemantauan VMS kapal berbendera Indonesia yang melakukan operasi penangkapan ikan di kantong laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasifik Bagian Timur (IATTC).	Ditjen PSDKP	2021
		3. Melakukan sosialisasi panduan penangkapan ikan di kantong laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasifik Bagian Timur (IATTC)	DJPT	2021
		4. Menyusun daftar kapal yang akan melakukan operasi penangkapan ikan di kantong laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasifik Bagian Timur (IATTC)	DJPT	2021-2022
		5. Menyusun laporan tahunan operasi penangkapan oleh kapal berbendera Indonesia di kantong laut lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasifik Bagian Timur (IATTC), antara lain mencakup : a. Jumlah dan nama kapal, b. Jenis alat penangkapan ikan, c. Jumlah dan jenis produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.	DJPT	2023
9	Berkurangnya jumlah tuna mata besar dan/atau madidihang berukuran kecil (juvenile) dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan pengkajian komposisi produksi alat penangkapan ikan purse seine dengan menggunakan rumpon	BRSDMKP (Puriskan)	2020
		2. Memfasilitasi kesediaan kapal purse seine dalam rangka pengkajian komposisi produksi yang menggunakan rumpon	Asosiasi	2020
		3. Menyusun laporan hasil kajian antara lain mencakup: a. Jenis ikan yang tertangkap; b. Komposisi produksi menurut	BRSDMKP (Puriskan)	2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Konsultasi

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		jenis ikan; c. Data biologi antara lain berupa jenis kelamin, panjang dan berat, tingkat kematangan gonad untuk tuna mata besar dan madidihang yang tertangkap; d. Informasi ilmiah lainnya.		
		4. Menyusun rekomendasi tindakan mitigasi (antara lain: penempatan observer on board pada periode penutupan penggunaan rumpon), untuk mengurangi produksi juvenile tuna mata besar dan madidihang yang berasosiasi dengan cakalang	DJPT (Dit PSDI)	2021-2022
		5. Menyampaikan hasil kajian pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	BRSDMKP (Puriskan)	2022
		6. Memepergunakan hasil kajian untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT (Dit. PSDI)	2022
10	Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal purse seine sebesar 100% dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		2. Menyusun rencana penempatan tahunan pemantau di atas kapal	DJPT	2020
		3. Melakukan estimasi jumlah trip penangkapan/tahun untuk setiap kapal penangkap ikan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		4. Menyusun rencana tahunan penempatan jumlah observer	DJPT	2020
		5. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi (...)orang petugas pemantau di atas kapal *(observer on-board)*	DJPT	2020-2021
		6. Memfasilitasi penempatan petugas pemantau di atas kapal *(observer on-board)* hingga mencapai cakupan program observer nasional 5% dari jumlah trip penangkapan/tahun	DJPT	2020-2021
		7. Melakukan kegiatan pengumpulan data pemantau di atas kapal	DJPT	2020-2024
		8. Melakukan validasi/verifikasi data hasil pemantauan observer oleh Tim validasi yang terdiri dari kelompok peneliti *(scientist group)* dan pengelola *(managers)*	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2020-2024
		9. Mengolah data hasil pemantauan observer berdasarkan jenis alat penangkapan ikan antara lain: a. data hasil	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		tangkapan dan upaya penangkapan (catch and effort data); b. data biologi produksi tuna, antara lain berupa kematangan gonad, length frequency, dan ukuran berat; c. jumlah dan jenis hasil tangkapan sampingan (bycatch); d. jumlah dan jenis ERS; e. data komposisi ukuran(size compotition data)		
		10. Menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan *national observer program* pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional serta *Scientific Committee RFMO*	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2023
		11. Melakukan benchmarking data hasil observer dengan data riset dan enumerator	DJPT	2020-2024
11	Tersedianya informasi karakteristik operasi penangkapan dan hasil tangkapan ikan Tuna dan Cakalang dalam 5 tahun	1. Penyusunan protokol pengumpulan data teknis rinci metode penangkapan ikan tuna dan cakalang	Pusriskan	2020
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan untuk setiap metode penangkapan ikan tuna dan cakalang	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan diseminasi hasil analisis data metode penangkapan tuna dan cakalang	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2022 dan 2024
12	Teridentifikasinya kebutuhan umpan hidup dan penyediaannya untuk perikanan huhate dalam 3 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal perikanan huhate	PSDI	2020
		2. Melakukan kajian kebutuhan umpan hidup perikanan huhate	Puriskan	2020-2021
		3. Menganalisis data hasil kajian dan menyampaikan dalam pertemuan bersama para pelaku usaha dan asosiasi	Puriskan, Asosiasi, PSDI	2022

Pra Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola:
Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tuna dan cakalang, *bycatch* dan ERS.

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TUNA DAN CAKALANG

a. WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Terlaksananya monitoring pengembangan armada perikanan tuna dalam 5 tahun	*1.* Melakukan review dokumen rencana Pengembangan Armada Tuna dan Cakalang, di perairan Samudera Hindia (Teritorial, Kepulauan, ZEEI dan Laut Lepas) dengan paling sedikit memuat informasi tentang: a. Jumlah kapal berdasarkan ukuran dan jenis alat penangkapan ikan; b. Wilayah Penangkapan Ikan; c. Proyeksi pembangunan kapal	DJPT, Pusriskan dan Dinas Provinsi	2020
		2. Melakukan inventarisasi jumlah dan nama kapal yang tercantum dalam *IOTC Record of Vessel Authorized to Fish,* namun tidak memperpanjang SIPI /kapal tidak aktif	DJPT (Dit PSDI)	2020
		3. Melakukan inventarisasi jumlah dan nama kapal penangkap ikan tuna dan cakalang berukuran 30 GT ke bawah yang berkaitan dengan tuna dan cakalang, dan menyusun rencana pengembangan armada penangkapan	DJPT dan Dinas Provinsi	2020
		4. Menetapkan kebijakan Rencana Pengembangan Armada Tuna dan Cakalang	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2021-2022
		5. Menyampaikan Rencana Pengembangan Armada Tuna dan Cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional dan diteruskan kepada Sekretariat IOTC	DJPT	2022
		6. Menyampaikan Rencana Pengembangan Armada Tuna dan Cakalang di bawah 30 GT pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	Pemerintah daerah provinsi	2022
		7. Melakukan penerbitan SIPI sesuai rencana pengembangan armada	DJPT	2022-2023

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Nasskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		8. Melakukan penerbitan SIPI untuk kapal di bawah 30 GT berdasarkan Rencana Pengembangan Armada Tuna dan Cakalang	Pemerintah daerah provinsi	2022-2023
		9. Melakukan evaluasi sinkronisasi penerbitan SIPI dan realisasi pengembangan armada tuna setiap (...) tahun	DJPT	2024
2	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi alat tangkap pada kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. KAPI)	2021
		2. Menyusun kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2021-2022
		3. Menetapkan kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		4. Melakukan sosialisasi kebijakan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		5. Melakukan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2023-2024
3	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal penangkap ikan tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan wilayah penangkapan yang wajib melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020
		2. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. PSDI)	2021
		3. Melakukan analisis kepatuhan kapal diatas 5 GT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dalam melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2022
		4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi; antara lain penyampaian surat klarifikasi, surat peringatan pelaporam LBPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		5. Menerapkan kebijakan kepatuhan melaksanakan log book penangkapan ikan sebagai persyaratan perpanjangan SIPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		6. Melakukan sosialisasi kebijakan kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		6. Melakukan sosialisasi kebijakan kepatuhan pelaksanaan logbook yang terupdate	DJPT (Dit. PSDI)	2022
		7. Memfasilitasi kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan oleh para anggota asosiasi	Asosiasi	2020-2024
		8. Melakukan kegiatan monitoring kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		9. Menyampaikan hasil analisis tahunan data log book penangkapan ikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		10. Melakukan workshop tahunan progress pelaksanaan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		11. Menyusun kertas posisi Indonesia dalam negosiasi penentuan kuota produksi tuna mata besar, madidihang, albakora dan cakalang di RFMO dengan memanfaatkan hasil analisis data log book penangkapan ikan	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2020
		12. Mendorong adopsi strategi *stock rebuilding* untuk madidihang sesuai dengan ketentuan IOTC	DJPT	2024
4	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2020-2024
		2. Melakukan pengolahan data log book penangkapan ikan dan menyajikan data produksi oleh Tim Validasi berdasarkan: a. Total produksi Nasional dan WPPNRI; b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan; c. data hasil tangkapan dan upaya; d. hasil tangkapan per unit upaya penangkapan/catch per unit of effort (CPUE); e. frekuensi ukuran (size frequency); f. jumlah dan jenis bycatch; g. jumlah dan jenis ERS. Pengolahan data produksi dilakukan dengan mengelaborasi data observer on-oboard untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan pengumpulan data primer untuk kapal berukuran di bawah 30 GT	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		3. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi kapal sesuai kewenangannya berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024
		4. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Asosiasi	2021-2024
		5. Melakukan kegiatan benchmarking akurasi antara data logbook, data hasil pemantauan dan riset	DJPT, Puriskan	2022-2023
5	Peningkatan jumlah penempatan observer di atas kapal penangkap tuna dan cakalang sebesar 25% dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		2. Menyusun rencana penempatan tahunan pemantau di atas kapal	DJPT	2020
		3. Melakukan estimasi jumlah trip penangkapan/tahun untuk setiap kapal penangkap ikan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		4. Menyusun rencana tahunan penempatan jumlah observer	DJPT	2020
		5. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi (...)orang petugas pemantau di atas kapal *(observer on-board)*	DJPT	2020-2021
		6. Memfasilitasi penempatan petugas pemantau di atas kapal *(observer on-board)* hingga mencapai cakupan program observer nasional 5% dari jumlah trip penangkapan/tahun	DJPT	2020-2021
		7. Melakukan kegiatan pengumpulan data pemantau di atas kapal	DJPT	2020-2024
		8. Melakukan validasi/verifikasi data hasil pemantauan observer oleh Tim validasi yang terdiri dari kelompok peneliti *(scientist group)* dan pengelola *(managers)*	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2020-2024
		9. Mengolah data hasil pemantauan observer berdasarkan jenis alat penangkapan ikan antara lain: a. data hasil tangkapan dan upaya penangkapan (catch and effort data); b. data biologi produksi tuna, antara lain berupa kematangan gonad, length frequency, dan ukuran berat;	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		c. jumlah dan jenis hasil tangkapan sampingan (bycatch); d. jumlah dan jenis ERS; e. data komposisi ukuran(size compotition data)		
		10. Menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan *national observer program* pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional serta *Scientific Committee RFMO*	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2023
		11. Melakukan benchmarking data hasil observer dengan data riset dan enumerator	DJPT dan BRSDKP (Puriskan)	2020-2024
6	Peningkatan jumlah kapal yang terdaftar di IOTC yang memiliki nomor IMO sebanyak 100% dalam 3 tahun	1. Melakukan sosialisasi pendaftaran kapal untuk memperoleh IMO number	DJPT (Dit KAPI dan Dit PSDI)	2020
		2. Mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran kapal untuk memperoleh IMO number	DJPT (Dit KAPI dan Dit PSDI)	2021
		3. Menggunakan hasil evaluasi pendaftaran kapal dalam memperoleh IMO number, sebagai bahan penyusuna laporan tahunan ke IOTC	DJPT (Dit PSDI)	2021-2024
7	Peningkatan akurasi pelaporan hasil tangkapan di area statistik CCSBT sebesar 100 % dalam 5 tahun	1. Melakukan evaluasi terhadap kapal aktif yang terdaftar di CCSBT	DJPT	2020
		2. Melakukan sosialisasi mengenai statistical area CCSBT kepada perusahan pemegang kuota Tuna Sirip Biru Selatan	DJPT	2021
		3. Melakukan validasi area statistik CCSBT pada pelaksanaan catch documentation scheme (CDS) bersama dengan PSDKP dan Loka Riset Perikanan Tuna PUSRISKAN	DJPT	2021-2022
8	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	1. Melakukan sosialisasi kepada asosiasi/pelaku usaha dan otoritas Pelabuhan Perikanan tentang larangan penyimpanan dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dit PP)	2020
		2. Melakukan inspeksi jenis ikan tangkapan sampingan (*bycatch*) yang disimpan di atas kapal dan/atau yang akan didaratkan oleh setiap kapal tuna	PSDKP	2020-2024
		3. Menerbitkan brosur, leaflet dan poster tentang pelarangan penyimpanan di atas dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dt PP) dan BRSDMKP	2020-2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		4. Memberikan sanksi kepada kapal yang terbukti menyimpan di atas kapal dan/atau mendaratkan tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai dengan ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
		5. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan pelarangan penyimpanan di atas kapal tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
9	Terlaksananya pengawasan di sekitar buoy riset	1. Melakukan review informasi operasi penangkapan di sekitar Buoy	DJPT	2020
		2. Melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan penangkapan di sekitar buoy	PSDKP	2020
		3. Melakukan kegiatan pemantauan di lokasi yang diduga terdapat aktivitas penangkapan di sekitar buoy	PSDKP	2020-2021
		4. Melakukan evaluasi kasus operasi penangkapan di sekitar buoy setelah kegiatan pemantauan	DJPT, PSDKP	2021-2022
10	Terlaksananya tindakan negara pelabuhan di 3 pelabuhan dalam 5 tahun	1. Menyusun petunjuk pelaksanaan tindakan negara pelabuhan *(port state measures)* berdasarkan Resolusi RFMO	DJPT	2020
		2. Menetapkan dan memberitahukan kepada RFMO pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum yang dapat memberikan pelayanan pelabuhan kepada kapal penangkap ikan berbendera asing	DJPT	2022
		3. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan tindakan negara pelabuhan *(port state measures)* pada pelabuhan perikanan dan pelabuhan niaga	DJPT	2020-2021
		4. Melakukan pelatihan pelaksanaan tindakan negara pelabuhan *(port state measures)* bagi (…) orang petugas di pelabuhan perikanan	DJPT	2023
		5. Melakukan pengawasan kegiatan kapal penangkap ikan berbendera asing di pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum	Dit PSDKP	2021-2023
		6. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan tindakan negara pelabuhan *(port state measures)* untuk disampaikan kepada RFMO	DJPT	2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
11	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Perikanan dalam memahami rekomendasi ilmiah untuk diterjemahkan kedalam kebijakan	BRSDMKP	2020
		2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi data, metode stock assessment, harvest strategy dan management strategy evaluation serta dalam memberikan rekomendasi ilmiah kepada pengelola perikanan	BRSDMKP	2020
		3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengumpul data untuk memahami Teknik sampling, identifikasi dan penggunaan instrument pengumpulan data.	BRSDMKP	2020
		4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perikanan dan peneliti untuk berperan aktif di RFMO	BRSDMKP	2021
		5. Melakukan kegiatan pertemuan antara peneliti dan pengelola perikanan	BRSDMKP	2022
12	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun.	1. Melaksanakan inventarisasi tahunan daftar kapal berukuran di atas 30 GT yang memiliki SIPI di Samudera Hindia berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	DJPT (Dit PSDI dan Dit PDK)	2020-2021
		2. Memantau VMS *recording tracking* kapal yang melaksanakan kegiatan penangkapan setiap tahun	Ditjen PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan inventarisasi anggota asosiasi yang memiliki SIPI di Samudera Hindia berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	Asosiasi	2020-2021
		4. Melakukan integrasi hasil inventarisasi data kapal aktif dengan sistem lainnya	DJPT	2021-2022
		5. Menyampaikan daftar kapal aktif berdasarkan jenis alat penangkapan ikan kepada IOTC	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
13	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO	1. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang izin Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi prioritas pembinaan	DJPT (Dit PSDI)	2020

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi	2. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan dan/atau pengolahan tuna dan cakalang yang menjadi prioritas pembinaan izin daerah	Pemerintah daerah provinsi	2020
		3. Merekomendasikan anggota asosiasi sebagai peserta workshop	Asosiasi	2020
		4. Melakukan workshop dan sosialisasi mengenai ketentuan Nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna	DJPT (Dit PSDI)	2021
14	Terlaksananya pemisahan data *nominal catch* untuk industri dan perikanan skala kecil sebanyak dalam 2 tahun	1. Melakukan estimasi komposisi skala perikanan pada tiap-tiap pelabuhan perikanan yang mendaratkan ikan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		2. Melakukan validasi komposisi skala perikanan pada pelabuhan perikanan tertentu yang mendaratkan tuna dan cakalang	Puriskan	2020-2021
		3. Melakukan kajian pemisahan data nominal catch berdasarkan skala perikanan	Puriskan	2020-2021
		4. Melakukan kegiatan benchmarking data hasil pemisahan bersama dengan data logbook, observer dan enumerator	Puriskan	2020-2021
		5. Melakukan workshop hasil kajian pemisahan data *nominal catch* yang sudah terpisah berdasarkan skala perikanan	DJPT	2020
15	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	1. Melakukan estimasi komposisi skala perikanan pada tiap-tiap pelabuhan perikanan yang mendaratkan ikan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		2. Melakukan validasi komposisi skala perikanan pada pelabuhan perikanan tertentu yang mendaratkan tuna dan cakalang	Puriskan	2020
		3. Melakukan kajian pemisahan data nominal catch berdasarkan skala perikanan	Puriskan	2021
		4. Melakukan kegiatan benchmarking data hasil pemisahan bersama dengan data logbook, observer dan enumerator	Puriskan	2020-2021
		5. Melakukan workshop hasil kajian pemisahan data nominal catch yang sudah terpisah berdasarkan skala perikanan	DJPT	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
16	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	1. Melakukan rekapitulasi data statistik yang berasal dari provinsi	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024
		2. Melakukan validasi tahunan data statistik tuna dan cakalang dengan unsur provinsi	Pusdatin	2020-2024
		3. Melakukan pelatihan (…) enumerator di provinsi khususnya untuk pendataan tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS*	BRSDMKP	2020
		4. Melakukan pengumpulan data produksi tuna dan cakalang berdasarkan metode statistik yang ada	Pusdatin	2020-2024
		5. Melakukan validasi data statistik tahunan tuna dan cakalang	Pusdatin	2020-2024
		6. Melakukan kegiatan pengolahan data hasil enumerator	Pusdatin	2020-2024
		7. Menyajikan estimasi data produksi tahunan antara lain berdasarkan: a. Total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; b. Wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI dan Laut Lepas); c. Komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; d. Jenis species tuna dan cakalang, bycatch dan ERS; e. Armada penangkapan.	Pusdatin dan BRSDMKP (Pusriskan)	2020-2024
		8. Melaksanakan diseminasi estimasi produksi tahunan dan peningkatan sistem pengumpulan data tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS* setiap tahun	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2021-2022
		9. Menyampaikan laporan statistik perikanan tuna dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional dan RFMO	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	2020-2024
17	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	1. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi hasil tangkapan yang dibuang ke laut	Puriskan	2020-2024
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang	DJPT dan Pusriskan	2021-2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		4. Melakukan diseminasi hasil analisis tangkapan yang dibuang untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT	2020-2024
18	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 2 tahun	1. Melaksanakan kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja	BRSDMKP	2020-2021
		2. Melakukan diseminasi hasil kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja kepada industri	BRSDMKP	2021
19	Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap aktivitas kapal yang melakukan pelanggaran IUU	PSDKP	2020-2021
		2. Melakukan tindakan bagi kapal perikanan Indonesia yang melakukan aktivitas IUU fishing	PSDKP	2020-2021
		3. Melaporkan hasil temuan kapal Indonesia yang melakukan aktivitas IUU fishing kepada RFMO	PSDKP	2022
20	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	1. Melakukan kajian identifikasi mekanisme formal untuk koordinasi stakeholder (antara lain: mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan, penyelesaian konflik serta peran dan tanggung jawab stakeholder)	DJPT	2020
		2. Melakukan konsultasi publik hasil kajian identifikasi mekanisme formal terhadap stakeholder terkait	DJPT	2020
		3. Menggunakan hasil kajian dan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan mekanisme formal untuk kordinasi stakeholder	DJPT	2020
		4. Memfasilitasi pertemuan reguler koordinasi stakeholder perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	DJPT	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

b. WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	1. Melakukan kajian identifikasi mekanisme formal untuk koordinasi stakeholder (antara lain: mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan, penyelesaian konflik serta peran dan tanggung jawab stakeholder)	DJPT	2020
		2. Melakukan konsultasi publik hasil kajian identifikasi mekanisme formal terhadap stakeholder terkait	DJPT	2020
		3. Menggunakan hasil kajian dan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan mekanisme formal untuk kordinasi stakeholder	DJPT	2020
		4. Memfasilitasi pertemuan reguler koordinasi stakeholder perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	DJPT	2020-2024
2	Tesedianya informasi kapal penangkap tuna dan cakalang yang beroperasi di perairan kepulauan selama 2 tahun	1. Melaksanakan pengumpulan informasi kapal penangkap tuna dan cakalang melalui database kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit PSDI)	2022
		2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengumpulan informasi kapal penangkap tuna dan cakalang melalui database kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit PSDI)	2021
3	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar 100% dalam 2 tahun.	1. Melaksanakan inventarisasi tahunan daftar kapal berukuran di atas 30 GT yang memiliki SIPI di Perairan Kepulauan berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	DJPT (Dit PSDI dan Dit PDK)	2020-2021
		2. Memantau VMS *recording tracking* kapal yang melaksanakan kegiatan penangkapan setiap tahun	Ditjen PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan inventarisasi anggota asosiasi yang memiliki SIPI di Perairan Kepulauan berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	Asosiasi	2020-2021
		4. Melakukan integrasi hasil inventarisasi data kapal aktif dengan sistem lainnya	DJPT	2021-2022
4	Pemanfaatan vessel monitoring system (VMS) secara optimal untuk	1. Mendorong kapal perikanan tuna dan cakalang untuk meenuhi ketentuan tentang penggunaan pemasangan keaktifan transmitter VMS	PSDKP	2020

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 5 tahun	2. Melakukan penyelidikan tahunan terhadap *VMS track-recording* kapal yang diketahui/diduga beroperasi diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam SIPI.	PSDKP	2020-2024
		3. Melakukan evaluasi dan analisis perbandingan jumlah Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter* (SKAT) yang diterbitkan dengan realisasi SKAT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	PSDKP	2020-2024
		4. Memanfaatkan hasil penyelidikan DJPSDKP tentang *VMS track-recording* kapal yang diketahui/diduga beroperasi diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam SIPI untuk menjadi dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di *RFMO.*	PSDKP	2020-2024
		5. Menyampaikan hasil penyelidikan kepada DJPT, untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di *RFMO.*	PSDKP	2020-2024
		6. Menyusun kebijakan mekanisme *manual reporting system* dalam hal transmitter mengalami kerusakan teknis.	PSDKP	2021
		7. Melakukan evaluasi data dan informasi kapal yang mengalami kerusakan teknis setiap tahun yang mencakup: a. Jumlah dan nama kapal yang mengalami kerusakan teknis; b. Jumlah dan nama kapal yang menyampaikan manual reporting; c. Jumlah dan nama kapal yang tidak menyampaikan manual reporting; d. Tindakan yang diambil terhadap kapal yang tidak menyampaikan manual reporting.	PSDKP	2020-2024
		8. Menyampaikan hasil evaluasi data dan informasi kapal yang mengalami kerusakan teknis sebagai dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal pada RFMO.	PSDKP	2020-2024
		9. Menyampaikan hasil pemantauan dan analisis *VMS track-recording* untuk kapal tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan pada pertemuan yang	PSDKP	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional		
5	Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun	1. Melakukan sosialisasi kepada asosiasi/pelaku usaha dan otoritas Pelabuhan Perikanan tentang larangan penyimpanan dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dit PP)	2020
		2. Melakukan inspeksi jenis ikan tangkapan sampingan (*bycatch*) yang disimpan di atas kapal dan/atau yang akan didaratkan oleh setiap kapal tuna	PSDKP	2020-2024
		3. Menerbitkan brosur, leaflet dan poster tentang pelarangan penyimpanan di atas dan/atau pendaratan jenis tangkapan sampingan (*bycatch*)	DJPT (Dt PP) dan BRSDMKP	2020-2021
		4. Memberikan sanksi kepada kapal yang terbukti menyimpan di atas kapal dan/atau mendaratkan tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai dengan ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
		5. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan pelarangan penyimpanan di atas kapal tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai ketentuan RFMO	DJPT dan PSDKP	2020-2024
6	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi alat tangkap pada kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. KAPI)	2021
		2. Menyusun kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2021-2022
		3. Menetapkan kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		4. Melakukan sosialisasi kebijakan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		5. Melakukan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2023-2024
		6. Melakukan evaluasi kegiatan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2024
7	Berkurangnya jumlah aktivitas penangkapan tuna dengan cara	1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adanya dugaan penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom)	DJPT dan Ditjen PSDKP	2020

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	yang merusak sebesar (…%) dalam 5 tahun	2. Melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom)	Ditjen PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan kajian dampak penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom) pada daerah tertentu	DJPT, BRSDMKP (Puriskan) dan Pemerintah Daerah Provinsi	2022
		4. Melakukan program peningkatan kesadaran tentang dampak negatif penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom) terhadap ekosistem dan kelestarian sumber daya tuna dan cakalang melalui workshop, booklet, leaflet, poster dan papan pengumuman	DJPT, Ditjen PSDKP, BRSDMKP (Puriskan) dan pemerintah daerah provinsi	2023
		5. Melakukan evaluasi efektifitas tindakan pemberantasan penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom)	DJPT, Ditjen PSDKP, BRSDMKP (Puriskan) dan pemerintah daerah provinsi	2023
		6. Menyampaikan hasil evaluasi efektifitas tindakan pemberantasan penangkapan tuna dan cakalang dengan menggunakan bahan peledak (bom) pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT	2023
8	Terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan lumba-lumba dalam 5 tahun.	1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adanya dugaan penangkapan lumba-lumba pada daerah tertentu	DJPT, BRSDMKP dan Ditjen PSDKP	2020
		2. Melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penangkapan lumba-lumba	Ditjen PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan program peningkatan kesadaran tentang dampak negatif penangkapan lumba-lumba terhadap ekosistem melalui workshop, booklet, leaflet, poster dan papan pengumuman	DJPT, BRSDMKP dan Ditjen PRL	2020-2021
		4. Melakukan evaluasi efektifitas tindakan pemberantasan penangkapan lumba-lumba	DJPT, BRSDMPK, Ditjen PRL dan Ditjen PSDKP	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		5. Menyampaikan hasil evaluasi efektifitas tindakan pemberantasan penangkapan lumba-lumba pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT	2023
9	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan pemerintah dan RFMO melalui kegiatan diseminasi dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang izin Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi prioritas pembinaan	DJPT (Dit PSDI)	2020
		2. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan dan/atau pengolahan tuna dan cakalang yang menjadi prioritas pembinaan izin daerah	Pemerintah daerah provinsi	2020
		3. Merekomendasikan anggota asosiasi sebagai peserta workshop	Asosiasi	2020
		4. Melakukan workshop dan sosialisasi mengenai ketentuan Nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna	DJPT (Dit PSDI)	2021
10	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal penangkap ikan tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan wilayah penangkapan yang wajib melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020
		2. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. PSDI)	2021
		3. Melakukan analisis kepatuhan kapal diatas 5 GT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dalam melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2022
		4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi; antara lain penyampaian surat klarifikasi, surat peringatan pelaporam LBPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		5. Menerapkan kebijakan kepatuhan melaksanakan log book penangkapan ikan sebagai persyaratan perpanjangan SIPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		6. Melakukan sosialisasi kebijakan kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		7. Memfasilitasi kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan oleh para anggota asosiasi	Asosiasi	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		8. Melakukan kegiatan monitoring kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		9. Menyampaikan hasil analisis tahunan data log book penangkapan ikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		10. Melakukan workshop tahunan progress pelaksanaan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		11. Menyusun kertas posisi Indonesia dalam negosiasi penentuan kuota produksi tuna mata besar, madidihang, albakora dan cakalang di RFMO dengan memanfaatkan hasil analisis data log book penangkapan ikan	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2020
11	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2020-2024
		2. Melakukan pengolahan data log book penangkapan ikan dan menyajikan data produksi oleh Tim Validasi berdasarkan: a. Total produksi Nasional dan WPPNRI; b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan; c. data hasil tangkapan dan upaya; d. hasil tangkapan per unit upaya penangkapan/catch per unit of effort (CPUE); e. frekuensi ukuran (size frequency); f. jumlah dan jenis bycatch; g. jumlah dan jenis ERS. Pengolahan data produksi dilakukan dengan mengelaborasi data observer on-oboard untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan pengumpulan data primer untuk kapal berukuran di bawah 30 GT	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi kapal sesuai kewenangannya berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		4. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Asosiasi	2021-2024
		5. Melakukan kegiatan benchmarking akurasi antara data logbook, data hasil pemantauan dan riset	DJPT, Puriskan	2022-2023
12	Tersedianya informasi hasil tangkapan dan upaya secara reguler baik spasial maupun temporal dalam 5 tahun	1. Melakukan identifikasi optimalisasi pemanfaatan data logbook untuk penyediaan data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		2. Penyusunan protokol dan sistem pengolahan data logbook untuk penyediaan data catch dan effort secara spasial dan temporal	PSDI	2020
		3. Melakukan lokakarya hasil penyajian data catch and effort secara spasial dan temporal	PSDI	2021
		4. Menggunakan hasil optimalisasi pemanfaatan data logbook untuk memperkuat laporan kepada RFMO	PSDI	2021-2024
13	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna dalam 5 tahun	1. Melakukan rekapitulasi data statistik yang berasal dari provinsi	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024
		2. Melakukan validasi tahunan data statistik tuna dan cakalang dengan unsur provinsi	Pusdatin	2020-2024
		3. Melakukan pelatihan (...) enumerator di provinsi khususnya untuk pendataan tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS*	BRSDMKP	2020
		4. Melakukan pengumpulan data produksi tuna dan cakalang berdasarkan metode statistik yang ada	Pusdatin	2020-2024
		5. Melakukan validasi data statistik tahunan tuna dan cakalang	Pusdatin	2020-2024
		6. Melakukan kegiatan pengolahan data hasil enumerator	Pusdatin	2020-2024
		7. Menyajikan estimasi data produksi tahunan antara lain berdasarkan:	Pusdatin dan BRSDMKP (Pusriskan)	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		a. Total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; b. Wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI dan Laut Lepas); c. Komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; d. Jenis species tuna dan cakalang, bycatch dan ERS; e. Armada penangkapan.		
		8. Melaksanakan diseminasi estimasi produksi tahunan dan peningkatan sistem pengumpulan data tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS* setiap tahun	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2021-2022
		9. Menyampaikan laporan statistik perikanan tuna dan cakalang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional dan RFMO	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	2020-2024
14	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	1. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi hasil tangkapan yang dibuang ke laut	DJPT	2020
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	DJPT	2020-2021
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang	DJPT	2022
		4. Menyampaikan informasi hasil analisis tangkapan yang dibuang untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT	2022
15	Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun	1. Melaksanakan kajian terkait aspek sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang	Puriskan	2020
		2. Menyusun *data-base*, indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI	Puriskan	2021
		3. Melaksanakan workshop Nasional terkait indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI	DJPT, PUriskan	2022
		4. Menyampaikan hasil kajian terkait indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI pada pertemuan yang	DJPT, Puriskan	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional		
		5. Menggunakan parameter sosio-ekonomi hasil kajian untuk pengembangan Harvest Strategy	DJPT	2022
16	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun	1. Melaksanakan kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja	BRSDMKP	2020-2021
		2. Melakukan diseminasi hasil kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja kepada industri	BRSDMKP	2022
17	Tersusunnya Harvest Strategy (HS) untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 3 tahun	1. Melakukan finalisasi rancangan Harvest Strategy di Perairan Kepulauan	DJPT	2020
		2. Penetapan Harvest Strategy di Perairan Kepulauan	DJPT	2020-2021
		3. Melakukan sosialisasi Harvest Strategy perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2022
18	Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 3 tahun	1. Penyusunan ketetapan pemanfaatan mengacu kepada Harvest Control Rules	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2022
		2. Melakukan inventarisasi ketentuan teknis pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules yang terdapat dalam Harvest Strategy	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2023
		3. Penyusunan rancangan ketentuan teknis pemanfaatan sumberdaya tuna dan cakalang	DJPT	2023
		4. Penetapan ketentuan teknis pemanfaatan sumberdaya tuna dan cakalang	DJPT	2024
19	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Perikanan dalam memahami rekomendasi ilmiah untuk diterjemahkan kedalam kebijakan	BRSDMKP	2020
		2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi data, metode stock assessment, harvest strategy dan management strategy evaluation serta dalam memberikan rekomendasi ilmiah kepada pengelola perikanan	BRSDMKP	2020

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengumpul data untuk memahami Teknik sampling, identifikasi dan penggunaan instrument pengumpulan data.	BRSDMKP	2020
		4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perikanan dan peneliti untuk berperan aktif di RFMO	BRSDMKP	2021
20	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	1. Melakukan estimasi komposisi skala perikanan pada tiap-tiap pelabuhan perikanan yang mendaratkan ikan tuna dan cakalang	DJPT	2020
		2. Melakukan validasi komposisi skala perikanan pada pelabuhan perikanan tertentu yang mendaratkan tuna dan cakalang	Puriskan	2020
		3. Melakukan kajian pemisahan data nominal catch berdasarkan skala perikanan	Puriskan	2021
		4. Melakukan kegiatan benchmarking data hasil pemisahan bersama dengan data logbook, observer dan enumerator	Puriskan	2020-2021

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

d. WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersedianya ketentuan dan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi alat tangkap pada kapal perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. KAPI)	2021
		2. Menyusun kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2021-2022
		3. Menetapkan kebijakan/ketentuan dan rencana penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		4. Melakukan sosialisasi kebijakan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2022
		5. Melakukan pelaksanaan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2023-2024
		6. Melakukan evaluasi kegiatan penandaan alat penangkapan ikan	DJPT	2024
2	Terlaksananya upaya penindakan terhadap kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap aktivitas kapal yang tercantum dalam IUU Vessel List di RFMO	DJPT, PSDKP	2020-2022
		2. Melakukan tindakan bagi kapal perikanan Indonesia yang melakukan aktivitas IUU fishing	PSDKP	2020-2022
		3. Melaporkan hasil temuan kapal Indonesia yang melakukan aktivitas IUU fishing kepada RFMO	PSDKP	2023
3	Peningkatan jumlah kapal perikanan Indonesia yang tercantum pada *RFMO Record of Fishing Vessel and Authorized to Fish* dalam 3 tahun	1. Melakukan sosialisasi pendaftaran kapal ke RFMO	DJPT	2020
		2. Pembuatan aplikasi teknologi (pendaftaran online) untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kapal ke RFMO	DJPT	2021
		3. Melakukan sosialisasi pendaftaran online kapal tuna ke RFMO	DJPT	2021-2022
		4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendaftaran online kapal ke RFMO	DJPT	2022
4	Pemanfaatan vessel monitoring system (VMS) secara optimal untuk mendukung pelaporan kepada RFMO dalam 3 tahun	1. Mendorong anggota asosiasi mematuhi ketentuan tentang pemasangan keaktifan transmitter VMS	PSDKP	2020
		2. Melakukan penyelidikan secara berkala terhadap *VMS track-recording* kapal yang diketahui/diduga beroperasi diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam SIPI.	PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan evaluasi dan analisis perbandingan jumlah Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter* (SKAT) yang	PSDKP	2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		diterbitkan dengan realisasi SKAT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan		
		4. Memanfaatkan hasil penyelidikan DJPSDKP tentang *VMS track-recording* kapal yang diketahui/diduga beroperasi diluar wilayah penangkapan yang tercantum dalam SIPI untuk menjadi dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di *RFMO.*	PSDKP	2021
		5. Menyampaikan hasil penyelidikan kepada DJPT, untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal di *RFMO.*	PSDKP	2022
		6. Menyusun kebijakan mekanisme *manual reporting system* dalam hal transmitter mengalami kerusakan teknis.	PSDKP	2022
		7. Melakukan evaluasi data dan informasi kapal yang mengalami kerusakan teknis setiap tahun yang mencakup: a. Jumlah dan nama kapal yang mengalami kerusakan teknis; b. Jumlah dan nama kapal yang menyampaikan manual reporting; c. Jumlah dan nama kapal yang tidak menyampaikan manual reporting; d. Tindakan yang diambil terhadap kapal yang tidak menyampaikan manual reporting.	PSDKP	2021-2022
		8. Menyampaikan hasil evaluasi data dan informasi kapal yang mengalami kerusakan teknis sebagai dasar pertimbangan perpanjangan SIPI dan pendaftaran kapal pada RFMO.	PSDKP	2023
		9. Menyampaikan hasil pemantauan dan analisis *VMS track-recording* untuk kapal tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	PSDKP	2023
5	Terlaksananya sosialisasi prosedur pemeriksaan kapal di laut lepas	1. Menyusun panduan prosedur pemeriksaan kapal di laut lepas di Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasific Bagian Timur (IATTC)	DJPT, PSDKP	2020-2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	kepada aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam 5 tahun	2. Kewajiban anggota asosiasi untuk menyampaiakan laporan dalam hal terjadi pemeriksaan kapal di laut lepas	PSDKP	2021
		3. Melakukan sosialisasi panduan prosedur pemeriksaan kapal di laut lepas di Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasific Bagian Timur (IATTC)	PSDKP	2021
		4. Mengumpulkan informasi kapal berbendera Indonesia yang terkena tindakan pemeriksaan kapal di laut lepas di Laut Lepas -dan Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasific Bagian Timur (IATTC)	PSDKP	2021-2022
		5. Menyampaikan laporan tentang kapal berbendera Indonesia yang terkena tindakan pemeriksaan kapal di laut lepas di Laut Lepas Samudera Hindia (IOTC) dan Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah (WCPFC) dan Samudera Pasific Bagian Timur (IATTC) kepada masing-masing RFMO	PSDKP	2023
6	Terlaksananya pengawasan di sekitar *buoy* riset dalam 3 tahun	1. Melakukan review informasi operasi penangkapan di sekitar Buoy	DJPT, PSDKP	2020
		2. Melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan penangkapan di sekitar buoy	PSDKP	2020
		3. Melakukan kegiatan pemantauan di lokasi yang diduga terdapat aktivitas penangkapan di sekitar buoy	PSDKP	2020-2021
		4. Melakukan evaluasi kasus operasi penangkapan di sekitar buoy setelah kegiatan pemantauan	PSDKP	2021-2022
7	Terlaksananya penyajian data kapal aktif secara terintegrasi sebesar dalam 3 tahun.	1. Melaksanakan inventarisasi tahunan daftar kapal berukuran di atas 30 GT yang memiliki SIPI di Samudera Hindia berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	DJPT (Dit PSDI dan Dit PDK)	2020-2021
		2. Memantau VMS *recording tracking* kapal yang melaksanakan kegiatan penangkapan setiap tahun	Ditjen PSDKP	2020-2021
		3. Melakukan inventarisasi anggota asosiasi yang memiliki SIPI di Samudera Hindia berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	Asosiasi	2020-2021
		4. Melakukan integrasi hasil inventarisasi data kapal aktif dengan sistem lainnya	DJPT	2021-2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		5. Menyampaikan daftar kapal aktif berdasarkan jenis alat penangkapan ikan kepada IOTC	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
8	Peningkatan akurasi dan penyajian data statistik perikanan tuna sebesar dalam 5 tahun	1. Melakukan rekapitulasi data statistik yang berasal dari provinsi	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024
		2. Melakukan validasi tahunan data statistik tuna dan cakalang dengan unsur provinsi	Pusdatin	2020-2024
		3. Melakukan pelatihan (...) enumerator di provinsi khususnya untuk pendataan tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS*	BRSDMKP	2020
		4. Melakukan pengumpulan data produksi tuna dan cakalang berdasarkan metode statistik yang ada	Pusdatin	2020-2024
		5. Melakukan validasi data statistik tahunan tuna dan cakalang	Pusdatin	2020-2024
		6. Melakukan kegiatan pengolahan data hasil enumerator	Pusdatin	2020-2024
		7. Menyajikan estimasi data produksi tahunan antara lain berdasarkan: a. Total produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; b. Wilayah penangkapan (perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI dan Laut Lepas); c. Komposisi produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan; d. Jenis species tuna dan cakalang, bycatch dan ERS; e. Armada penangkapan.	Pusdatin dan BRSDMKP (Pusriskan)	2020-2024
		8. Melaksanakan diseminasi estimasi produksi tahunan dan peningkatan sistem pengumpulan data tuna dan cakalang, *bycatch dan ERS* setiap tahun	DJPT dan BRSDMKP (Puriskan)	2021-2022
9	Tersedianya informasi hasil tangkapan yang di buang ke laut dalam 5 tahun	1. Melakukan riset tahunan untuk mengetahui informasi hasil tangkapan yang dibuang ke laut	DJPT, PSDKP	2020
		2. Melakukan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang sesuai dengan waktu dan derah penangkapan ikan	DJPT	2020-2021
		3. Melakukan harmonisasi data dan informasi riset dan pemantauan hasil tangkapan yang dibuang	DJPT	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		4. Menyampaikan informasi hasil analisis tangkapan yang dibuang untuk memperkuat laporan kepada RFMO	DJPT	2022
10	Terlaksananya kajian sosio-ekonomi dan tersusunnya parameter pengembangan Harvest Strategy dalam 3 tahun	1. Melaksanakan kajian terkait aspek sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang	Puriskan	2022
		2. Menyusun *data-base*, indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI	Puriskan	2020
		3. Melaksanakan workshop Nasional terkait indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI	DJPT	2021
		4. Menyampaikan hasil kajian terkait indikator dan tolok ukur kondisi sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang berdasarkan WPPNRI pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT	2021
		5. Menggunakan parameter sosio-ekonomi hasil kajian untuk pengembangan Harvest Strategy	DJPT	2022-2023
11	Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun	1. Melaksanakan kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja	DJPT, PSDKP	2020-2021
		2. Melakukan diseminasi hasil kegiatan riset mengenai aspek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan peran gender, kemiskinan, perbudakan dan tenaga kerja kepada industri	DJPT, PUriskan	2022
12	Terlaksananya pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah WCPFC dalam 5 tahun	1. Mengevaluasi dokumen hasil kajian dampak negatif perubahan iklim bagi perikanan tuna dan cakalang di wilayah WCPFC	Puriskan	2020
		2. Melakukan kajian pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah WCPFC	Puriskan	2020-2021
		3. Membentuk rekomendasi hasil kajian pengembangan adaptasi perubahan iklim di wilayah WCPFC	DJPT, Puriskan	2021-2022
		4. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan nelayan dan melaksanakan workshop pelatihan adaptasi perubahan iklim	DJPT	2022

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		5. Melakukan evaluasi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	DJPT	2023-2024
13	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Perikanan dalam memahami rekomendasi ilmiah untuk diterjemahkan kedalam kebijakan	BRSDMKP	2020
		2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi data, metode stock assessment, harvest strategy dan management strategy evaluation serta dalam memberikan rekomendasi ilmiah kepada pengelola perikanan	BRSDMKP	2020
		3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengumpul data untuk memahami Teknik sampling, identifikasi dan penggunaan instrument pengumpulan data.	BRSDMKP	2020
		4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perikanan dan peneliti untuk berperan aktif di RFMO	BRSDMKP	2021
14	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal penangkap ikan tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan wilayah penangkapan yang wajib melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020
		2. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT (Dit. PSDI)	2021
		3. Melakukan analisis kepatuhan kapal diatas 5 GT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dalam melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2022
		4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi; antara lain penyampaian surat klarifikasi, surat peringatan pelaporam LBPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		5. Menerapkan kebijakan kepatuhan melaksanakan log book penangkapan ikan sebagai persyaratan perpanjangan SIPI	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		6. Melakukan sosialisasi kebijakan kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		7. Memfasilitasi kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan oleh para anggota asosiasi	Asosiasi	2020-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.
Pra-Naskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		8. Melakukan kegiatan monitoring kepatuhan pelaksanaan logbook	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		9. Menyampaikan hasil analisis tahunan data log book penangkapan ikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	DJPT (Dit. PSDI)	2021-2024
		10. Melakukan workshop tahunan progress pelaksanaan log book penangkapan ikan	DJPT (Dit. PSDI)	2020-2024
		11. Menyusun kertas posisi Indonesia dalam negosiasi penentuan kuota produksi tuna mata besar, madidihang, albakora dan cakalang di RFMO dengan memanfaatkan hasil analisis data log book penangkapan ikan	Pusriskan, DJPT (Dit PSDI)	2020
15	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2020-2024
		2. Melakukan pengolahan data log book penangkapan ikan dan menyajikan data produksi oleh Tim Validasi berdasarkan: a. Total produksi Nasional dan WPPNRI; b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan; c. data hasil tangkapan dan upaya; d. hasil tangkapan per unit upaya penangkapan/catch per unit of effort (CPUE); e. frekuensi ukuran (size frequency); f. jumlah dan jenis bycatch; g. jumlah dan jenis ERS. Pengolahan data produksi dilakukan dengan mengelaborasi data observer on-oboard untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan pengumpulan data primer untuk kapal berukuran di bawah 30 GT	DJPT (Dit PSDI)	2020-2024
		3. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi kapal sesuai kewenangannya berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Pemerintah daerah provinsi	2020-2024
		4. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Asosiasi	2021-2024

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		5. Melakukan kegiatan benchmarking akurasi antara data logbook, data hasil pemantauan dan riset	DJPT, Puriskan	2022-2023
		6. Melakukan kegiatan perbaikan pengumpulan berdasarkan hasil benchmarking	DJPT	2024
16	Peningkatan akurasi hasil tangkapan tuna dan cakalang dari nelayan kecil dalam 2 tahun	1. Melakukan estimasi komposisi skala perikanan pada tiap-tiap pelabuhan perikanan yang mendaratkan ikan tuna dan cakalang	DJPT, PUriskan	2020
		2. Melakukan validasi komposisi skala perikanan pada pelabuhan perikanan tertentu yang mendaratkan tuna dan cakalang	Puriskan	2020
		3. Melakukan kajian pemisahan data nominal catch berdasarkan skala perikanan	Puriskan	2021
		4. Melakukan workshop hasil kajian pemisahan data nominal catch yang sudah terpisah berdasarkan skala perikanan	DJPT	2022
17	Terbentuknya mekanisme formal untuk mengkoordinasikan stakeholder dalam pengelolaan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam 5 tahun	1. Melakukan kajian identifikasi mekanisme formal untuk koordinasi stakeholder (antara lain: mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan, penyelesaian konflik serta peran dan tanggung jawab stakeholder)	DJPT	2020
		2. Melakukan konsultasi publik hasil kajian identifikasi mekanisme formal terhadap stakeholder terkait	DJPT	2020
		3. Menggunakan hasil kajian dan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan mekanisme formal untuk kordinasi stakeholder	DJPT	2020
		4. Memfasilitasi pertemuan reguler koordinasi stakeholder perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	DJPT	2020-2024

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tujuan 3 Berdasarkan Aspek Persyaratan Pasar (*Market Requirement*): Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tuna dan cakalang

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TUNA DAN CAKALANG

a. WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573

NO	SASARAN DI WPPNRI 571, WPPNRI 572 dan WPPNRI 573	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Meningkatnya pelaporan pemasaran ekspor dan impor ikan Tuna dan sejenis tuna sesuai ketentuan RFMO sebesar 100% dalam 5 tahun.	1. Melakukan review pelaporan pemasaran ekspor dan impor tuna	DJPT	2020
		2. Melakukan penyusunan bahan dan sosialisasi pelaporan pemasaran ekspor dan impor tuna	DJPT	2021
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	1. Melakukan inventarisasi usaha perikanan yang sedang dalam proses sertifikasi eco label	Ditjen PDSPKP dan DJPT	2020-2021
		2. Menyelenggarakan pelatihan bagi (…) perwakilan pelaku usaha/Asosiasi tentang Sertifikat *Ecolabelling*	Ditjen PDSPKP dan DJPT	2021-2022
		3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Pengembangan Perikanan dalam rangka optimalisasi ecolabelling	Ditjen PDSPKP dan DJPT	2022
		4. Mempromosikan Sertifikat *Ecolabelling* – Tuna Produksi Indonesia kepada ASEAN	Ditjen PDSPKP dan DJPT	2022-2023
3	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam 3 tahun.	1. Melakukan kajian sistem rantai pasok yang mencakup aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan	Ditjen PDSPKP, DJPT, PSDKP	2020-2021
		2. Melakukan workshop hasil kajian sistem rantai pasok dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan	Ditjen PDSPKP	2021
4	Terlaksananya pemasangan *tag* dan *Catch Documentation Scheme* untuk tuna sirip biru selatan sebesar 100% dalam 3 tahun sesuai ketentuan CCSBT	1. Melakukan Review pelaksanaan Catch Documentation Scheme	DJPT	2020
		2. Mewajibkan pemasangan *tag* dan *Catch Documentation Scheme* dalam ekportasi atau importasi tuna sirip biru selatan	DJPT	2020-2021
		3. Melakukan sosialisasi pemasangan *tag* dan petunjuk Teknis Pelaksanaan *Catch Documentation Scheme* untuk tuna	DJPT	2020-2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra-Naskah

		sirip biru selatan kepada pelaku usaha dan stakeholder lainnya		
		4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menerapkan pemasangan *tag* dan *Catch Documentation Scheme* untuk Tuna Sirip Biru Selatan yang merupakan syarat importasi dan/atau eksportasi tuna sirip biru selatan	DJPT	2021
		5. Melakukan rekapitulasi pemasangan tag dan data CDS yang telah divalidasi	DJPT	2021-2022
		6. Memastikan agar hasil tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan setiap anggota asosiasi tidak melebihi kuota yang diterima	DJPT	2022
		7. Penyusunan laporan pelaksanaan hasil CDS secara tahunan	DJPT	2023
5	Terlaksananya pemantauan ketertelusuran dan legalitas hasil tangkapan nelayan skala kecil dalam 2 tahun	1. Melakukan kajian skema ketelusuran hasil tangkapan lain yang dapat diaplikasikan di Indonesia	DJPT	2020
		2. Melakukan sosialisasi kajian ketelusuran hasil tangkapan lain yang dapat diaplikasikan di Indonesia	DJPT	2021

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

b. WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 713, WPPNRI 714 dan WPPNRI 715	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam (...) tahun.	1. Melakukan workshop hasil kajian pemisahan data nominal catch yang sudah terpisah berdasarkan skala perikanan	DJPT	2022
		2. Melakukan workshop hasil kajian sistem rantai pasok dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan	Ditjen PDSPK	2020
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	1. Melakukan inventarisasi usaha perikanan yang sedang dalam proses sertifikasi eco label	Ditjen PDSPK	2020-2021
		2. Menyelenggarakan pelatihan bagi (...) perwakilan pelaku usaha/Asosiasi tentang Sertifikat *Ecolabelling*	Ditjen PDSPK	2021-2022
		3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Pengembangan Perikanan dalam rangka optimalisasi ecolabelling	Ditjen PDSPK	2022
		4. Mempromosikan Sertifikat *Ecolabelling* – Tongkol Produksi Indonesia kepada ASEAN	Ditjen PDSPK	2022-2023

c. WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari Samudera Hindia sebesar 100% dalam (...) tahun.	1. Melakukan kajian sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang ditangkap di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 dan didaratkan di pelabuhan oleh kapal berbendera Indonesia/produksi kapal berbendera Indonesia	Ditjen PSDKP	2020
		2. Melakukan kajian sistem rantai pasok (*supply chain system*) tuna dan cakalang yang berasal dari kegiatan importasi dan didaratkan di WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	Ditjen PSDKP	2021
		3. Menyelenggarakan workshop Nasional tentang sistem rantai pasok *(supply chain system)* tuna dan cakalang di	Ditjen PSDKP	2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.
Pra Naskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI WPPNRI 716 dan WPPNRI 717	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		Indonesia baik yang berasal dari ikan hasil tangkapan di Indonesia maupun hasil importasi, setiap 2 (dua) tahun		
		4. Menindaklanjuti hasil dan rekomendasi workshop Nasional tentang sistem rantai-pasok *(supply chain system)* tuna dan cakalang di Indonesia baik yang berasal dari ikan hasil tangkapan di Indonesia maupun hasil importasi	Ditjen PSDKP	2020-2024
2	Terlaksananya kegiatan yang mendukung perolehan sertifikasi ecolabelling bagi pelaku usaha	1. Melakukan inventarisasi usaha perikanan yang sedang dalam proses sertifikasi eco label	Ditjen PSDKP	2020-2021
		2. Menyelenggarakan pelatihan bagi (…) perwakilan pelaku usaha/Asosiasi tentang Sertifikat *Ecolabelling*	Ditjen PSDKP	2021-2022
		3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Pengembangan Perikanan dalam rangka optimalisasi ecolabelling	Ditjen PSDKP	2022
		4. Mempromosikan Sertifikat *Ecolabelling* – Tongkol Produksi Indonesia kepada ASEAN	Ditjen PSDKP	2022-2023

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

2. Rencana Aksi Pengelolaan Tongkol (*Neritic Tuna*)

Tujuan Nomor 1 Berdasarkan Aspek Sumber Daya: Terwujudnya pengelolaan tongkol dan ekosistemnya secara berkelanjutan

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TONGKOL (*NERITIC TUNA*)

a. 11 WPPNRI

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersedianya data Estimasi potensi, tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya tongkol pada 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 5 tahun.	1. Melakukan pengumpulan data produksi tahunan *(historical catch)* tongkol berdasarkan WPPNRI	DJPT	2020-2022
		2. Melaksanakan kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol pada 11 WPPNRI dengan menentukan: a. MSY untuk tongkol, b. F current/F MSY untuk tongkol, c. SB current/ SB MSY untuk tongkol	BRSDMKP (Puriskan)	2022-2023
		3. Menyampaikan hasil kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		4. Menyampaikan hasil kajian estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol kepada Komnas Kajiskan	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		5. Mengusulkan kebijakan estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		6. Menetapkan potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol	BRSDMKP (Puriskan)	2023
		7. Melaksanakan *updating* estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tongkol setiap 2 tahun	BRSDMKP (Puriskan)	2024
2	Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 2 tahun	1. Penyusunan ketetapan pemanfaatan mengacu kepada Harvest Control Rules	DJPT dan Pusriskan	2023
		2. Melakukan penjabaran ketentuan teknis pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules yang terdapat dalam Harvest Strategy	DJPT	2023-2024
		3. Penyusunan rancangan ketentuan teknis pemanfaatan sumberdaya tuna dan cakalang	DJPT	2023

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

		4. Penetapan ketentuan teknis pemanfaatan sumberdaya tuna dan cakalang	DJPT	2023
3	Terlaksananya kajian mitigasi, adaptasi dan carbon dampak perubahan iklim terhadap tongkol dalam 5 tahun	1. Melakukan review kajian hasil mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari dokumen WPEA-SM	DJPT, Puriskan	2020
		2. Melakukan penyusunan panduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdasarkan dokumen WPEA-SM	DJPT	2020-2021
		3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan panduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada pelaku perikanan di perairan wilayah kepulauan Indonesia	DJPT	2021
		4. Mengevaluasi pelaksanaan tindakan mitigasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kondisi perikanan tuna dan cakalang, dan hasilnya dipresentasikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional serta Komisi Ilmiah RFMO	DJPT	2022-2023

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tujuan 2 Berdasarkan Aspek Tata Kelola: Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan penangkapan tongkol, *bycatch dan ERS.*

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TONGKOL

a. 11 WPPNRI

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengumpul data, peneliti dan pengelola perikanan) serta meningkatnya akurasi dan informasi teknis dalam pelaporan RFMO dalam 5 tahun	1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Perikanan memahami hasil rekomendasi ilmiah untuk diterjemahkan kedalam kebijakan	BRSDMKP	2020
		2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti memahami eksplorasi data, metode stock assessment, harvest strategy dan management strategy evaluation serta memberikan rekomendasi ilmiah kepada fisheries manager	BRSDMKP	2020
		3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengumpul data untuk memahami Teknik sampling, identifikasi dan penggunaan instrument pengumpulan data.	BRSDMKP	2020
		4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengawas perikanan untuk memahami peraturan dan melakukan pengawasannya	BRSDMKP	2021
		5. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola dan peneliti untuk berperan aktif di RFMO	BRSDMKP	2021
2	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan asosiasi terhadap ketentuan nasional dan RFMO terkait pengelolaan tuna melalui kegiatan diseminasi dalam 2 tahun	1. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang izin Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi prioritas pembinaan	DJPT	2020
		2. Melakukan inventarisasai pelaku usaha pengolahan tuna dan cakalang yang menjadi prioritas pembinaan	PDSPKP	2020
		3. Melakukan inventarisasi pelaku usaha penangkapan dan/atau pengolahan tuna dan cakalang yang menjadi prioritas pembinaan izin daerah	Pemerintah daerah provinsi	2020
		4. Merekomendasikan anggota asosiasi sebagai peserta pelatihan	Asosiasi	2021
3	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan log book	1. Melakukan inventarisasi jumlah kapal penangkap ikan tuna dan cakalang berdasarkan jenis alat penangkapan ikan	DJPT dan Pemerintah daerah provinsi	2020

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Pra Naskah

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	dan wilayah penangkapan yang wajib melaksanakan log book penangkapan ikan		
		2. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT	2021
		3. Melakukan analisis kepatuhan kapal (...) GT berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dalam melaksanakan log book penangkapan ikan	DJPT	2021-2022
		4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi; antara lain penyampaian surat klarifikasi, surat peringatan pelaporam LBPI	DJPT	2022
		5. Menerapkan kebijakan kepatuhan melaksanakan log book penangkapan ikan sebagai persyaratan perpanjangan SIPI	DJPT, dan pemerintah daerah provinsi	2022-2023
		6. Memfasilitasi kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan oleh para anggota asosiasi	Asosiasi	2023
		7. Menyampaikan hasil analisis data log book penangkapan ikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan skala nasional setiap tahun	DJPT dan BRSDMKP	2021
		8. Melakukan workshop progress pelaksanaan log book penangkapan ikan setiap tahun dan	DJPT	2021
		9. Menyusun kertas posisi Indonesia dalam negosiasi penentuan kuota produksi tuna mata besar, madidihang, albakora dan cakalang di RFMO dengan memanfaatkan hasil analisis data log book penangkapan ikan	DJPT dan BRSDMKP	2023
4	Peningkatan akurasi data penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun	1. Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi laporan logbook penangkapan ikan untuk perikanan tuna dan cakalang	DJPT	
		2. Melakukan pengolahan data log book penangkapan ikan dan menyajikan data produksi oleh Tim Validasi berdasarkan: a. Total produksi Nasional dan WPPNRI; b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan; c. data hasil tangkapan dan upaya;	DJPT dan BRSDMKP	2020-2021

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
		d. hasil tangkapan per unit upaya penangkapan/catch per unit of effort (CPUE); e. frekuensi ukuran (size frequency); f. jumlah dan jenis bycatch; g. jumlah dan jenis ERS. Pengolahan data produksi dilakukan dengan mengelaborasi data observer on-oboard untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan pengumpulan data primer untuk kapal berukuran di bawah 30 GT		
		3. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi kapal sesuai kewenangannya berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Pemerintah daerah provinsi	2021
		4. Melakukan rekapitulasi dan menyajikan data produksi berdasarkan: a. total produksi menurut wilayah penangkapan; dan b. komposisi ikan produksi menurut jenis alat penangkapan ikan.	Asosiasi	2021
		5. Melakukan kegiatan benchmarking akurasi antara data logbook, data hasil pemantauan dan riset	DJPT, Puriskan	2022-2023

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

Tujuan 3. Berdasarkan Aspek Persayaratan Pasar (*Market Requirement*): Terpenuhinya persyaratan pasar untuk tongkol.

RENCANA AKSI BERDASARKAN SASARAN NASIONAL DAN SASARAN WPPNRI PENGELOLAAN TONGKOL

a. 11 WPPNRI

NO	SASARAN PENGELOLAAN DI 11 WPPNRI	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Tersusunnya dokumen sistem rantai pasok (*supply chain system*) neritic tuna di 11 WPPNRI sebesar 100% dalam 3 tahun.	1. Melakukan kajian sistem rantai pasok yang mencakup aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan	Puriskan	2020
		2. Melakukan workshop hasil kajian sistem rantai pasok dalam cakupan aspek CPIB, sistem informasi dan peningkatan mutu hasil tangkapan	Ditjen PSDKP	2020

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

BAB IV
PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI DAN REVIEW

A. PERIODE PENGELOLAAN

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP-TCT ditetapkan.

B. EVALUASI DAN REVIEW

RPP-TCT dilakukan Evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, SDM, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapain sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan;
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana pengelolaan ini akan dievaluasi setiap tahun. Kegiatan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan. Review dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator EAFM.

Pelaksanaan review dilakukan berdasarkan:

a. perkembangan perikanan tuna ,cakalang, tongkol secara global;
b. informasi ilmiah terkini;
c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
d. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; serta
f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan tuna, cakalang, dan tongkol.

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan,
tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan TCT ini merupakan dasar utama pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol mencakup pengumpulan data, penerbitan perizinan, pelatihan, penanganan paska panen, penelitian dan pengawasan pada 11 WPPNRI serta pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP-TCT ini secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUJIASTUTI

Pra-Naskah

Dokumen hanya dipergunakan untuk proses pembahasan, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk dikutip.

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA, CAKALANG, DAN TONGKOL

GAMBAR
TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL

1. Tuna dan Cakalang

1. Tuna mata besar/*Bigeye tuna* *(Thunnus obesus)*	2. Madidihang/*Yellowfin tuna* *(Thunnus albacares)*
3. Albakora/*Albacore* *(Thunnus alalunga)*	4. Cakalang /*Skipjack tuna* *(Katsuwonus pelamis)*

5. Tuna ...

5. Tuna sirip biru selatan/*Southern bluefin tuna* (*Thunnus maccoyi*)	

2. Tongkol (*Neritic Tuna*)

1. Lisong/*Bullet tuna* (*Auxis rochei*)	2. Tongkol krai /*Frigate tuna* (*Auxis thazard*)

3. Tongkol ...

3. Tongkol komo/*Kawakawa* (*Euthynnus affinis*)	4. Tongkol abu-abu/*Longtail tuna* (*Thunnus tonggol*)
5. Tenggiri papan/*Indo-pasific king mackerel* (*Scomberomorus guttatus*)	6. Tenggiri/*Narrow-barred spanish mackerel* (*Scomberomorus commerson*)

Dilengkapi ...

Dilengkapi dengan ikan hasil sampingan/*Bycath* (Hiu dan Billfish) dan *Ecologically Related Species* (Penyu Laut/Marine Turtle, Burung Laut/Seabirds, Mamalia Laut/Cetacean)

1. Hiu

1. 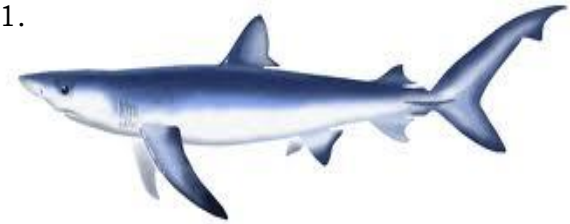 Hiu selendang/*Blue shark* (*Prionace glauca*)	2. Hiu koboi/*Oceanic whitetip shark* (*Carcharhinus longimanus*)
3. Hiu martil/*Scalloped hammerhead shark* (*Sphyrna lewini*)	4. Hiu tenggiri/*Shortfin mako shark* (*Isurus oxyrinchus*)
5. 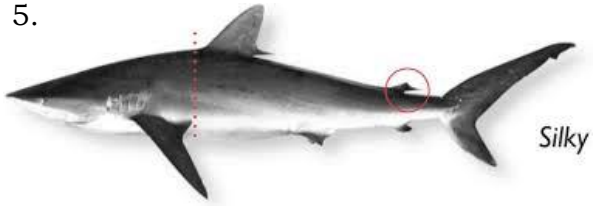 Hiu lanjam/*Silky shark* (*Carcharhinus falciformis*)	7. Hiu monyet/*Bigeye thresher shark* (*Alopias superciliosus*)

6. Hiu ...

6. Hiu tikus/*Pelagic thresher shark* (*Alopias pelagius*)	

2. Billfish

1. Ikan todak/*Swordfish* (*Xiphias gladius*)	2. Setuhuk hitam/*Black marlin* (*Makaira indica*)
3. Setuhuk biru/*Blue marlin* (*Makaira nigricans*)	4. Setuhuk loreng/*Striped marlin* (*Tetrapturus audax*)

5. Ikan ...

5. Ikan layaran Indo-Pasifik/*Indo-pasific sailfish* (*Istiophorus platypterus*)	

3. Penyu Laut (*Marine Turtle*)

1. 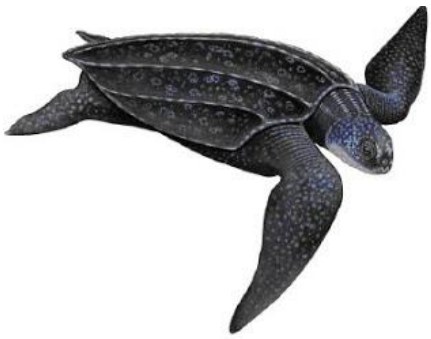 Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*)	2. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*)
3. Penyu pipih (*Natator depressus*)	4. Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*)

5. Penyu ...

5. Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*)	6. Penyu tempayan (*Caretta caretta*)
7. 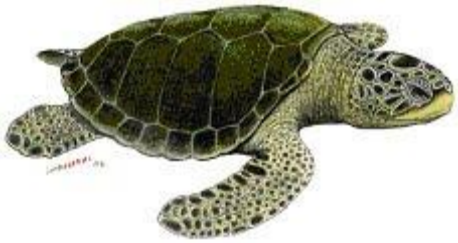 Penyu lekang kempii (*Lepidochelys kempi*)	

4. Burung Laut (*Seabirds*)

1. Skua	2. Camar kepala hitam

3. Dara ...

3. Dara - Laut	4. Auk
5. *Skimmer*	6. Kaki - Rumbai

5. Mamalia ...

5. Mamalia Laut (*Cetacean*)

1. Paus	2. Lumba-lumba
3. Pesut	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI